

KAJIAN EKONOMI REGIONAL

Provinsi Lampung

Triwulan III - 2009

Visi, Misi Bank Indonesia

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan.

Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia

Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Visi dan Misi Bank Indonesia	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik.....	v
Kata Pengantar	viii
Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Lampung	x
Ringkasan Eksekutif	xii
BAB 1 KONDISI MAKRO EKONOMI REGIONAL	1
1. Kondisi Umum.....	1
2. Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan.....	2
2.1. Konsumsi Swasta	2
2.2. Konsumsi Pemerintah	6
2.3. Investasi	7
2.4. Ekspor – Impor	9
3. Perkembangan PDRB dari Sisi Penawaran	17
Boks : Krisis Listrik di Provinsi Lampung	26
BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI	33
1. Kondisi Umum.....	33
2. Faktor-faktor Penyebab	34
2.1. Inflasi Triwulanan (qtq)	34
2.2. Inflasi Bulanan (mtm).....	36
2.3. Inflasi Tahunan (yoy).....	38
BAB 3 PERKEMBANGAN UMUM PERBANKAN	40
1. Perkembangan Umum Perbankan	40
2. Bank Umum	44
2.1. Kelembagaan Bank Umum	44
2.2. Perkembangan Aset Bank Umum	44
2.3. Perkembangan Dana Masyarakat Bank Umum	46
2.4. Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum	47
2.5. Kualitas Kredit	48
2.6. Intermediasi Perbankan Bank Umum	49
2.7. Kredit Mikro Kecil dan Menengah (MKM)	51
3 . Bank Perkreditan Rakyat	54
Boks : Pencegahan Fraud Perbankan dengan Pendekatan Moral Suasion dan Persuasif	58
4 . Perkembangan Bank Syariah	60
5. Asesmen Stabilitas Sistem Keuangan Daerah	62

BAB 4	PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	64
	1. Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah	64
	2. Rencana dan Realisasi Belanja Daerah	68
	3. Penyerapan Dana APBN	
	Boks Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Pemerintah Daerah pada Perbankan Daerah	73
BAB 5	PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN.....	78
	1. Perkembangan Aliran Uang Kartal.....	78
	2. Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB)	79
	3. Penemuan Uang Palsu	79
	4. Perkembangan RTGS dan Kliring Lokal.....	80
	5. Penukaran Uang Pecahan Kecil	82
BAB 6	PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH	79
	1. KETENAGAKERJAAN DAN UPAH.....	79
	2. KESEJAHTERAAN.....	80
	2.1. Kesejahteraan Petani.....	81
	2.2. Indeks Pembangunan Manusia.....	82
	2.3. Kemiskinan	83
BAB 7	PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	99
	1. Prospek Ekonomi Daerah	99
	2. Prospek Inflasi Daerah.....	102
	3. Prospek Perbankan	102
	LAMPIRAN	104
	DAFTAR ISTILAH	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkiraan Perkembangan PDRB Sisi Permintaan Provinsi Lampung.....	2
Tabel 1.2	Perkembangan Ekspor Komoditas Non Migas Provinsi Lampung Menurut Klasifikasi <i>Harmonized System</i>	10
Tabel 1.3	Perkembangan Ekspor Komoditas Non Migas Provinsi Lampung Menurut Negara Tujuan.....	13
Tabel 1.4	Impor Lampung Berdasarkan <i>Harmonized System</i>	16
Tabel 1.5	Pertumbuhan PDRB Lampung (% ,yoy).....	17
Tabel 1.6	Pertumbuhan PDRB Lampung (% ,qtq)	18
Tabel 1.7	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi (Sawah + Ladang) dan Jagung Provinsi Lampung Tahun 2007 – 2009	21
Tabel 3.1	Aset Perbankan.....	41
Tabel 3.2	Perkembangan DPK Perbankan	41
Tabel 3.3	Perkembangan Kredit Perbankan.....	42
Tabel 3.4	Jumlah Kantor dan ATM Bank Umum di Provinsi Lampung per September 2009	44
Tabel 3.5	Indikator Bank Umum	45
Tabel 3.6	DPK Bank Umum	46
Tabel 3.7	Kredit Bank Umum	48
Tabel 3.8	Asset dan DPK BPR	55
Tabel 3.9	Indikator Perbankan Syariah	61
Tabel 4.1	Pendapatan Provinsi Lampung setelah APBD-P TA. 2009	66
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung s.d Triwulan III -2009.....	67
Tabel 4.3	Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung T.A 2009	68
Tabel 4.4	Realisasi Penyerapan Dana APBN Provinsi Lampung Per 30 September 2009 (dalam Triliun Rupiah)	70
Tabel 5.1	Perkembangan Rata-rata Triwulan Transaksi Kliring di Provinsi Lampung	83
Tabel 5.2	Perkembangan Penukaran Uang Kecil Triwulan III-2009	84
Tabel 6.1	Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung (ribuan)	86
Tabel 6.2	Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama	87
Tabel 6.3	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan	88
Tabel 6.4	Nilai Tukar Petani Provinsi dan Persentase Perubahannya Agustus 2009 (2007=100)	92
Tabel 6.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung	94
Tabel 6.6	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2007-Maret 2009	97

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Provinsi Lampung.....	1
Grafik 1.2	Perkembangan Konsumsi Swasta.....	3
Grafik 1.3	Inflasi Lampung (mtm)	3
Grafik 1.4	Perkembangan Kredit Konsumsi Perbankan	4
Grafik 1.5	Jumlah Pelanggan dan Konsumsi Listrik Sektor Rumah Tangga	4
Grafik 1.6	Volume Penjualan BBM Sektor Rumah Tangga (2009)	5
Grafik 1.7	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (2009)	5
Grafik 1.8	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	6
Grafik 1.9	Perkembangan Konsumsi Pemerintah	6
Grafik 1.10	Pertumbuhan PMTDB	7
Grafik 1.11	Penjualan Semen Lampung (2009)	8
Grafik 1.12	Perkembangan Impor Bahan Baku Penolong (US\$).....	8
Grafik 1.13	Perkembangan Kredit Investasi Perbankan	8
Grafik 1.14	Pertumbuhan Nilai Ekspor Lampung.....	9
Grafik 1.15	Perkembangan Harga Cokelat (2009)	10
Grafik 1.16	Perkembangan Harga Kopi Robusta	11
Grafik 1.17	Perkembangan Ekspor Kopi, Teh, dan Rempah-Rempah.....	11
Grafik 1.18	Perkembangan Ekspor CPO Lampung	11
Grafik 1.19	Volume Arus Muat Barang di Bandara Radin Inten II (kg)	12
Grafik 1.20	Pangsa Tujuan Ekspor Lampung Triwulan II-2009	12
Grafik 1.21	Pangsa Tujuan Ekspor Lampung Triwulan III-2009	12
Grafik 1.22	Perkembangan Impor Lampung (US\$)	14
Grafik 1.23	Impor Triwulan III-2009 berdasarkan BEC	15
Grafik 1.24	Impor Triwulan III-2009 berdasarkan ISIC	15
Grafik 1.25	Pangsa PDRB Sektoral	19
Grafik 1.26	Perkembangan PDRB Sektor Pertanian (Berdasarkan Harga Konstan 2000)	19
Grafik 1.27	Baki Debet KUR Sektor Pertanian	22
Grafik 1.28	Kredit Sektor Pertanian	22
Grafik 1.29	Perkembangan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	22
Grafik 1.30	<i>Outstanding</i> Kredit Sektor Pertambangan	22
Grafik 1.31	PDRB Sektor Industri Pengolahan (Berdasarkan Harga Konstan 2000) ..	23

Grafik 1.32	Rata-Rata Ekspor Bulanan Ekspor Komoditas Industri Pengolahan Makanan/Minuman	24
Grafik 1.33	Rata-Rata Bulanan Impor Komoditas Penunjang Industri Pengolahan ...	24
Grafik 1.34	Konsumsi Listrik Sektor Industri	24
Grafik 1.35	Perkembangan KUR Sektor Industri	25
Grafik 1.36	Kredit Sektor Industri Pengolahan	25
Grafik 1.37	PDRB Sektor Bangunan (Berdasarkan Harga Konstan 2000)	29
Grafik 1.38	Kredit Sektor Konstruksi	29
Grafik 1.39	PDRB Sektor PHR	30
Grafik 1.40	PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi (Harga Konstan 2000)	30
Grafik 1.41	Perkembangan Kredit Sektor Angkutan	31
Grafik 1.42	Perkembangan PDRB Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	32
Grafik 1.43	Perkembangan Sektor Jasa-Jasa	32
Grafik 2.1	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Bandar Lampung vs Nasional	33
Grafik 2.2	Perkembangan Inflasi Kota Bandar Lampung.....	34
Grafik 2.3	Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq).....	35
Grafik 2.4	Indeks Harga Komoditas Penyumbang Inflasi Utama Kelompok Bahan Makanan	35
Grafik 2.5	Perkembangan Inflasi Bulanan.....	36
Grafik 2.6	Inflasi Kelompok Bahan Makanan (mtm)	37
Grafik 2.7	Inflasi Tahunan (yoy) Kota Bandar Lampung Berdasarkan Kelompok	38
Grafik 2.8	Perkembangan Inflasi Tahunan Bandar Lampung vs Nasional (yoy)	39
Grafik 3.1	NPL Perbankan.....	42
Grafik 3.2	LDR Perbankan di Lampung	43
Grafik 3.3	LDR Perbankan di Lampung Menurut Wilayah	46
Grafik 3.4	Perkembangan NPL Bank Umum	48
Grafik 3.5	Perkembangan NPL Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.....	49
Grafik 3.6	Perkembangan LDR dan Realisasi Kredit Baru	50
Grafik 3.7	Pertumbuhan Kredit Mikro, Kecil, dan Menengah.....	51
Grafik 3.8	Baki Debet KUR.....	52
Grafik 3.9	Plafon KUR	53
Grafik 3.10	Perkembangan Kredit BPR (dalam Miliar Rp)	56

Grafik 3.11	Perkembangan LDR BPR.....	57
Grafik 3.12	Perkembangan FDR Perbankan Syariah.....	62
Grafik 4.1	Komposisi Pendapatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 (APBD-P)	65
Grafik 4.2	Perkembangan Penempatan Dana Pemda pada Perbankan di Lampung Tahun 2009	70
Grafik 5.1	Perkembangan Aliran Uang Kartal (miliar Rp).....	79
Grafik 5.2	Perkembangan PTTB dan Inflow di KBI Bandar Lampung	80
Grafik 5.3	Komposisi Penemuan Uang Palsu Triwulan III-2009.....	81
Grafik 5.4	Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai Triwulan III-2009.....	82
Grafik 6.1	Perkembangan Upah Riil Lampung.....	89
Grafik 6.2	Nilai Tukar Petani.....	90
Grafik 6.3	Perkembangan Harga Karet Dunia	91
Grafik 6.4	Perkembangan Harga Kopi Robusta	91
Grafik 6.5	Perkembangan Harga Lada Hitam Dunia	91
Grafik 6.6	Perkembangan NTP Per Sub Sektor	91
Grafik 6.7	IPM Provinsi Lampung 2002-2007	94
Grafik 6.8	IPM Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota. 2007	95
Grafik 6.9	Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Lampung	96
Grafik 7.1	Ekspektasi Perkembangan Usaha – SKDU BI.....	100
Grafik 7.2	Indeks Keyakinan dan Indeks Ekspektasi Konsumen.....	100

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku Kajian Ekonomi Regional Provinsi Lampung Triwulan III-2009 akhirnya dapat diselesaikan. Sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diamandemen dengan UU No.3 tahun 2004 bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan yang difokuskan pada mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia secara cermat mengamati dan memberikan *assesment* terhadap perkembangan ekonomi terutama yang terkait dengan sumber-sumber tekanan inflasi.

Seiring dengan penerapan otonomi daerah pada tahun 2001, posisi ekonomi regional semakin memiliki peranan yang vital dalam konteks pembangunan ekonomi nasional dan upaya untuk menstabilkan harga. Perkembangan ini merupakan sesuatu yang diharapkan banyak pihak bahwa aktivitas ekonomi tidak lagi terpusat pada suatu daerah tertentu, melainkan tersebar di berbagai daerah sehingga disparitas antar daerah semakin tipis. Terkait dengan hal tersebut di atas, Bank Indonesia Bandar Lampung melakukan pengamatan serta memberikan *assesment* terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan regional Lampung secara menyeluruh dan dituangkan dalam publikasi "Kajian Ekonomi Regional Provinsi Lampung". Diskusi dan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi daerah Lampung dilakukan dengan berbagai pihak terutama para pembina sektor dari dinas-dinas Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, serta akademisi dari Universitas Lampung.

Pada triwulan III-2009 ini perekonomian Lampung menunjukkan percepatan. Sektor pertanian, sektor PHR dan sektor pengangkutan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ditopang oleh adanya peningkatan pada konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, dan investasi, dimana sumbangan terbesar diberikan oleh sektor konsumsi swasta. Sementara itu, inflasi yang terjadi pada triwulan ini mengalami tekanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu. Sepanjang triwulan III-2009, inflasi melonjak tajam akibat tekanan dari sisi *supply* dan *demand* serta ekspektasi terhadap kenaikan harga saat bulan Ramadhan dan memasuki hari raya Idul Fitri.

Perbankan di Provinsi Lampung masih mencatat peningkatan kinerja pada periode ini. Indikator berupa asset, DPK, kredit, NPL, maupun perolehan laba menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih baik.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Universitas Lampung, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Kami menyadari bahwa cakupan serta kualitas data dan informasi yang disajikan dalam buku ini masih perlu untuk terus disempurnakan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang berkepentingan dengan buku ini, serta mengharapkan kiranya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak selama ini dapat terus ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi langkah kita dalam bekerja.

Bandar Lampung, November 2009
BANK INDONESIA BANDAR LAMPUNG

Mokhammad Dakhlan
Pemimpin

TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI LAMPUNG

INDIKATOR MAKRO	2007			2008				2009		
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Indeks Harga Konsumen	150.02	155.12	158.57	106,82*	111.88*	117.42*	118,29*	119.38*	117.84*	123.55*
Laju Inflasi (y-o-y)	3.87	6.67	6.58	9.30	13.69*	15.84	14.82	11.76	5.33	5.22
PDRB - harga konstan (miliar Rp)										
Pertanian	3,669.36	3,537.37	3,082.32	3,711.88	3,877.93	3,636.99	3,100.77	3,800.39	4,059.01	3,900.19
Pertambangan & Penggalian	205.90	205.88	207.71	205.17	203.49	201.89	202.30	188.53	173.75	187.84
Industri Pengolahan	1,043.22	1,168.95	1,107.99	1,084.90	1,110.37	1,223.96	1,155.59	1,166.67	1,195.53	1,265.57
Listrik, Gas & Air Bersih	29.71	30.85	29.86	29.37	30.03	30.87	30.66	28.93	30.43	31.70
Bangunan	408.96	417.15	404.37	406.40	415.70	431.87	431.45	423.75	433.64	452.22
Perdagangan, Hotel & Restoran	1,244.10	1,279.93	1,274.85	1,336.19	1,321.42	1,384.75	1,380.54	1,400.36	1,442.39	1,504.51
Pengangkutan & Komunikasi	504.61	516.11	511.73	513.54	537.59	564.17	563.60	584.64	603.97	620.82
Keuangan, sewa & Jasa Pershn	574.48	615.21	625.62	642.94	664.43	746.79	637.62	666.66	705.72	744.91
Jasa-jasa	617.54	629.12	653.72	596.37	648.62	667.11	687.36	630.74	690.30	718.33
LPE (y-o-y)*	7.01	6.50	6.12	5.29	6.17	5.81	3.69	3.73	5.96	6.05
Nilai Ekspor (juta US\$)	306.63	398.52	422.95	580.78	770.99	728.69	578.98	436.75	540.76	244.62**
Volume Ekspor (ribu ton)	961.21	1,331.61	1,334.20	1,243.23	1,678.03	1,675.31	1,470.42	1,084.69	1,330.52	1177.56**
Nilai Impor (juta US\$)	100.16	133.11	130.28	106.27	240.80	188.28	189.83	124.67	109.96	90.65**
Volume Impor (ribu ton)	265.67	194.42	213.14	182.93	296.26	242.14	166.48	104.31	115.70	102.3**

*) IHK tahun dasar 2007 (2007=100)

***) s.d Agustus 2009

INDIKATOR PERBANKAN	2007		2008				2009		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3
BANK UMUM									
Asset	14,847.1	15,592.0	15,564.9	16,891.5	17,953.7	18,615.30	18,237.17	19,465.9	20,738.8
DPK	10,248.2	10,666.5	10,424.7	11,435.5	11,612.2	12,723.9	12,947.0	13,786.3	13,977.1
Giro	2,399.5	2,447.5	2,400.4	2,782.4	2,371.7	2,471.0	2,852.4	3,040.9	2,867.2
Tabungan	4,711.0	5,683.5	5,304.2	5,858.6	6,067.1	6,674.1	6,060.4	6,497.1	6,801.6
Deposito	3,137.7	2,535.5	2,720.1	2,794.5	3,173.4	3,578.9	4,034.3	4,248.3	4,308.3
Kredit Penggunaan	10,018.3	10,740.3	11,070.2	12,507.1	13,317.8	13,558.8	13,719.6	15,123.0	15,604.3
Modal	5,203.8	5,709.9	5,869.8	6,845.5	7,373.9	7,407.4	6,953.0	7,890.5	8,066.1
Investasi	1,513.9	1,659.9	1,713.2	1,795.1	1,833.7	2,003.0	2,387.6	2,511.4	2,636.2
Konsumsi	3,300.6	3,370.5	3,487.3	3,866.5	4,110.2	4,148.4	4,379.1	4,721.1	4,902.0
LDR (%)	97.8	100.7	106.2	109.4	114.7	106.6	106.0	109.7	111.6
Kredit UMKM	6,910.6	7,233.8	7,665.8	8,591.6	9,099.6	9,248.6	10,018.3	10,838.7	11,266.53
NPL Gross (%)	2.8	2.1	2.6	3.0	2.6	2.6	5.4	5.4	3.6
NPL Nominal	276.0	227.2	283.7	376.8	349.8	351.2	742.7	810.4	562.36
L/R Tahun Berjalan	382.8	558.9	165.8	343.9	485.5	554.1	(104.0)	107.7	617.60
BPR									
Asset	3,429.8	3,459.3	3,671.7	3,975.2	4,195.1	3,615.0	2,712.0	2,683.9	2,887.4
Kredit	2,851.6	2,746.1	2,917.0	3,434.3	3,555.6	3,431.6	2,402.7	2,246.7	2,366.6
Modal Kerja	1,259.8	1,160.1	1,278.8	1,537.6	1,583.5	1,501.6	945.9	865.6	853.2
Investasi	345.5	354.7	288.6	441.0	409.5	429.7	42.6	43.3	42.7
Konsumsi	1,246.2	1,231.3	1,349.6	1,455.7	1,562.7	1,500.3	1,414.3	1,337.8	1,470.7
Kredit	2,851.6	2,746.1	2,917.0	3,434.3	3,555.6	3,431.6	2,402.7	2,246.7	2,366.6
Pertanian	89.2	95.5	141.0	148.6	151.9	153.1	105.7	102.3	112.1
Perindustrian	11.1	15.8	15.2	11.7	11.2	10.5	6.6	5.2	5.6
Perdagangan	1,229.8	1,112.1	1,112.5	1,463.0	1,417.4	1,357.1	589.6	546.5	529.5
Jasa-jasa	149.5	156.9	153.4	185.0	206.6	185.0	89.5	83.8	79.9
Lain-lain	1,371.9	1,365.8	1,494.9	1,626.1	1,768.5	1,725.8	1,611.3	1,508.8	1,639.4
Dana Pihak Ketiga	2,234.4	2,244.6	2,387.4	2,496.3	2,483.6	2,166.8	1,530.8	1,560.0	1,796.9
Tabungan	519.7	485.8	495.2	591.6	599.2	526.7	308.0	307.3	329.3
Simpanan Berjangka	1,714.6	1,758.8	1,892.2	1,904.7	1,884.4	1,640.1	1,222.8	1,252.7	1,467.6
LDR (%)	127.6	122.3	122.19	137.58	143.17	158.37	156.96	144.02	131.70
NPL Nominal	59.5	56.8	67.2	74.2	81.3	919.0	137.2	103.9	87.8
NPL gross(%)	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	26.8	5.7	4.6	3.7
L/R Tahun Berjalan	107.71	138.03	44.50	90.15	146.49	80.65	38.51	78.84	125.23

RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI LAMPUNG
Triwulan III / 2009

Perkembangan Ekonomi

Kinerja perekonomian Lampung mengalami akselerasi...

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pasca krisis keuangan global cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan laporan diperkirakan mencapai 6,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II-2009 sebesar 5,96% (yoy) maupun triwulan I-2009 sebesar 4,27% (yoy). Berdasarkan sektor produksi, sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan, yakni mencapai 2,96%. Sektor selanjutnya yang juga dominan pada triwulan III-2009 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,35%) dan sektor pengangkutan & komunikasi (0,64%).

Komponen PDRB dari sisi permintaan mengalami pertumbuhan...

Berdasarkan sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 6,05% didorong oleh adanya peningkatan pada konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, serta investasi. Konsumsi swasta tumbuh sebesar 5,62%(yoy) akibat tingginya kebutuhan masyarakat pada triwulan laporan. Sementara itu, konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,52% (yoy) terkait dengan dimulainya realisasi belanja Pemerintah Daerah untuk proyek-proyek pembangunan. Sedangkan kegiatan investasi mengalami peningkatan sebesar 5,66% (yoy) seiring dengan makin kondusifnya perekonomian dalam mengatasi krisis keuangan global.

Inflasi

Inflasi pada periode ini mengalami peningkatan akibat faktor supply shocks...

Tekanan harga di Provinsi Lampung pada triwulan III-2009 meningkat. Inflasi triwulanan mencapai 4,85% (qtq), jauh melesat dibanding inflasi triwulan akhir triwulan II-2009 yang mengalami deflasi sebesar 1,29% (qtq). Sementara itu, inflasi tahunan tercatat sebesar 5,22% (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang nilainya 4,86% (yoy), namun lebih rendah dibanding inflasi triwulan lalu yang sebesar 5,33% (yoy).

Selama triwulan III-2009, inflasi bulanan cenderung meningkat dari Juli hingga September 2009. Pada bulan Juli, inflasi lebih disebabkan oleh *supply* shock pada bahan makanan. Inflasi bulan Agustus 2009 lebih didominasi oleh kenaikan biaya pendidikan SLTA serta kenaikan harga pada minyak tanah akibat pasokan mitan bersubsidi yang makin dikurangi Pemerintah. Inflasi pada makanan jadi yang dikonsumsi selama puasa ramadhan juga memberikan andil yang cukup besar pada inflasi Agustus tersebut. Sedangkan inflasi pada bulan September sangat didominasi oleh kelompok bahan makanan dengan kenaikan harga sebesar 7,22% (qtq). Kemarau yang sedang terjadi membatasi ketersediaan produk pertanian dan perikanan.

Perbankan Daerah

Kinerja perbankan di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan

Indikator kinerja perbankan menunjukkan peningkatan, baik secara triwulanan maupun tahunan. Seiring dengan pertumbuhan yang terjadi pada nilai Aset, DPK, dan Penyaluran Kredit, kualitas kredit yang terindikasi melalui NPL juga semakin membaik. Aset perbankan meningkat sebesar 6,67%(qtq) dan 6,67%(yoy), DPK tumbuh 2,79% (qtq) dan 11,91% (yoy), sedangkan kredit mencatat pertumbuhan 3,46% (qtq) dan 6,50% (yoy). Kualitas kredit yang terindikasi melalui NPL juga menunjukkan perbaikan. NPL perbankan triwulan III-2009 mencapai 3,62% atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan lalu yang mencapai 5,26%. Sementara itu, kegiatan intermediasi perbankan yang diindikasikan oleh LDR mengalami kenaikan dari sebelumnya 113,18% menjadi 113,93% pada triwulan ini.

Keuangan Daerah

Penerimaan daerah pada APBD-P mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan oleh peningkatan penerimaan dari pos retribusi daerah dan adanya dana alokasi desentralisasi fiskal...

Dengan melihat perubahan situasi dinamis, antara lain krisis ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian makro baik nasional maupun regional, maka dilakukan perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2009 yang disahkan melalui Perda No.9/2009 Tanggal 5 Oktober 2009. APBD TA 2009 yang semula diprediksi Rp1,7 triliun mengalami perubahan menjadi Rp1,89 triliun atau bertambah sebesar Rp190,032 miliar. Dengan demikian, defisit anggaran yang sebelumnya ter-cover oleh SILPA sebesar Rp50 miliar, kini diprediksi ter-cover oleh SILPA yang mencapai Rp192,34 miliar. Sementara itu, akibat adanya realisasi pendapatan yang melebihi target, maka

total penerimaan daerah setelah perubahan mencapai Rp1,697 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp47,69 miliar dari sebelumnya Rp1,650 triliun.

Realisasi penerimaan daerah per September 2009 telah mencapai 77,91% dari target penerimaan pada APBD-P. Sedangkan realisasi belanja daerah per September 2009 berdasarkan data sementara (SP2D) telah mencapai 60,61% dari target belanja dalam APBD-P 2009.

Sistem Pembayaran

Membaiknya perkembangan ekonomi regional Provinsi Lampung pada triwulan III-2009 salah satunya terindikasi melalui peningkatan transaksi keuangan baik secara tunai maupun non tunai. Aliran uang kartal di Kantor Bank Indonesia Bandar Lampung secara rata-rata bulanan pada triwulan III-2009 tercatat mengalami net-outflow sebesar Rp21,412 miliar.

Aliran uang kartal yang mengalami net outflow serta kliring yang meningkat menunjukkan bahwa terjadi peningkatan transaksi keuangan pada triwulan laporan

Uang yang di PTTB pada triwulan ini pun mengalami peningkatan. Rata-rata bulanan uang yang diracik pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp173,69 miliar atau mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya (Rp26,99 miliar). Sementara itu, rasio uang palsu terhadap aliran uang masuk pada triwulan III-2009 mengalami penurunan dibandingkan triwulan II-2009. Hal ini mengindikasikan bahwa temuan dan pelaporan uang palsu yang terjadi menjelang Idul Fitri masih lebih rendah dibanding ketika Pemilu triwulan II-2009.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat di Lampung pada periode ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini

Indikator kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan...

terlihat melalui penurunan tingkat pengangguran dan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) serta Upah Riil. Tingkat pengangguran pada Tahun 2009 mencapai 6,18% atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2008 (7,20%). Sedangkan NTP pada triwulan ini mencapai 108,81 atau tumbuh sebesar 0,90% (qtq) dan 0,70% (yoy). Sementara itu, melalui perhitungan terhadap upah riil dapat dinyatakan bahwa kenaikan UMP yang ditetapkan pemerintah mampu menjadi penopang bagi daya beli masyarakat. Dengan melihat inflasi dan UMP yang ditetapkan sebesar Rp691.000, upah riil masyarakat pada periode ini mencapai Rp559.287, secara rata-rata tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2008.

Prospek Perekonomian

Perekonomian Provinsi Lampung diprediksi tetap tumbuh positif...

Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan IV-2009 diperkirakan tumbuh positif meskipun lebih lambat dibandingkan triwulan III-2009. Perekonomian Lampung triwulan IV-2009 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,6%-5,2% (yoy). Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) oleh Bank Indonesia Bandar Lampung mengindikasikan bahwa persepsi pengusaha terhadap perkembangan usaha pada triwulan IV-2009 menurun dibandingkan triwulan III-2009, meskipun masih dalam level positif. Sementara itu, hasil Survei Konsumen KBI Bandar Lampung juga mengindikasikan adanya optimisme dari konsumen pada triwulan mendatang, meskipun terjadi penurunan indeks.

Dari sisi permintaan, laju pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi masyarakat. Banyaknya hajatan masyarakat, serta perayaan hari besar keagamaan diakhir triwulan akan kembali mendorong konsumsi masyarakat.

Sementara itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah diperkirakan juga terjadi seiring dengan masa puncak realisasi belanja APBD. Selain itu, stabilnya kondisi perekonomian makro pasca krisis keuangan global serta membaiknya permintaan agregat juga diperkirakan akan mendorong percepatan realisasi investasi swasta.

Di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan IV-2009 diperkirakan akan didukung oleh sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Sementara sektor pertanian yang merupakan sektor utama dalam struktur perekonomian Lampung diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang terbatas terkait mulai berakhirnya masa panen beberapa produk perkebunan dan tanaman bahan makanan.

Berdasarkan analisis dan asesmen dari data yang tersedia, Inflasi triwulanan Lampung pada triwulan IV-2009 diperkirakan mencapai kisaran 1,0%-1,5%(qtq), sedangkan inflasi tahun 2009 diperkirakan pada kisaran 5,6%-6,1%(yoy).

*Tekanan inflasi
diperkirakan mengalami
penurunan...*

Tekanan harga umum di Provinsi Lampung diperkirakan melemah pada triwulan IV-2009. Hal ini diakibatkan oleh karena faktor ekspektasi dan interaksi permintaan-penawaran yang tidak setinggi triwulan lalu. Kecenderungan inflasi yang berada dalam tren menurun setelah masa perayaan hari Idul Fitri membentuk ekspektasi bahwa inflasi di masa yang akan datang akan lebih rendah dari dibandingkan periode yang lalu.

Meskipun demikian perlu diwaspadai tekanan harga yang berasal dari bahan makanan karena berkurangnya stok beras pada musim tanam.

Pertumbuhan intermediasi perbankan di Provinsi Lampung diperkirakan akan lebih cepat dibandingkan triwulan laporan....

Pada triwulan IV-2009, pertumbuhan intermediasi perbankan di Provinsi Lampung diperkirakan lebih cepat dibandingkan triwulan laporan. Suku bunga perbankan yang cenderung mengalami penurunan dan meningkatnya permintaan terhadap kredit diperkirakan mampu mendorong kegiatan intermediasi perbankan. Meskipun demikian, perbankan masih tetap hati-hati dalam melaksanakan ekspansi kredit yang disalurkan seiring dengan masih tingginya risiko likuiditas dan risiko kredit yang dihadapi.

BAB I – KONDISI MAKRO EKONOMI REGIONAL

1. KONDISI UMUM

Pada triwulan III-2009, kinerja perekonomian Provinsi Lampung pasca krisis keuangan global cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan laporan diperkirakan mencapai 6,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II-2009 sebesar 5,96% (yoy) maupun triwulan I-2009 sebesar 4,27% (yoy).

Dari sisi permintaan, konsumsi swasta masih menjadi komponen dominan dalam pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung. Sumbangan komponen ini mencapai 3,1% terhadap pertumbuhan triwulan laporan. Persiapan tahun ajaran siswa baru serta perayaan Hari Raya Idul Fitri membuat konsumsi masyarakat meningkat cukup signifikan. Sementara kinerja ekspor menunjukkan tren positif meskipun belum sebesar periode yang sama tahun 2008.



Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

*) Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan harga konstan 2000

Dari sisi penawaran, sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan, yakni mencapai 2,96%. Sektor selanjutnya yang juga dominan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,35%) serta sektor pengangkutan dan komunikasi (0,64%).

2. PERKEMBANGAN PDRB SISI PERMINTAAN

Pada triwulan III-2009, pertumbuhan ekonomi tahunan Provinsi Lampung sebesar 6,05% didorong oleh adanya peningkatan konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, serta investasi. Tingginya kebutuhan masyarakat mendorong konsumsi swasta tumbuh sebesar 5,62% (yoy). Sementara, konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan positif terkait dengan dimulainya realisasi belanja Pemerintah daerah untuk proyek-proyek pembangunan. Kegiatan investasi mengalami peningkatan seiring dengan makin kondusifnya perekonomian dalam mengatasi krisis keuangan global. Sedangkan, kegiatan ekspor menunjukkan perbaikan meskipun belum sebesar tahun 2008.

Tabel 1.1
Perkiraan Perkembangan PDRB Sisi Permintaan Provinsi Lampung

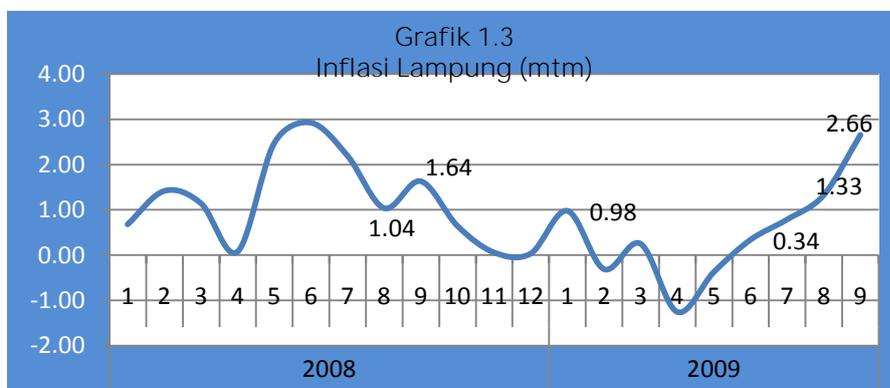
Penggunaan	PDRB (yoy)							Kontribusi
	I-08	II-08	III-08	IV-08	I-09	II-09	III-09	
Konsumsi Swasta	1.22	-0.25	2.47	2.67	11.57	10.24	5.62	3.10
Konsumsi Pemerintah	16.68	-0.24	10.86	-15.09	4.83	3.66	5.52	0.75
Investasi	150.80	14.06	3.53	-9.22	0.27	4.50	5.66	0.88
Ekspor netto	150.80	202.70	73.40	-42.80	-27.89	17.92	-14.10	
PDRB	5.29	6.17	5.81	3.69	4.27	5.96	6.05	6.05

Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

2.1. Konsumsi Swasta

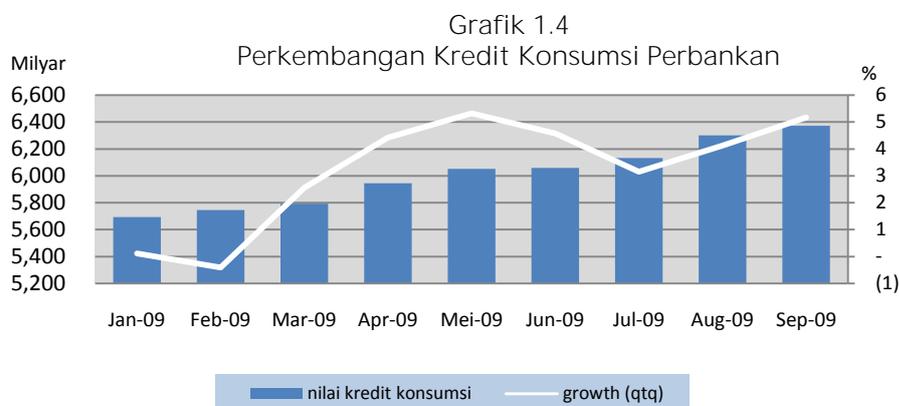
Pertumbuhan tahunan konsumsi swasta tercatat sebesar 5,62% (yoy), atau secara triwulanan meningkat 6,03% (qtq). Pertumbuhan konsumsi swasta didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat dalam menghadapi perayaan hari besar keagamaan dan tahun ajaran siswa baru. Meningkatnya permintaan musiman tersebut juga didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat dengan sumber dana yang diperoleh dari Tunjangan Hari Raya, kenaikan harga jual beberapa komoditas ekspor (kopi, CPO), maupun kredit pada perbankan dan non perbankan (pegadaian).

Di sisi lain, pertumbuhan tahunan konsumsi swasta pada triwulan laporan lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya. Perlambatan ini terjadi pada konsumsi rumah tangga serta konsumsi lembaga swasta nirlaba, dimana masing-masing hanya tumbuh sebesar 5,4% (yoy) dan 15,49% (yoy) dari 10,09% (yoy) dan 17,12% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perlambatan ini disinyalir akibat adanya kenaikan tekanan inflasi serta kondisi sebagian lahan pertanian yang masih berada pada masa tanam.



Pertumbuhan konsumsi swasta periode ini dikonfirmasi oleh beberapa indikator seperti kredit konsumsi, dan konsumsi listrik sektor rumah tangga. Baki debit kredit konsumsi perbankan pada akhir triwulan III-2009 tercatat mencapai Rp 6,37 triliun, meningkat 5,18% dari posisi akhir triwulan II-2009 sebesar Rp 6,06 triliun, dan juga meningkat 12,34% dibandingkan posisi triwulan yang sama tahun 2008. Sementara rata-rata bulanan penggunaan listrik rumah tangga di Provinsi Lampung pada triwulan

III-2009 ini tercatat sebesar Rp52,71 miliar, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang nilainya Rp43,13 miliar.

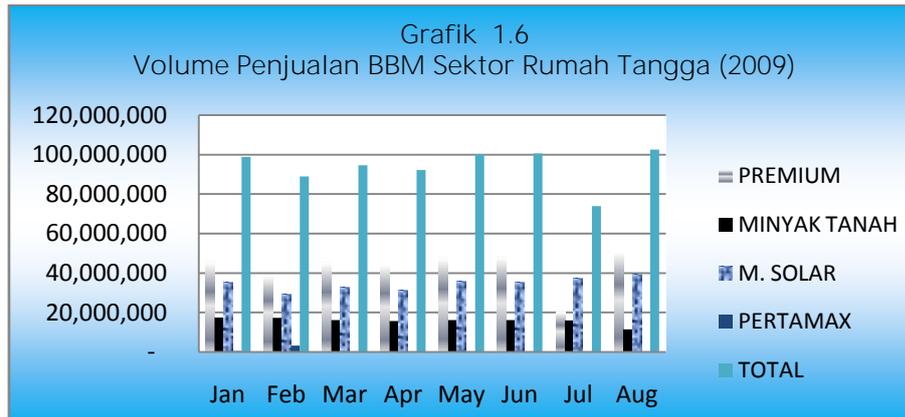


Sumber : LBU dan LBUS (diolah)



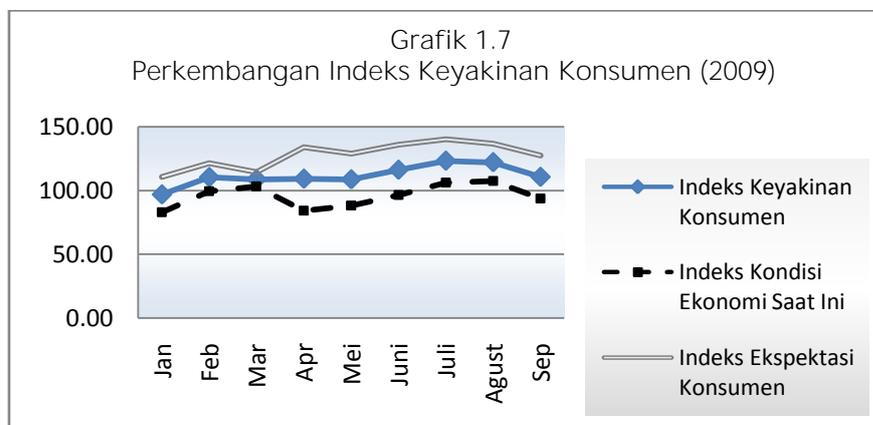
Sumber : PT. PLN Lampung (diolah)

Meskipun demikian, indikator konsumsi BBM sektor rumah tangga hingga bulan Agustus 2009, belum terlihat peningkatan. Diperkirakan peningkatan konsumsi BBM terjadi pada bulan September 2009. Selain itu, konversi pemakaian minyak tanah ke LPG juga membuat konsumsi BBM terlihat menurun. Data konsumsi BBM sektor rumah tangga hingga bulan Agustus 2009 menunjukkan penurunan secara rata-rata bulanan, dari 97,64 juta liter pada triwulan II-2009 menjadi 88,23 juta liter pada triwulan laporan. Dari semua jenis bahan bakar tersebut, hanya minyak solar dan pertamax yang menunjukkan kenaikan volume penggunaan oleh sektor rumah tangga. Minyak solar meningkat dari 34,32 juta liter di triwulan II-2009 menjadi 38,25 juta liter di triwulan laporan. Sedangkan pertamax meningkat dari 330,33 juta liter menjadi 330,50 juta liter.



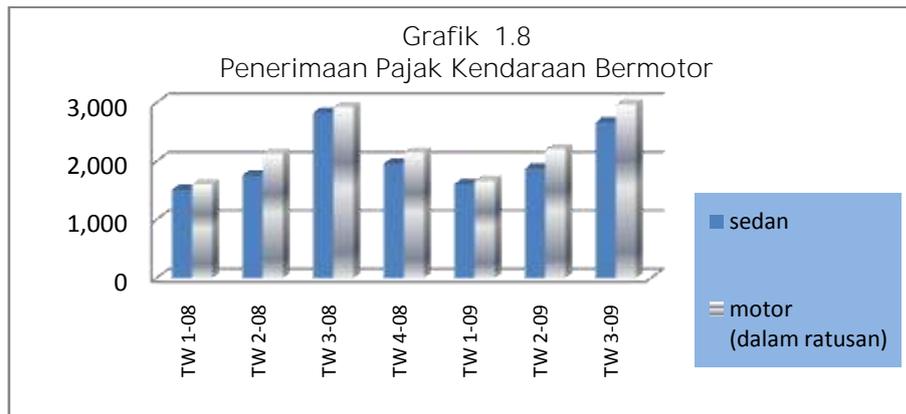
Sumber : PT. Pertamina Depot Panjang (diolah)

Hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia Bandar Lampung juga memperkuat adanya peningkatan konsumsi swasta pada triwulan laporan. Indeks Keyakinan Konsumen pada Survei Konsumen mengalami peningkatan dari 111,42 pada triwulan II-2009 menjadi 118,72 pada triwulan laporan. Kenaikan rata-rata IKK tersebut juga diikuti oleh optimisme berupa kenaikan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini (IKESI). Kenaikan indeks ini memperlihatkan adanya optimisme dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi, sehingga mendorong terjadinya konsumsi.



Sumber : Bank Indonesia Bandar Lampung (diolah)

Bertambahnya jumlah obyek pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung juga merupakan indikator pemulihan konsumsi swasta. Selama triwulan III-2009, pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) tercatat berjumlah 296.501 unit, meningkat dibanding triwulan yang sama pada tahun 2008 sebesar 291.977 unit. Sedangkan pada mobil sedan, terjadi penurunan pembayaran PKB sebanyak 162 unit sehingga nilainya menjadi 2.661 unit.



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (diolah)

2.2 Konsumsi Pemerintah

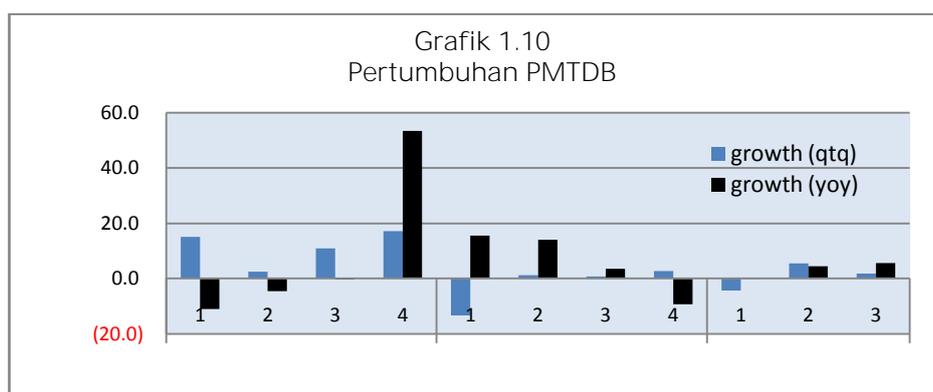
Konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan lebih cepat seiring dengan realisasi belanja pemerintah daerah yang lebih tinggi. Konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDRB terakselerasi dengan besaran 25,31% (qtq), meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan lalu sebesar 19,78% (qtq). Nilai pengeluaran pemerintah yang meningkat dari Rp1,01 triliun pada triwulan II-2009 menjadi Rp1,27 triliun di triwulan laporan menandakan telah semakin digunakannya dana pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya seiring dengan telah signifikannya penerimaan daerah yang masuk di triwulan laporan. Berdasarkan data Biro Keuangan Provinsi Lampung, hingga Triwulan III-2009 pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp1,32 triliun atau 77,91% dari rencana selama tahun 2009 (APBD-P).



Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

2.3. Investasi

Membbaiknya persepsi masyarakat terhadap kinerja perekonomian Lampung membuat perkembangan investasi triwulan III-2009 mengalami percepatan dibanding triwulan lalu. Pada triwulan lalu, pertumbuhan PMTDB tercatat hanya sebesar 4,5% (yoy), sedangkan pada triwulan laporan tercatat sebesar 5,66% (yoy). Jika dilihat besarnya, jumlah PMTDB tercatat sebesar Rp1,47 triliun, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar Rp1,44 triliun.



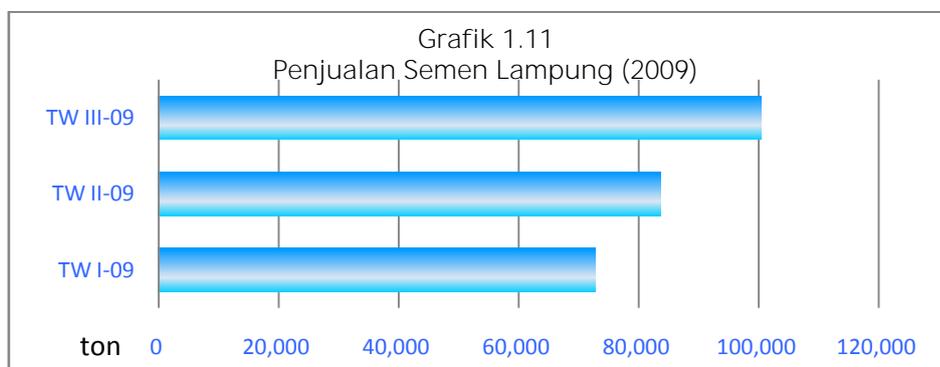
Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan data BPMD Lampung, selama tahun 2009 hingga akhir triwulan III-2009 telah terjadi realisasi investasi dengan total nilai Rp4,9 triliun, jauh melampaui target investasi tahun 2009 sebesar Rp1,5 triliun. Adapun jumlah investor yang masuk berjumlah 12 PMA dan 6 PMDN yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Lampung, dengan jenis investasi mayoritas bergerak di sektor agribisnis pertanian dan perkebunan.

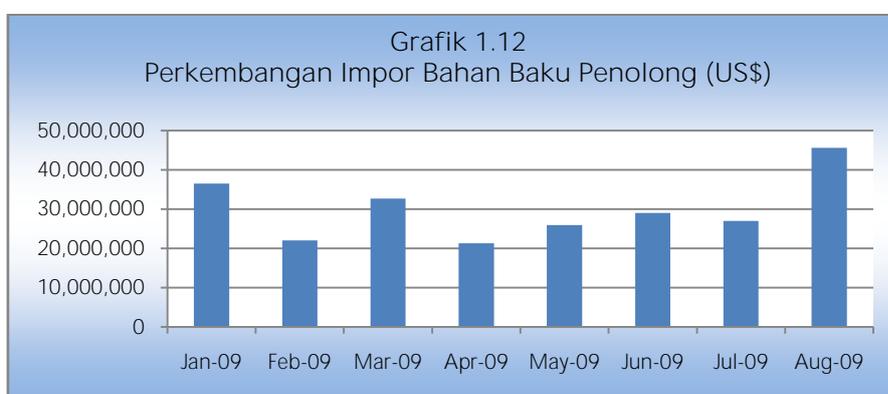
Beberapa indikator yang menunjukkan pertumbuhan investasi diantaranya penjualan semen, kredit investasi Bank Umum, serta impor bahan baku penolong. Berdasarkan data penjualan semen di Provinsi Lampung, terjadi peningkatan rata-rata bulanan pada triwulan laporan dibanding dengan triwulan sebelumnya. Rata-rata bulanan realisasi pengadaan semen tercatat sebesar 100,360 ton atau lebih tinggi dibanding rata-rata bulanan pada triwulan lalu yang nilainya 83,614 ton.

Kredit investasi perbankan di Provinsi Lampung pada posisi akhir triwulan III-2009 mengalami peningkatan. Baki debit kredit investasi perbankan tercatat sebesar Rp 2,68 triliun, meningkat dibandingkan posisi akhir triwulan II-2009 yang tercatat Rp 2,55 triliun. Sementara impor bahan baku penolong terjadi peningkatan rata-rata bulanan yaitu dari US\$25,44 juta pada triwulan lalu menjadi US\$36,27 juta. Hal ini

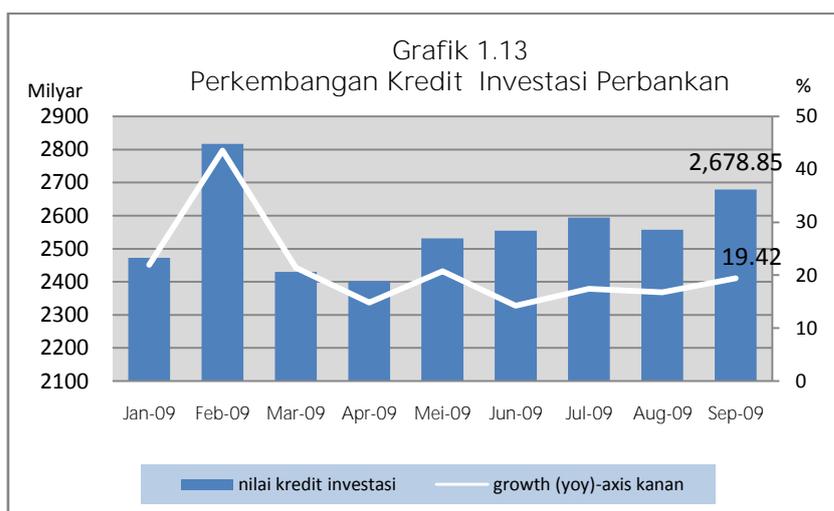
mengindikasikan bahwa aktivitas impor bahan baku penolong meningkat sebagai upaya membangkitkan kembali kegiatan investasi Lampung.



Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)



Sumber : Direktorat Statistik dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (diolah)



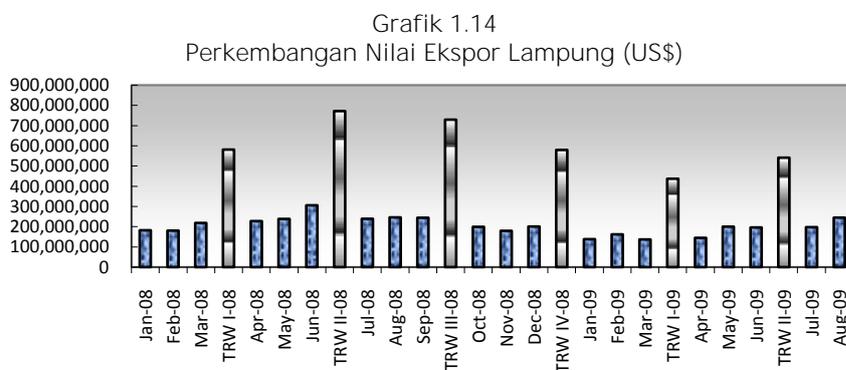
Sumber : LBU dan LBUS (diolah)

Indikator lain yang menunjang perkembangan investasi adalah hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Dalam SKDU triwulan II-2009 tersebut, sebagian besar pelaku usaha di berbagai sektor di Lampung optimis bahwa pada triwulan III-2009 kegiatan usaha akan meningkat dibanding sebelumnya. Hal ini tercermin pada nilai SBT sebesar 29,25%. Adapun sektor yang optimis akan perbaikan kegiatan usaha tersebut terdiri atas sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa.

2.4. Ekspor-Impor

a. Ekspor

Ekspor Lampung mengalami peningkatan dengan volume rata-rata bulanan mencapai US\$221,03 juta. Nilai ini meningkat dibandingkan triwulan II-2009 yang tercatat sebesar US\$180,25 juta. Namun jika dibandingkan triwulan yang sama tahun 2008, volume bulanan ekspor Lampung tersebut mengalami penurunan (pada triwulan III-2008 rata-rata bulanan volume ekspor Lampung sebesar US\$242,9 juta).



Sumber : Direktorat Statistik dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (diolah)

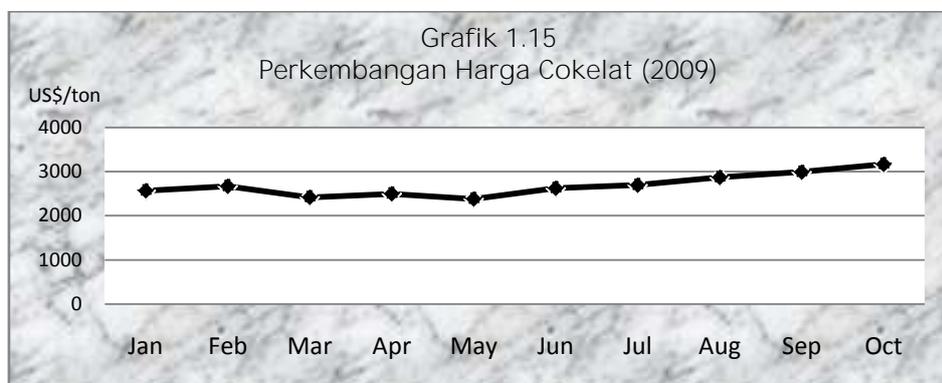
Berdasarkan klasifikasi *Harmonized System* (HS), peningkatan ekspor terjadi di hampir semua jenis komoditas utama. Hanya beberapa komoditas yang mengalami penurunan rata-rata bulanan ekspor, diantaranya adalah coklat, bahan kimia organik, maupun berbagai makanan olahan. Penurunan ekspor coklat terjadi akibat tanaman coklat yang sedang dalam tahap pembungaan, sehingga kenaikan harga coklat dunia yang sedang terjadi tidak sepenuhnya dapat dinikmati petani.

Tabel 1.2
Perkembangan Ekspor Komoditas Non Migas Provinsi Lampung
Menurut Klasifikasi *Harmonized System* (HS)

Komoditas	2008		Triwulan II-2009		Triwulan III-2009*	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%
1. Kopi, Teh, Rempah-rempah	721,190,961	27.12	178,185,570	32.95	145,983,340	33.02
2. Bubur Kayu / Pulp	240,404,380	9.04	28,849,646	5.33	27,824,202	6.29
3. Ikan dan Udang	237,610,513	8.93	21,773,580	4.03	19,213,706	4.35
4. Lemak & Minyak Hewan / Nabati	578,608,785	21.76	123,604,888	22.86	105,963,060	23.97
5. Bahan Bakar Mineral	249,783,436	9.39	45,269,372	8.37	37,792,584	8.55
6. Karet dan Barang dari Karet	78,584,601	2.95	13,225,968	2.45	8,978,866	2.03
7. Kayu, Barang dari Kayu	12,752,852	0.48	2,278,341	0.42	2,515,738	0.57
8. Hasil Penggilingan	11,164,638	0.42	1,170,650	0.22	9,715	0.00
9. Olahan dari Buah-buahan / Sayuran	184,748,666	6.95	34,408,738	6.36	23,957,490	5.42
10. Ampas / Sisa Industri Makanan	37,859,271	1.42	2,342,320	0.43	1,023,679	0.23
11. Berbagai Makanan Olahan	24,188,995	0.91	4,541,512	0.84	2,637,916	0.60
12. Minuman	18,599,185	0.70	2,881,707	0.53	3,595,308	0.81
13. Berbagai Produk Kimia	12,191,533	0.46	2,335,601	0.43	1,354,750	0.31
14. Kaca & Barang dari Kaca	1,854,342	0.07	123,194	0.02	131,394	0.03
15. Olahan dari Tepung	777,437	0.03	109,755	0.02	7,005	0.00
16. Bahan Kimia Organik	17,627,494	0.66	9,238,113	1.71	4,615,324	1.04
17. Gula dan Kembang Gula	18,502,809	0.70	4,191,321	0.78	16,106,981	3.64
18. Kakao / Coklat	87,178,818	3.28	38,588,560	7.14	14,920,936	3.38
19. Buah-buahan	4,866,086	0.18	1,114,837	0.21	867,206	0.20
20. Sari Bahan Samak & Celup	3,500	0.00	0	0.00	0	0.00
21. Lak, Getah dan Damar	3,421,555	0.13	764,938	0.14	499,685	0.11
22. Sayuran	1,025,484	0.04	76,998	0.01	12,000	0.00
23. Sabun dan Preparat Pembersih	2,570,192	0.10	858,899	0.16	398,402	0.09
24. Perekat, Enzim	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25. Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	15,010,033	0.56	3,228,030	0.60	4,090,960	0.93
26. Lain-lain	98,913,860	3.72	21,600,654	3.99	19,565,452	4.43
Total	2,659,439,426	100	540,763,192	100	442,065,697	100

Sumber: Direktorat Statistik Dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (diolah)

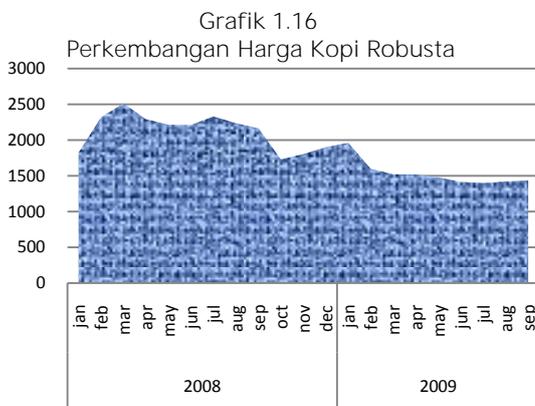
*) Data Juli – Agustus 2009



Sumber : Bappebti (diolah)

Komoditas penyumbang ekspor terbesar pada triwulan III-2009 adalah kopi, teh, dan rempah-rempah, dengan nilai US\$145,98 juta (33%). Diikuti kemudian oleh lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US\$105,96 juta (24%), dan bahan bakar mineral dengan nilai US\$37,79 juta (8,5%). Meningkatnya ekspor kopi, teh, dan rempah-rempah akibat puncak panen kopi yang terjadi di Lampung maupun kota lain yang mengekspor kopi melalui Lampung. Selain itu harga kopi juga mulai naik walau perlahan, yang diimbangi dengan mulai membaiknya permintaan importir. Pada

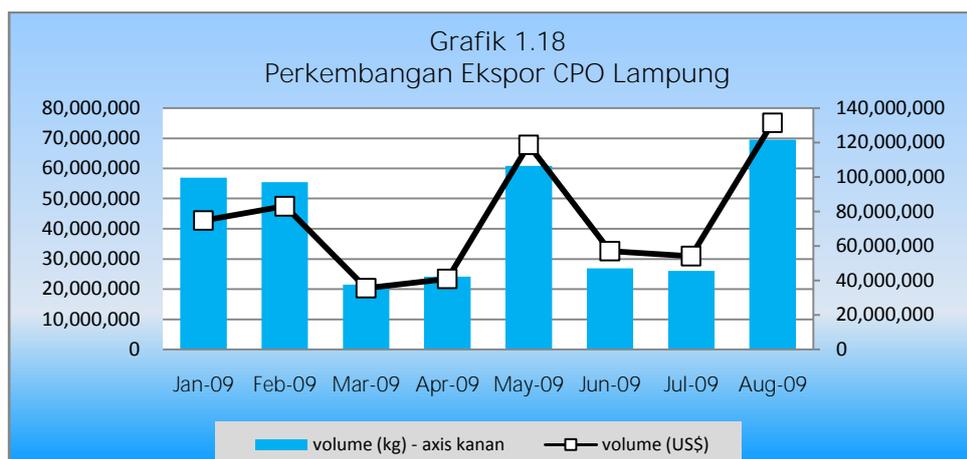
komoditas CPO, peningkatan rata-rata bulanan ekspor CPO sebesar 28,6% (qtq) terjadi akibat signifikannya volume ekspor CPO di bulan Agustus 2009 ditengah situasi peningkatan harga CPO pada bulan itu.



Sumber : Bappebti (diolah)

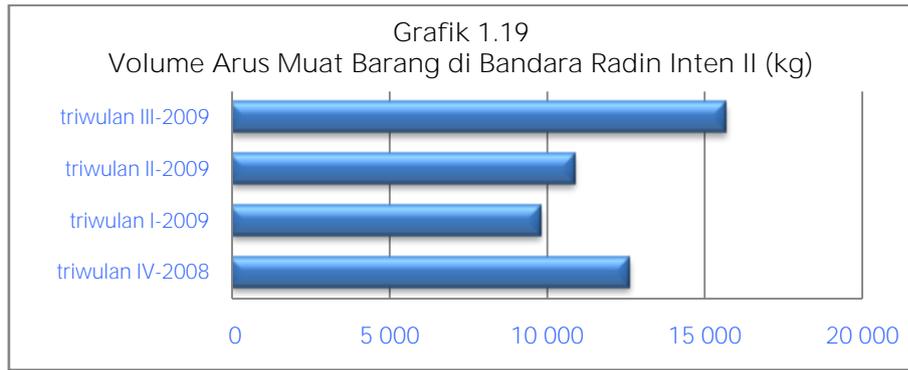


Sumber: DSM Bank Indonesia (diolah)



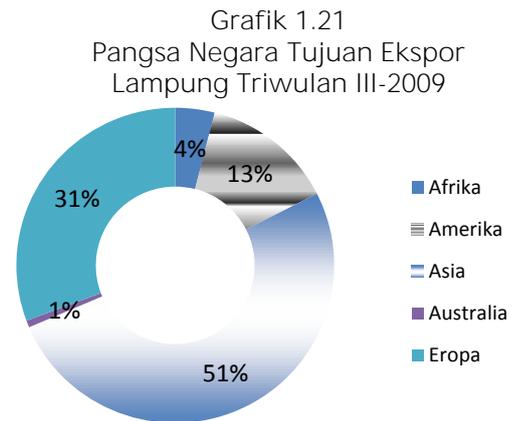
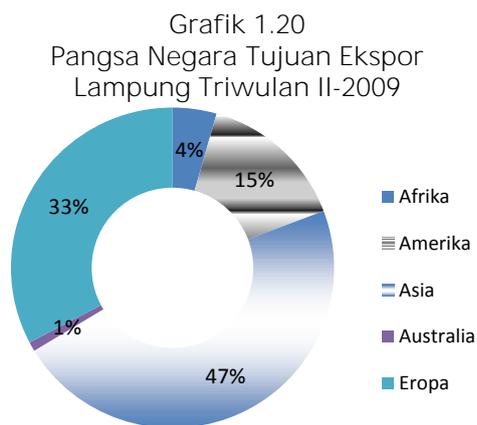
Sumber: Direktorat Statistik Dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (diolah)

Indikator mulai pulihnya ekspor Lampung terkonfirmasi dari volume muat barang di bandara Radin Inten II yang meningkat 44,6% dibanding rata-rata bulanan pada triwulan II-2009. Rata-rata bulanan volume muat barang di bandara itu mencapai 15,689 kg, meningkat dibanding rata-rata bulanan volume muat pada triwulan II-2009 sebesar 10,851 kg.



Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan negara tujuan ekspor, benua Asia tetap memegang pangsa terbesar ekspor Lampung. Dari total ekspor pada triwulan III (Juli-Agustus 2009), nilai ekspor ke benua Asia tercatat sebesar US\$225,79 juta, dengan pangsa 51%. Sasaran ekspor yang besar selanjutnya adalah benua Eropa dengan nilai US\$135,7 juta (pangsa 33%).



Sumber: Direktorat Statistik Dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (diolah)

Tabel 1.3
Perkembangan Ekspor Komoditas Non Migas Provinsi Lampung
Menurut Negara Tujuan

Negara Tujuan	2008		Triwulan II-2009		Triwulan III-2009*	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%
1. Afrika	99,427,572	3.74	23,827,948	4.41	17,695,349	4.00
2. Amerika	418,631,783	15.74	80,212,076	14.83	59,730,844	13.51
- Amerika Serikat	380,927,684	14.32	74,131,322	13.71	53,681,553	12.14
- Kanada	4,831,701	0.18	770,715	0.14	585,226	0.13
- Amerika Latin	7,803,575	0.29	1,069,089	0.20	1,860,295	0.42
- Amerika Lainnya	25,068,823	0.94	4,240,950	0.78	3,603,770	0.82
3. Asia	1,137,991,697	42.79	254,702,609	47.10	225,788,318	51.08
- Malaysia	114,875,358	4.32	42,166,072	7.80	25,005,612	5.66
- Filipina	27,463,484	1.03	10,188,798	1.88	12,112,444	2.74
- Singapura	34,316,334	1.29	6,156,312	1.14	3,316,600	0.75
- Jepang	306,406,141	11.52	43,555,871	8.05	48,302,481	10.93
- Korea Selatan	100,712,348	3.79	7,091,461	1.31	13,155,049	2.98
- RRC	150,238,957	5.65	46,227,456	8.55	25,553,725	5.78
- Taiwan	65,294,956	2.46	13,262,105	2.45	14,390,989	3.26
- Asia Lainnya	338,684,119	12.74	86,054,534	15.91	83,951,419	18.99
4. Australia	30,264,113	1.14	5,103,525	0.94	3,137,202	0.71
5. Eropa	973,124,261	36.59	176,917,034	32.72	135,713,984	30.70
- Inggris	69,221,269	2.60	11,039,715	2.04	10,272,713	2.32
- Belanda	264,143,610	9.93	29,309,262	5.42	23,623,299	5.34
- Perancis	15,182,690	0.57	4,762,310	0.88	3,126,649	0.71
- Jerman	313,726,135	11.80	34,479,813	6.38	45,919,304	10.39
- Italia	95,350,923	3.59	28,787,965	5.32	11,717,252	2.65
- Eropa Lainnya	215,499,634	8.10	68,537,969	12.67	41,054,767	9.29
Total	2,659,439,426	100	540,763,192	100	442,065,697	100

Sumber: Direktorat Statistik Dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (diolah)

*) data Juli-Agustus 2009

Ekspor di benua Asia mengalami peningkatan pangsa dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 47%. Hal ini terjadi akibat peningkatan permintaan dari negara Jepang (10,9% qtq), Filipina (18,9% qtq), Korea Selatan (85,5% qtq), serta Taiwan (8,5% qtq). Jika dilihat spesifik per negara, pangsa ekspor terbesar Lampung diperoleh dari Amerika Serikat, dengan nilai US\$53,7 juta (12,14%), diikuti kemudian oleh Jepang sebesar US\$48,3 juta (10,9%), dan Jerman sebesar US\$45,9 juta (10,4%).

b. Impor

Rata-rata bulanan volume impor Provinsi Lampung pada triwulan III-2009 mengalami pertumbuhan sebesar 23,66% (qtq), meski pertumbuhan tahunannya tercatat negatif sebesar -38% (yoy). Selama triwulan II-2009, rata-rata bulanan impor Lampung tercatat sebesar US\$36,65 juta, kemudian meningkat menjadi US\$45,33 juta pada triwulan laporan.

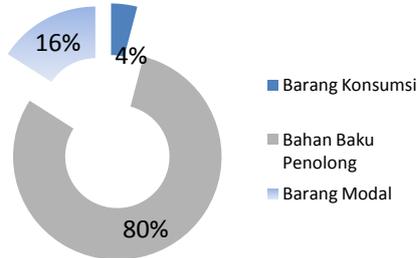


Sumber: Direktorat Statistik Dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (diolah)

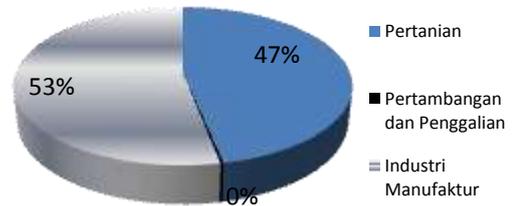
Berdasarkan klasifikasi BEC (*Broad Economy Category*), impor yang terjadi mayoritas berupa bahan baku penolong, dengan nilai US\$72,55 juta. Diikuti kemudian oleh barang modal sebesar US\$14,43 juta, dan barang konsumsi sebesar US\$3,67 juta. Impor bahan baku penolong dan barang konsumsi mengalami peningkatan rata-rata bulanan masing-masing sebesar 42,6% (qtq) dan 37,7% (qtq), sedangkan rata-rata bulanan impor barang modal menurun 26,9% dibanding triwulan lalu. Berdasarkan pangsa, impor bahan baku penolong masih menguasai 80% impor Lampung, diikuti kemudian oleh barang modal (16%) dan barang konsumsi (4%). Pangsa impor barang modal menurun dibanding triwulan lalu yang sebesar 27%.

Jika diamati berdasarkan sektor, impor yang ditujukan bagi sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, maupun sektor industri manufaktur mengalami peningkatan. Komoditas di sektor pertanian mengalami peningkatan rata-rata bulanan impor yang sangat signifikan, yaitu 32,9% (qtq) dari US\$15,86 juta pada triwulan II-2009. Menurut pangasanya, impor produk sektor industri manufaktur memegang 53% dari total impor Lampung, sedikit menurun dibanding pangsa triwulan lalu yang tercatat sebesar 57%.

Grafik 1.23
Impor Lampung Triwulan III-2009*
Berdasarkan BEC



Grafik 1.24
Impor Lampung Triwulan III-2009*
Berdasarkan ISIC



Sumber: Direktorat Statistik Dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (diolah)

Menurut klasifikasi Harmonized System (HS), impor binatang hidup menguasai 37,11% dari total impor Lampung. Kebanyakan binatang hidup yang diimpor adalah sapi asal Australia. Rata-rata bulanan impor binatang hidup meningkat dari US\$11,6 juta pada triwulan II-2009 menjadi US\$16,8 juta pada triwulan laporan. Impor yang besar selanjutnya adalah mesin-mesin/pesawat mekanik dengan pangsa 20,61% dari total. Mesin-mesin ini digunakan untuk kegiatan investasi. Produk impor lainnya seperti pupuk juga mengalami peningkatan. Tingginya kebutuhan akan pupuk urea dan NPK menjelang masa tanam di awal triwulan IV-2009 membuat permintaan impor pupuk meningkat. Pengurangan subsidi impor pupuk yang direncanakan pemerintah akan diberlakukan pada tahun 2010, diprediksi akan membuat ketergantungan petani terhadap pupuk impor sedikit berkurang.

Tabel 1.4
Impor Lampung Berdasarkan HS

Komoditas Utama Impor	2008	Triwulan I- 2009	Triwulan II- 2009	Triwulan III- 2009*
	US\$	US\$	US\$	US\$
1. Pupuk	253,136,309	3,627,580	6,384,572	7,408,300
2. Binatang Hidup	163,632,493	47,149,210	34,770,301	33,638,875
3. Ampas / Sisa Industri Makanan	41,801,350	8,607,332	7,631,455	8,100,981
4. Besi dan Baja	20,889,326	6,945,993	10,263	60,264
5. Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	63,100,933	30,065,568	25,724,952	18,683,986
6. Gula dan Kembang Gula	4,803,617	0	178,148	0
7. Hasil Penggilingan	12,452,646	2,481,296	3,547,906	2,544,173
8. Mesin / Peralatan Listik	15,648,447	1,211,126	4,685,666	544,916
9. Plastik dan Barang dari Plastik	3,648,021	642,342	765,546	537,965
10. Benda-benda dari Besi dan Baja	11,536,174	5,337,745	3,823,862	1,211,586
11. Berbagai Makanan Olahan	11,378,723	2,937,671	1,362,215	1,309,890
12. Garam, Belerang, Kapur	6,292,926	0	165,445	247,255
13. Bahan Kimia Organik	4,497,625	108,296	1,131,024	1,073,933
14. Bahan Kimia Anorganik	2,535,226	438,980	407,819	643,133
15. Berbagai Produk Kimia	1,147,378	350,056	566,491	129,219
16. Kain Perca	2,712,476	267,539	577,846	797,209
17. Gandum-gandum	7,416,280	2,219,000	1,182,750	4,950,200
18. Berbagai Barang Logam Dasar	5,427,069	603,614	615,536	546,007
19. Bahan Bakar Mineral	280	0	0	0
20. Biji-bijian berminyak	46,710,272	7,913,115	12,746,404	5,252,853
21. Kendaraan dan Bagiannya	1,910,027	53,364	88,581	52,665
22. Kaca & Barang dari Kaca	1,627,595	417,513	594,655	511,981
23. Lemak & Minyak Hewan / Nabati	333,260	0	0	358,161
24. Perekat, Enzim	488,428	105,561	187,685	193,926
25. Produk Hewani	0	0	0	45,758
26. Lain-lain	42,058,230	3,184,935	2,813,986	1,810,352
Total	725,185,111	124,667,836	109,963,108	90,653,589

Sumber: Direktorat Statistik Dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (diolah)

3. PERKEMBANGAN PDRB SISI PENAWARAN

Secara tahunan, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif di triwulan III-2009. Hanya sektor pertambangan dan penggalian serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang memiliki kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Sedangkan pangsa terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Lampung masih disumbang oleh sektor pertanian. Hal ini tampak dari sumbangan pertumbuhan tahunan sektor ini sebesar 2,96% (yoy), diikuti kemudian oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 1,35% (yoy).

Dilihat dari besarnya pertumbuhan per sektor, pertumbuhan tahunan terbesar terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi (10,04%), diikuti kemudian oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (8,65%), jasa-jasa (7,68%), pertanian (7,24%), bangunan (4,71%), industri pengolahan (3,4%), dan listrik, gas, dan air bersih (2,72%). Pertumbuhan pada mayoritas sektor tersebut (sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor bangunan, serta sektor industri pengolahan) diprediksi terjadi akibat produktivitas yang tinggi merespon tingginya permintaan masyarakat dalam menghadapi perayaan hari besar keagamaan serta tahun ajaran siswa baru. Sedangkan pertumbuhan pada sektor pertanian diakibatkan adanya panen komoditas bahan makanan serta peningkatan produktivitas peternakan.

Tabel 1.5
Pertumbuhan PDRB Lampung (% , yoy)

Sektor	Q III-2008 (yoy)	Q II-2009 (yoy)	Q III-2009 (yoy)	Kontribusi Q III-2009*)
Pertanian	2.82	4.67	7.24	2.96
Pertambangan dan Penggalian	-1.94	-14.62	-6.96	-0.16
Industri Pengolahan	4.71	7.67	3.40	0.47
Listrik, Gas & Air Bersih	0.06	1.34	2.72	0.01
Bangunan	3.53	4.32	4.71	0.23
Perdagangan, Hotel dan Restoran	8.19	9.15	8.65	1.35
Pengangkutan & Komunikasi	9.31	12.35	10.04	0.64
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	21.39	6.21	-0.25	-0.02
Jasa-jasa	6.04	6.43	7.68	0.58
PDRB dengan Migas	5.81	5.96	6.05	6.05

Ket : *) Kontribusi pertumbuhan tahunan sektor terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan Triwulan III-2009
Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

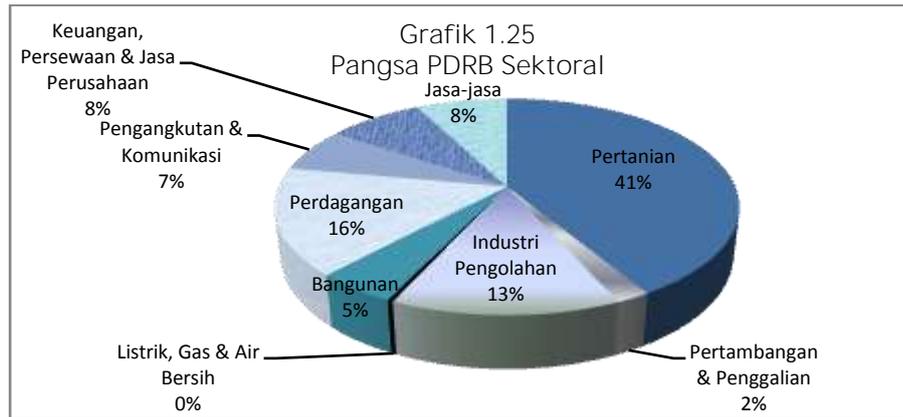
Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2009 tidak secepat pertumbuhan triwulan II-2009. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 0,98% (qtq), lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 4,99% (qtq). Perlambatan ini terjadi akibat masa panen yang mulai berakhir, sehingga tanaman bahan makanan mengalami penurunan output sebesar 12,05%, yang berdampak pada penurunan output sektor pertanian sebesar 3,91% (qtq). Adapun kontribusi pertumbuhan triwulanan terbesar disumbang oleh industri pengolahan (0,75%) serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran (0,67%) akibat produktivitas output yang meningkat ketika perayaan hari besar keagamaan.

Tabel 1.6
Pertumbuhan PDRB Lampung (% , qtq)

Sektor	Q III-2008 (qtq)	Q II-2009 (qtq)	Q III-2009 (qtq)	Kontribusi Q III-2009*)
Pertanian	-6.21	6.81	-3,91	-1,7
Pertambangan dan Penggalian	-0.79	-7,84	8.11	0.15
Industri Pengolahan	10.23	2.47	5.86	0.75
Listrik, Gas & Air Bersih	2.79	5.18	4.19	0.01
Bangunan	3.89	2.33	4.29	0.20
Perdagangan, Hotel dan Restoran	4.79	3.00	4.31	0.67
Pengangkutan & Komunikasi	4.94	3.31	2.79	0.18
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	12.39	5.86	5.55	0.42
Jasa-jasa	2.85	9.44	4.06	0.30
PDRB dengan Migas	0.89	4.99	0.98	0.98

Ket : *) Kontribusi pertumbuhan tahunan sektor terhadap pertumbuhan ekonomi triwulanan Triwulan III-2009
Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

Sektor Pertanian masih mendominasi 41% pangsa PDRB Provinsi Lampung di triwulan III-2009. Sektor selanjutnya yang juga memegang pangsa yang tinggi pada triwulan laporan adalah perdagangan, hotel, dan restoran (16%), serta industri pengolahan (13%).

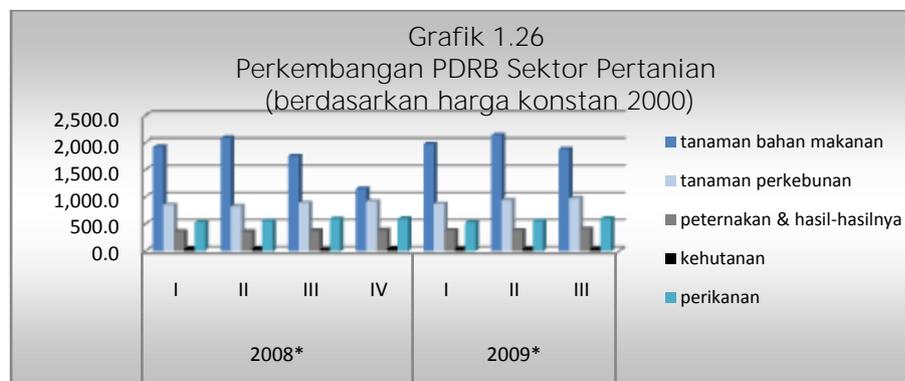


Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

SEKTOR PERTANIAN

Meskipun masih mendominasi, pangsa sektor pertanian dalam struktur PDRB Lampung sedikit mengalami penurunan, yaitu dari sebesar 43,5% menjadi sebesar 41%. Penurunan pangsa ini tidak terlepas dari puncak masa panen padi yang berlangsung pada triwulan sebelumnya. Seiring dengan menurunnya pangsa sektor pertanian, pertumbuhan triwulanan (triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya) juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,91%.

Penurunan triwulanan output sektor ini terjadi pada tanaman bahan makanan sebesar -12,05% (qtq) dan kehutanan sebesar -1,37% (qtq). Output tanaman bahan makanan menurun akibat mulai berakhirnya panen raya tabama pada awal triwulan III-2009. Selain itu, serangan virus dan hama di bulan Agustus 2009 melanda tanaman cabai, padi, dan jagung sehingga produksi tanaman tersebut menurun. Banjir yang melanda Lampung Selatan maupun Tanggamus juga membuat produksi sektor pertanian berkurang.



Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

Masa tanam sedang terjadi pada beberapa komoditas tanaman bahan makanan, diantaranya jagung dan padi. Di daerah sentra produksi jagung Lampung, yaitu Lampung Timur, sejak Juni 2009 masa tanam berlangsung. Begitu pula dengan sentra padi Lampung seperti Lampung Tengah dan Lampung Timur, telah memasuki musim gadu. Hanya sedikit daerah yang memasuki masa panen padi di bulan Juli hingga Agustus 2009.

Musim kemarau yang mulai terjadi membuat serangan hama maupun virus meningkat. Hal ini terjadi pada produksi cabai di wilayah Pesawaran yang terkena virus bule, serta produksi jagung dan padi di Pesawaran dan Lampung Timur masing-masing seluas 191 hektar dan 1.146 hektar terserang hama tikus sehingga menimbulkan ancaman gagal panen.

Secara tahunan, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 2,96%(yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya produktifitas padi dan jagung serta panen beberapa komoditas pertanian seperti lada. Di Lampung Barat, panen raya lada berlangsung dengan hasil yang cukup melimpah dan harga jual yang tidak terlalu rendah (Rp21.700/kg). Sementara itu di Lampung Selatan panen padi gadu sedang berlangsung, meskipun hasil panen sempat terganggu akibat sawah yang terserang hama tikus dan musim kemarau.

Menurut data Angka Ramalan II dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, terjadi peningkatan produksi padi dan jagung di tahun 2009 ini. Produksi padi (sawah dan ladang) dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pada tahun 2009 diperkirakan mengalami peningkatan 8,82% dibanding tahun 2008, atau menjadi 2,55 juta ton. Hal ini terjadi akibat peningkatan pada luas panen sebesar 40,49 ribu hektar dan kenaikan produktivitas sebesar 0,35 ku/hektar. Sedangkan produksi jagung dalam bentuk pipilan kering pada tahun ini diprediksi mencapai 2,06 juta ton, atau meningkat 13,86% dibanding tahun lalu. Peningkatan luas panen sebesar 122,66% dan kenaikan produktivitas sebesar 1,84% diprediksi menjadi pemicu kenaikan produksi jagung tersebut.

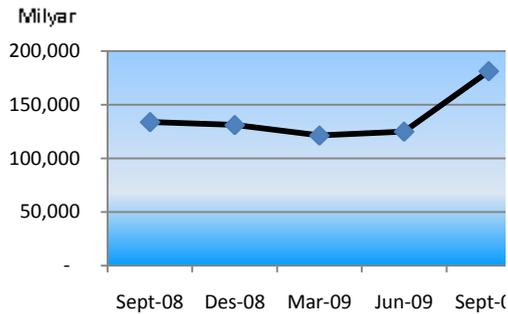
Tabel 1.7
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi (Sawah + Ladang) dan Jagung
Provinsi Lampung Tahun 2007-2009

Uraian	2007	2008 (Atap)	2009 (Aram II)	Perkembangan		Perkembangan	
				2007-2008		2008-2009	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
Padi (Sawah + Ladang)							
Luas Panen (ha)	524,955	506,547	547,040	-18,408	-3.51	40,493	7.99
Produktivitas (ku/ha)	43.97	46.22	46.57	2.25	5.12	0.35	0.76
Produksi (ton)	2,308,404	2,341,075	2,547,516	32,671	1.42	206,441	8.82
Jagung							
Luas Panen (ha)	369,971	387,549	433,319	17,578	4.75	45,770	11.81
Produktivitas (ku/ha)	36.40	46.70	47.56	10.30	28.29	0.86	1.84
Produksi (ton)	1,346,821	1,809,886	2,060,712	463,065	34.38	250,826	13.86

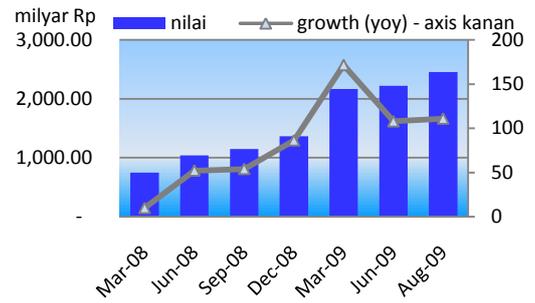
Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

Meningkatnya pertumbuhan kredit perbankan yang termasuk perkembangan alokasi kredit usaha rakyat di sektor pertanian pada triwulan laporan, merupakan dukungan terjadinya akselerasi PDRB sektor pertanian. Baki debit Kredit Usaha Rakyat di sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 45,13% (qtq) dan 35,5% (yoy), sehingga nilainya pada akhir triwulan laporan sebesar Rp181,3 miliar. Peningkatan alokasi ini terjadi seiring dengan dimulainya masa tanam pada beberapa komoditas pertanian. Perkembangan kredit perbankan juga menunjukkan arah yang sama. Hingga bulan September 2009, *outstanding credit* pada sektor pertanian meningkat 8,88% dibanding triwulan II-2009, dan meningkat 89,99% dibanding September 2008. Pertumbuhan kredit sektor pertanian ini membuktikan adanya keseriusan perbankan dalam membantu perekonomian Lampung yang ditopang oleh sektor pertanian.

Grafik 1.27
Baki Debet KUR Sektor Pertanian



Grafik 1.28
Kredit Sektor Pertanian

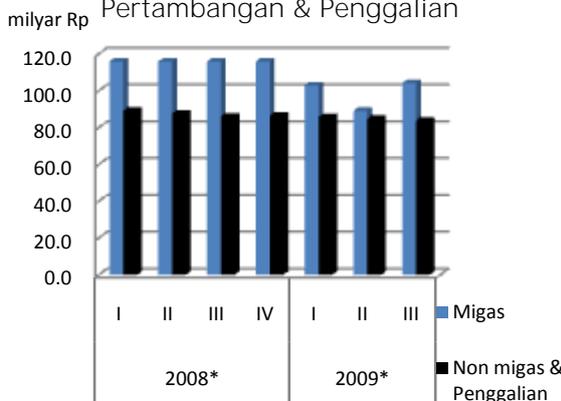


Sumber: LBU dan LBUS (diolah)

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan III-2009 masih belum menunjukkan adanya perbaikan kinerja. Pertumbuhan tahunan sektor ini tercatat sebesar -7,0%(yoy). Meskipun demikian, secara triwulanan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 8,11% (qtq). Pertumbuhan triwulanan ini disumbang oleh kenaikan pada subsektor migas, dari Rp89 miliar pada triwulan II-2009 menjadi Rp104,1 miliar pada triwulan laporan (PDRB harga konstan 2000). Pertumbuhan sektor pertambangan didukung oleh pembiayaan perbankan yang mengalami kenaikan sebesar 50,14% (qtq) menjadi Rp28,07 miliar di triwulan III-2009. Sedangkan untuk Kredit Usaha Rakyat, nilainya cenderung konstan tiap triwulan, yaitu Rp315 juta.

Grafik 1.29
Perkembangan PDRB Sektor Pertambangan & Penggalian



Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

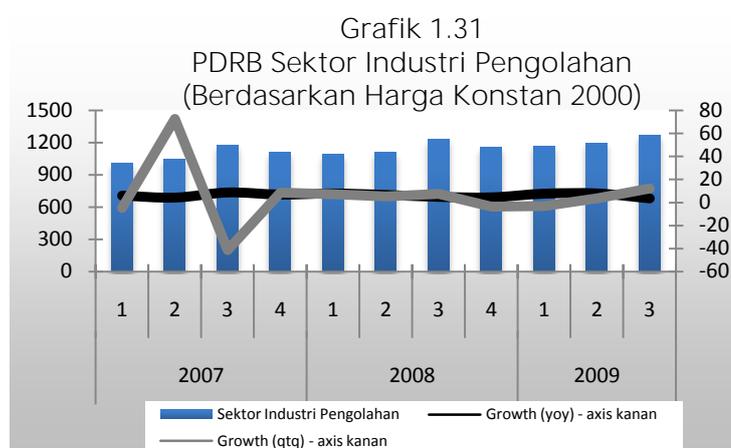
Grafik 1.30
Outstanding Kredit Sektor Pertambangan



Sumber: LBU dan LBUS (diolah)

SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

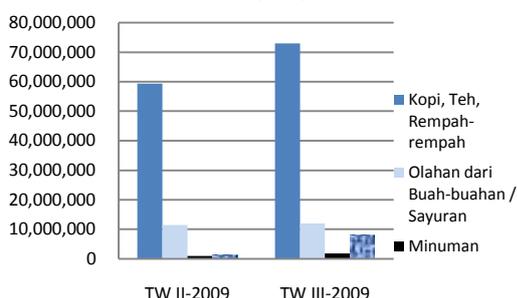
Tingginya permintaan pada sektor industri pengolahan direspon dengan peningkatan kinerja sektor ini sebesar 5,86% dibanding triwulan lalu, dan 3,4% dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan II-2009, PDRB sektor industri pengolahan tercatat sebesar Rp1,195 triliun, dan pada triwulan III-2008 PDRB sektor ini bernilai Rp1,22 triliun. Meningkatnya output yang dihasilkan sektor ini antara lain diakibatkan tingginya permintaan masyarakat akan makanan dan minuman olahan dalam menghadapi perayaan hari besar keagamaan.



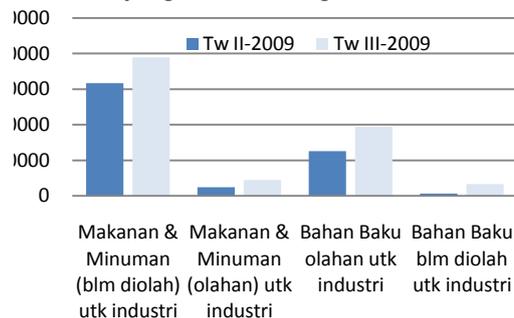
Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

Beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan sektor industri pengolahan diantaranya dari nilai impor maupun ekspor komoditas terkait, serta pemakaian listrik sektor industri. Beberapa komoditas ekspor yang meliputi kopi, teh, dan rempah-rempah, olahan dari buah/sayuran, minuman, serta gula dan kembang gula mengalami peningkatan ekspor triwulanan masing-masing sebesar 22,89%, 4,44%, 87,14%, dan 476,4%. Pada impor Lampung, terjadi peningkatan impor bahan baku penolong yang sebagian besar diperuntukkan bagi produksi di sektor industri pengolahan.

Grafik 1.32
Rata-rata bulanan Ekspor Komoditi
Industri Pengolahan Makanan/Minuman
(US\$)

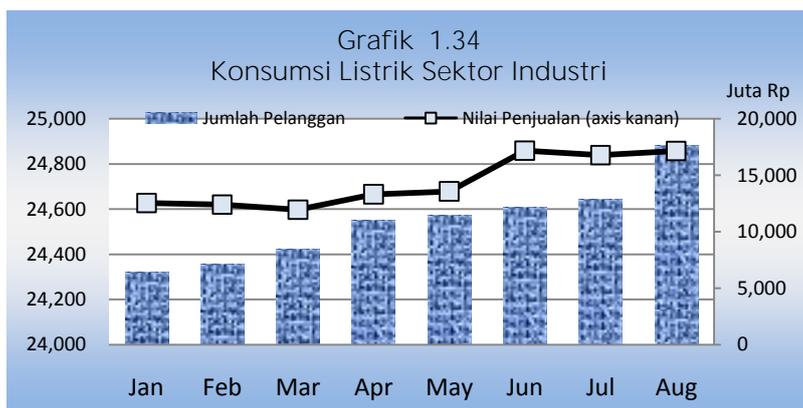


Grafik 1.33
Rata-rata bulanan Impor Komoditi
Penunjang Industri Pengolahan (US\$)



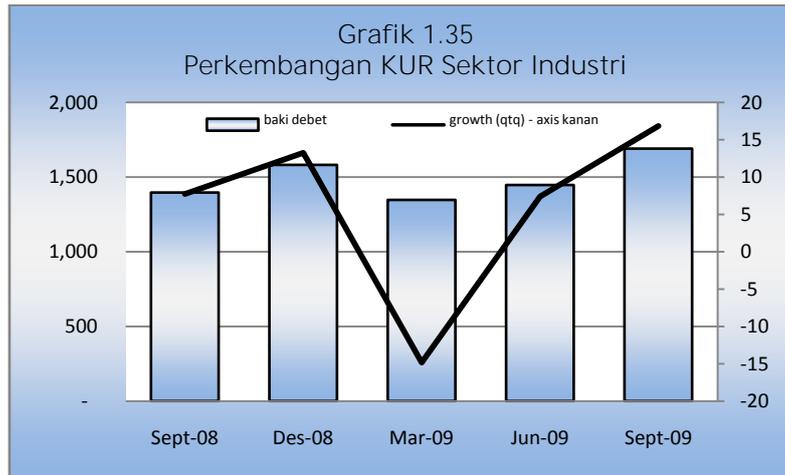
Sumber: Direktorat Statistik Dan Ekonomi Moneter (diolah)

Besarnya rata-rata bulanan konsumsi listrik industri di triwulan laporan merupakan indikasi peningkatan aktivitas di sektor tersebut. Pada triwulan sebelumnya, rata-rata bulanan nilai penjualan listrik yang terjadi pada sektor industri sebesar Rp16,87 miliar, sedangkan pada triwulan ini rata-rata bulannya sebesar Rp19,03 miliar.

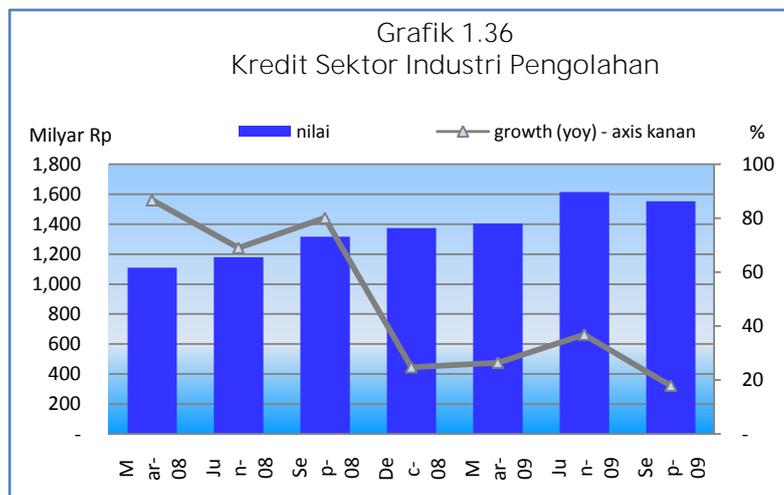


Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

Dukungan pembiayaan dari perbankan untuk sektor industri pengolahan tercatat mengalami peningkatan, yang terlihat dari meningkatnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat sektor ini pada triwulan III-2009. Dibanding triwulan lalu yang nilainya tercatat sebesar Rp1,45 miliar, terjadi kenaikan KUR yang disalurkan sebesar 16,8%, sehingga nilainya menjadi Rp1,69 miliar. Jumlah debitur yang tercatat pada KUR di sektor ini hingga September 2009 mengalami peningkatan dibanding posisi September tahun lalu, yaitu dari 282 nasabah menjadi 302 nasabah. Sementara dari total kredit yang disalurkan perbankan untuk sektor ini, terdapat sedikit penurunan pada triwulan laporan.



Sumber: LBU dan LBUS (diolah)



Sumber: LBU dan LBUS (diolah)

SEKTOR LISTRIK, AIR DAN GAS

Sektor listrik, gas, dan air bersih pada triwulan ini mengalami akselerasi pertumbuhan, baik secara tahunan maupun triwulanan. Pada triwulan II-2009, output sektor ini sebesar Rp30,4 miliar atau tumbuh 1,3% (yoy), sedangkan pada triwulan laporan, output yang dihasilkan meningkat menjadi Rp31,7 miliar atau terakselerasi 2,7% (yoy). Jika diamati secara triwulanan, sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami pertumbuhan sebesar 4,19% (qtq). Pertumbuhan yang terjadi pada sektor ini disumbang oleh subsektor listrik yang menghasilkan peningkatan output sebesar 5,19% (qtq) atau 6,3% (yoy). Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang terjadi pada sub sektor listrik (lihat Boks).

Boks - Krisis Listrik di Provinsi Lampung

Unit PLN yang berada diluar Jawa dan Bali mengalami keterbatasan pasokan energi listrik yang mengarah pada terjadinya defisit energi listrik. Permasalahan listrik ini menjadi isu nasional sehingga untuk menanggulangnya pemerintah mencanangkan program percepatan 10.000 Mw tahap 1 dan 2. Kondisi defisit energi listrik ini lebih diakibatkan oleh perkembangan kemampuan terpasang sejumlah pembangkit yang berada di beberapa daerah di luar Jawa dan Bali tidak dapat lagi mengimbangi pertumbuhan kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Situasi kelistrikan seperti ini juga terjadi di Provinsi Lampung.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, angka pertumbuhan kebutuhan listrik di Lampung cukup pesat, yakni mencapai 7 % pertahun. Namun demikian, pertumbuhan kebutuhan listrik tidak mampu diimbangi dengan tersedianya pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik lokal yang ada di Lampung.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Lampung merupakan salah satu Provinsi yang memiliki Rasio Elektrifikasi terendah di Indonesia. Rasio elektrifikasi Lampung pada tahun 2007 hanya mencapai 47,7% atau merupakan yang paling rendah di Sumatera. Rasio elektrifikasi sebesar 47,7% menandakan bahwa hanya 47,7% dari seluruh rumah tangga se-Propinsi Lampung yang dialiri listrik.



Saat ini, Lampung memiliki 29 Unit pembangkit listrik yang terdiri atas 4 buah PLTA, 2 buah PLTU, 1 buah PLTG, dan 22 buah PLTD dengan total daya mampu mencapai 337,89 Mw. Pada saat beban puncak, daya yang dibutuhkan oleh pembangkit di Lampung untuk menyediakan sambungan listrik bagi 914.708

pelanggannya (data Agustus 2009) adalah sebesar 442 Mw. Oleh karena itu, dalam keadaan normal (tidak ada gangguan pada semua pembangkit), Lampung mengalami defisit daya kurang lebih sebesar 100 Mw. Berdasarkan hal tersebut, Lampung melakukan interkoneksi listrik di wilayah Sumbagsel.

Jenis	Jumlah Unit	Daya Terpasang (Mw)	Daya Mampu (Mw)
PLTA	4	119.6	117.12
PLTU	2	200	178
PLTG	1	21.35	0
PLTD	22	101.33	62.77
Total	29	442.28	357.89

Sumber : berbagai sumber (diolah)

Sumbangan daya yang mampu diberikan oleh jaringan listrik interkoneksi Sumbagsel mencapai kurang lebih 200 Mw, sehingga dengan asumsi kondisi 29 pembangkit dalam keadaan normal, maka seharusnya Lampung tidak mengalami kondisi kekurangan daya listrik.

Namun, sejak awal triwulan III-2009 hingga akhir triwulan IV-2009 nanti, Lampung akan terus mengalami pemadaman bergilir. Hal ini terjadi karena pembangkit listrik di Lampung tidak dapat menghasilkan daya secara optimal meskipun telah terkoneksi dengan Sumbagsel. Lampung hanya mampu menghasilkan daya sebesar 173 Mw, sedangkan daya dari Sumbagsel mencapai 202 Mw. Dengan daya beban puncak yang mencapai 442 Mw, maka Lampung pada periode ini mengalami defisit daya listrik sebesar 67 Mw.

No.	Nama Pembangkit	Daya Mampu (Mw)
Sumber Internal Provinsi		
1	PLTU Tarahan Unit III	90
2	PLTU Tarahan Unit IV	0
3	PLTA	21
4	PLTA Batu Tegi	0
5	PLTD/G	62
TOTAL DAYA INTERNAL		173
Sumbangan Interkoneksi		202
TOTAL DAYA INTERNAL DAN INTERKONEKSI		375

Sumber : berbagai sumber (diolah)

Penyebab tidak optimalnya pembangkit adalah :

1. Pembangkit listrik PLTU Unit III dan IV di Tarahan dalam kondisi *major overhaul* (perbaikan). Perbaikan PLTU Unit IV berlangsung dari 8 Oktober 2009 hingga 14 November 2009, sedangkan di PLTU Unit III perbaikan akan dilaksanakan pada 15 November 2009 hingga 19 Desember 2009.
2. PLTA Batutege di Kabupaten Tanggamus tidak beroperasi karena pemanfaatan air di waduk tersebut tidak optimal.
3. Kemampuan operasi di PLTA Way Besai hanya 50% akibat musim kemarau.

Dalam rangka mengatasi defisit listrik, PT. PLN Wilayah Lampung mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

Upaya Jangka Pendek

1. Mengendalikan laju pertumbuhan beban konsumsi listrik atau *Demand Side Management* (DSM) , utamanya pada saat WBP (Waktu Beban Puncak) pada pukul 17.00 – 22.00 WIB.
2. Bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menanggulangi pemakaian listrik ilegal melalui aksi P2TL (Penertipan Pemakaian Tenaga Listrik).
3. Himbauan kepada pelanggan besar listrik PLN (konsumen bisnis dan perusahaan besar) untuk menghemat semaksimal mungkin penggunaan daya dan energi pada periode WBP, memindahkan penggunaan daya dan energi dari WBP menjadi Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) serta menggunakan pembangkit sendiri (genset milik pelanggan) pada periode WBP.
4. Menggunakan mesin PLTD PLN hanya di waktu beban puncak untuk meminimalkan kondisi pemadaman.
5. Himbauan kepada konsumen rumah tangga untuk menghemat penggunaan listrik saat WBP.

Upaya Jangka Menengah dan Panjang

1. Menggali potensi energi alternatif, seperti penggunaan mikrohidro.
2. Rencana Pembangunan PLTU (2 x 100 MW) dan PLTP Ulu Belu (2 x 55 MW) yang diperkirakan beroperasi tahun 2012.

SEKTOR BANGUNAN

Sektor bangunan mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,7% (yoy) dan 4,29% (qtq). Semakin maraknya proyek pembangunan pemerintah maupun swasta membuat output yang dihasilkan sektor ini terakselerasi di triwulan laporan. Indikator pendukung adanya pertumbuhan pada sektor bangunan diantaranya adalah rata-rata penjualan semen yang meningkat pada bulan ini, dibandingkan rata-rata penjualan bulan lalu. Bertambahnya alokasi kredit bank umum yang diberikan pada sektor ini dari Rp359,96 miliar pada triwulan sebelumnya menjadi Rp379,24 miliar pada triwulan laporan, juga merupakan satu indikator pertumbuhan PDRB sektor bangunan.



Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)



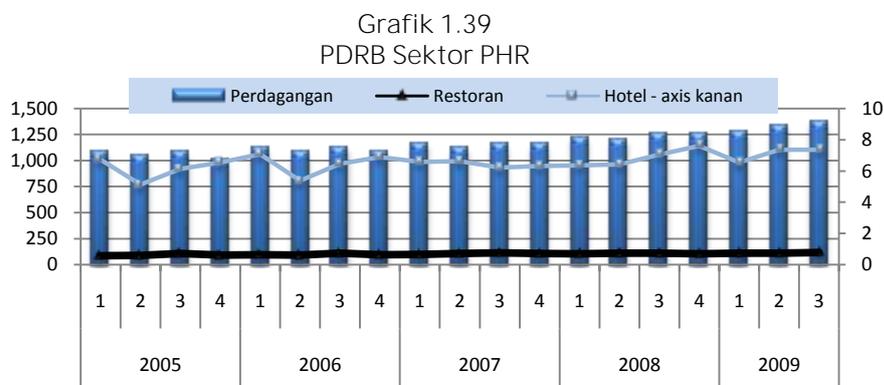
Sumber: LBU dan LBUS (diolah)

SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN (PHR)

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) mengalami pertumbuhan baik secara tahunan maupun triwulanan. Jika diamati secara tahunan, PDRB sektor PHR naik 8,6% (yoy), dari Rp1,38 triliun pada triwulan III-2008 menjadi Rp1,50 triliun pada triwulan laporan. Sedangkan jika diamati secara triwulan, pertumbuhan yang terjadi adalah sebesar 4,31% (qtq), dari Rp1,44 triliun pada triwulan sebelumnya. Semua subsektor mengalami peningkatan, dengan sumbangan pertumbuhan paling besar diperoleh dari subsektor perdagangan sebesar 0,65% (qtq) dan 1,28% (yoy).

Tingginya permintaan pada musim tahun ajaran baru serta perayaan hari besar keagamaan (puasa dan Idul Fitri) merupakan pendorong pertumbuhan output sektor ini. Tahun ajaran baru mendorong peningkatan penjualan perlengkapan sekolah. Puasa ramadhan dan hari raya idul fitri meningkatkan konsumsi masyarakat. Liburan tahun

ajaran baru serta hari raya Idul Fitri meningkatkan tingkat hunian hotel hingga 60,84% pada bulan Juli 2009.



Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami peningkatan di triwulan laporan, yaitu sebesar 10% (yoy) dan 2,79% (qtq). Pertumbuhan positif terjadi di kedua sub sektor, dimana sumbangan pertumbuhan terbesar diberikan oleh subsektor komunikasi.

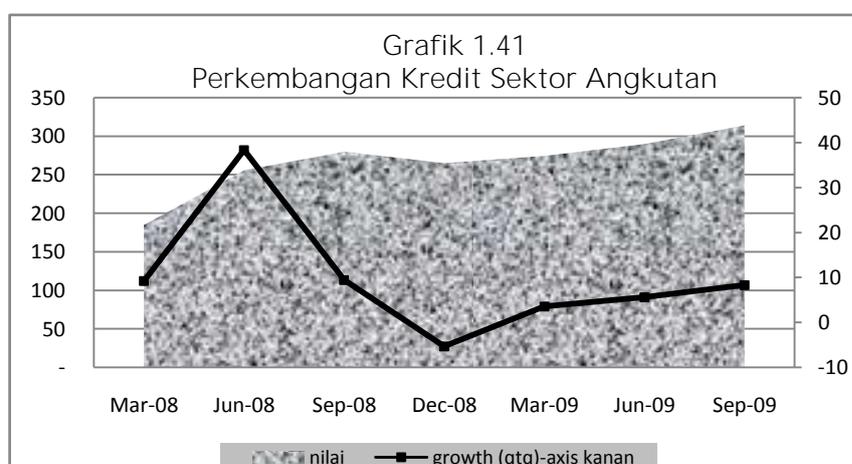


Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

Indikator yang mendukung adanya peningkatan pada sub sektor pengangkutan antara lain jumlah penumpang yang tiba maupun berangkat di Bandara Radin Inten II. Pada triwulan III-2009, rata-rata bulanan jumlah penumpang yang datang sebesar 25.079 jiwa, meningkat 11,5% dibanding triwulan lalu yang tercatat sejumlah 22.488

jiwa. Adapun jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Radin Inten II sebanyak 24.739 jiwa, tumbuh 7,69% dibanding triwulan lalu yang tercatat 22.973 jiwa. Meningkatnya jumlah penumpang pada triwulan ini salah satunya merupakan efek dari adanya Hari Raya Idul Fitri, serta liburan sekolah yang cukup panjang.

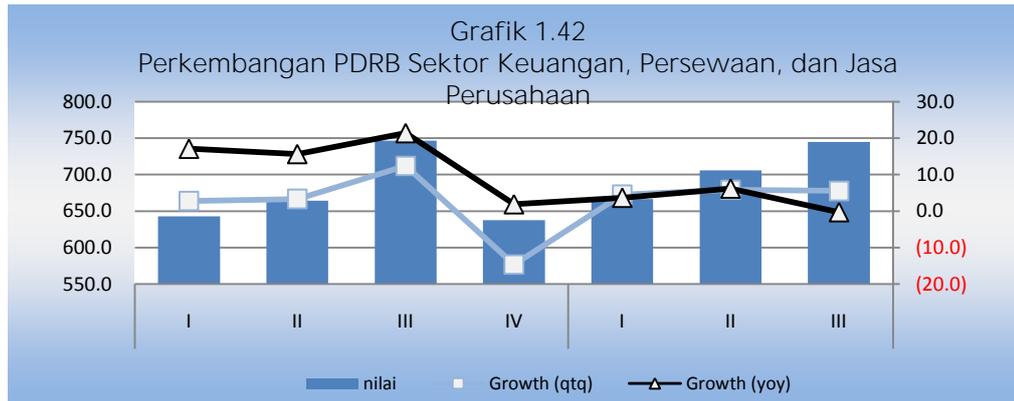
Meningkatnya pembiayaan dari perbankan juga merupakan suatu bentuk dukungan peningkatan output di sektor pengangkutan dan komunikasi. Dari nilai *outstanding credit* pada triwulan II-2009 sebesar Rp289,9 miliar, meningkat 8,34% menjadi Rp314,15 miliar pada triwulan laporan. Pertumbuhan kredit ini juga meningkat 12,18% dibanding triwulan yang sama pada tahun lalu.



Sumber : LBU dan LBUS (diolah)

SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN

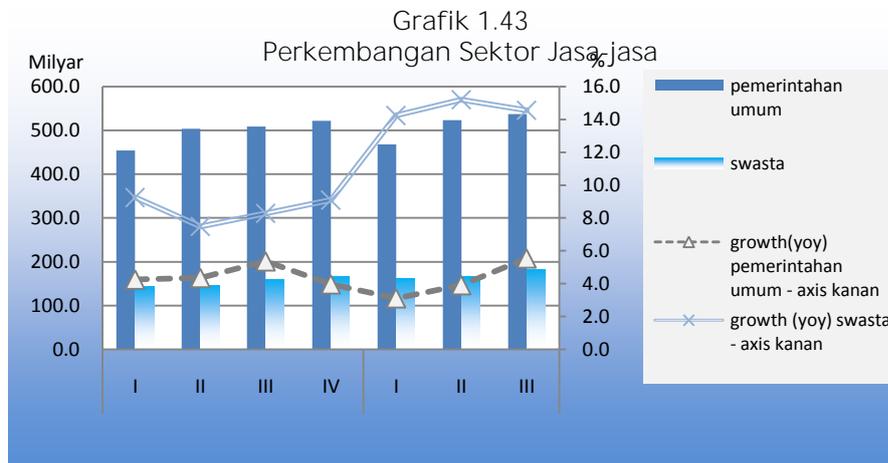
Output yang dihasilkan oleh sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan mengalami peningkatan. Pertumbuhan triwulanan yang terjadi adalah sebesar 5,55% (qtq), dari Rp705,7 miliar pada triwulan II-2009 menjadi Rp744,9 miliar pada triwulan laporan. Kenaikan ini ditunjang oleh pertumbuhan yang terjadi pada subsektor bank (naik 9,47%), lembaga keuangan bukan bank (2,41%), sewa bangunan (2,19%), dan jasa perusahaan (1,18%). Positifnya pertumbuhan pada subsektor tersebut merupakan suatu fakta bahwa aktivitas perekonomian Lampung sudah semakin pulih dari jeratan krisis keuangan global.



Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

SEKTOR JASA-JASA

Sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan positif, baik secara triwulanan maupun tahunan. Pada triwulan III-2009, output yang dihasilkan sektor jasa-jasa tercatat sebesar Rp718,3 miliar, atau meningkat 4,06% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya dan 7,7% (yoy) dibanding triwulan III-2008. Adapun penyumbang pertumbuhan tahunan tertinggi berasal dari sub sektor pemerintahan umum sebesar 0,32%.

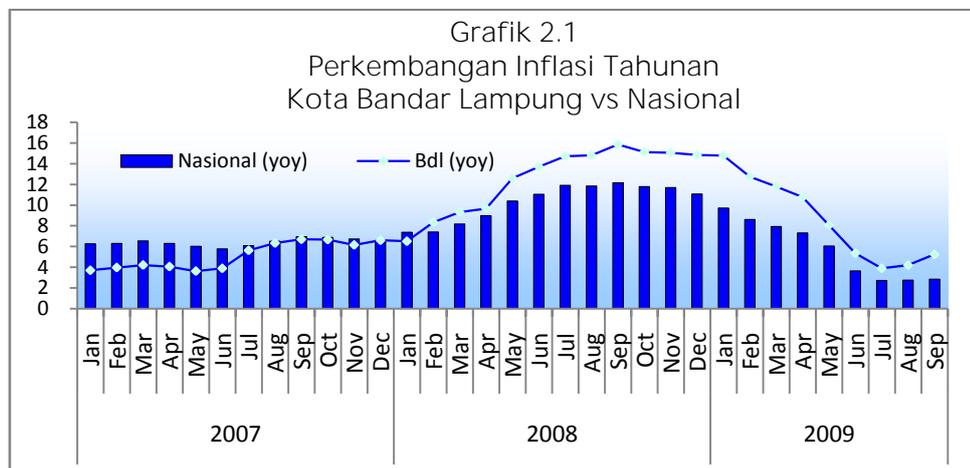


Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

BAB II - PERKEMBANGAN INFLASI

1. KONDISI UMUM

Tekanan harga di Provinsi Lampung pada triwulan III-2009 meningkat. Inflasi triwulanan mencapai 4,85% (qtq), jauh melesat dibanding triwulan II-2009 yang mengalami deflasi sebesar 1,29% (qtq). Sementara inflasi tahunan tercatat mencapai 5,22% (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang hanya 4,86% (yoy), namun masih lebih rendah dibandingkan triwulan II-2009 yang sebesar 5,33% (yoy).

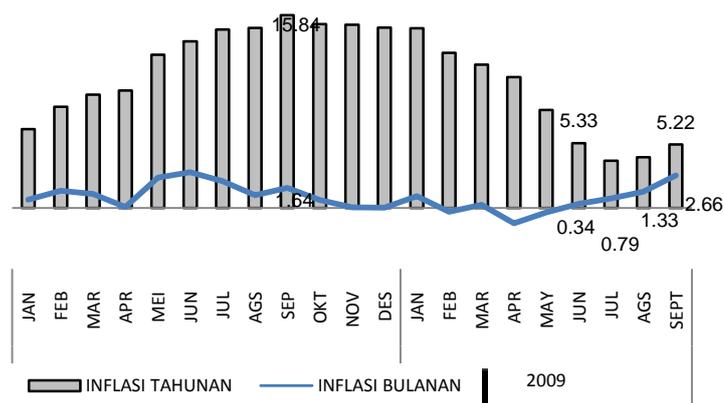


Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Selama triwulan III-2009, inflasi bulanan dari Juli hingga September 2009 cenderung meningkat. Pada bulan Juli, inflasi sebesar 0,79% (mtm) terjadi lebih disebabkan oleh *supply shock* pada bahan makanan. Mulai berakhirnya musim panen pada tanaman bahan makanan, membuat pasokan di pasaran menjadi berkurang. Inflasi sebesar 1,33% (mtm) di bulan Agustus 2009 lebih didominasi oleh kelompok pendidikan terutama biaya pendidikan SLTA. Kelompok perumahan mengalami inflasi yang signifikan sebesar 3,11% (mtm) akibat kenaikan harga sewa rumah untuk kebutuhan siswa baru/pindahan. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak tanah akibat pasokan mitan bersubsidi yang makin dikurangi Pemerintah. Inflasi pada makanan jadi yang dikonsumsi selama puasa ramadhan juga memberikan andil yang cukup besar pada inflasi Agustus 2009 tersebut. Sedangkan inflasi pada bulan September 2009

sebesar 2,66% (mtm) sangat didominasi oleh kelompok bahan makanan dengan kenaikan harga sebesar 7,22% (mtm), yang diikuti oleh kelompok sandang dengan inflasi senilai 2,27% (mtm). Kemarau yang sedang terjadi membatasi ketersediaan produk pertanian dan perikanan, ditambah dengan permintaan masyarakat yang tinggi ketika puasa dan lebaran, membuat harga naik signifikan.

Grafik 2.2
Perkembangan Inflasi Kota Bandar Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

2. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB

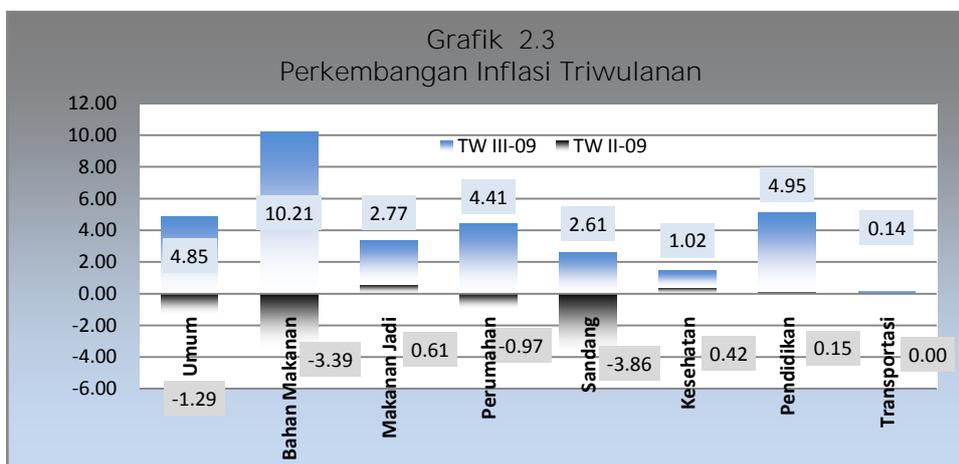
Inflasi Lampung yang terjadi di triwulan III-2009 secara umum disebabkan oleh faktor administered (terkait dengan pengurangan distribusi minyak tanah bersubsidi), *supply shock* (terkait dengan masa tanam yang masih berlangsung dan adanya kemarau), serta faktor eksternal (masih tingginya harga gula dunia), sehingga menimbulkan *output gap* yang berujung pada kenaikan harga barang/jasa.

2.1. Inflasi Triwulanan (qtq)

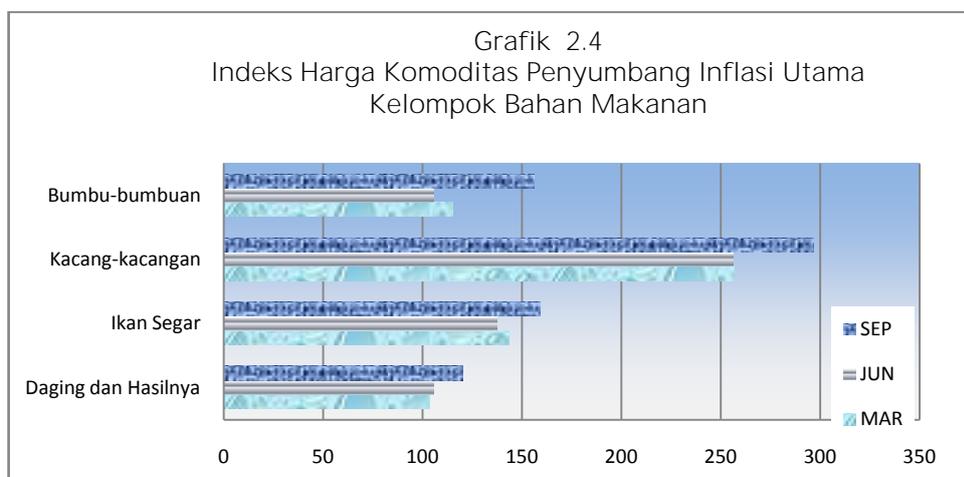
Inflasi pada triwulan III-2009 tercatat sebesar 4,85% (qtq), jauh melesat dibanding triwulan II-2009 yang mengalami deflasi sebesar 1,29% (qtq). Semua kelompok komoditas mengalami inflasi, sedangkan pada triwulan sebelumnya, inflasi hanya terjadi pada kelompok makanan jadi, kesehatan, dan kelompok pendidikan.

Diantara semua kelompok yang melonjak harganya di triwulan laporan, kelompok bahan makanan mengalami peningkatan harga paling signifikan. Pada triwulan lalu, kelompok ini mengalami deflasi sebesar -3,39% (qtq), kemudian berbalik menjadi inflasi 10,21% (qtq) di triwulan III-2009. Bumbu-bumbuan menyumbang lonjakan harga yang paling tinggi pada kelompok bahan makanan,

dengan nilai inflasi mencapai 48,1% (qtq) diikuti kemudian oleh ikan segar sebesar 15,8% (qtq), kacang-kacangan sebesar 15,7% (qtq), serta daging dan hasil-hasilnya sebesar 13,9% (qtq). Terbatasnya pasokan ditambah dengan musim kemarau yang sedang berlangsung, membuat lonjakan harga pada komoditas-komoditas tersebut.



Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)



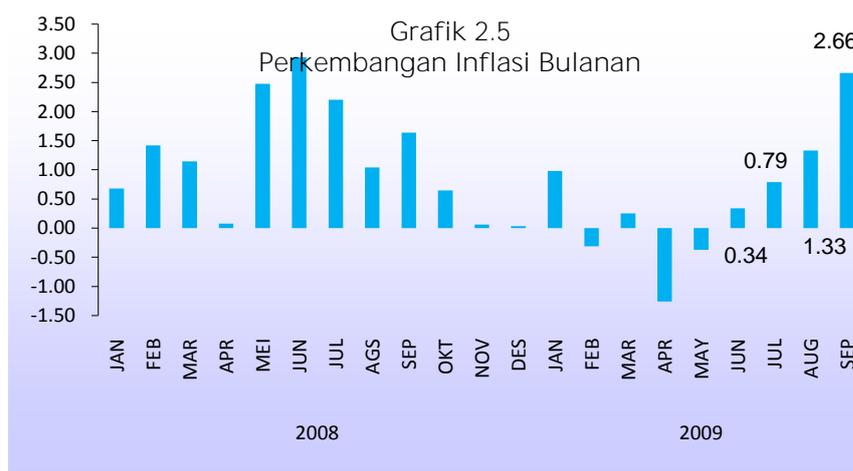
Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Kelompok perumahan tercatat mengalami inflasi sebesar 4,41% (qtq), kenaikan harga terutama akibat sub kelompok bahan bakar, penerangan, dan air. Pada subkelompok tersebut, kenaikan harga sebesar 7,3% (qtq) disebabkan oleh berkurangnya pasokan minyak tanah bersubsidi, sehingga harga mitan bersubsidi yang masih beredar mencapai Rp6.000-Rp7.000/liter dari HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp2.790/liter.

Pada kelompok makanan jadi dengan inflasi sebesar 2,77% (qtq), kenaikan harga disumbang oleh komoditas gula pasir dengan inflasi sebesar 13,21% (qtq). Hal ini terjadi akibat permintaan yang tinggi ketika puasa Ramadhan baik oleh rumah tangga, maupun oleh industri. Mahalnya harga gula impor rafinasi membuat industri turut membeli gula konsumen, hal ini menyebabkan harga gula pasir pada bulan puasa lalu meningkat dari Rp8.000/kg menjadi Rp10.000/kg.

2.2 Inflasi Bulanan (mtm)

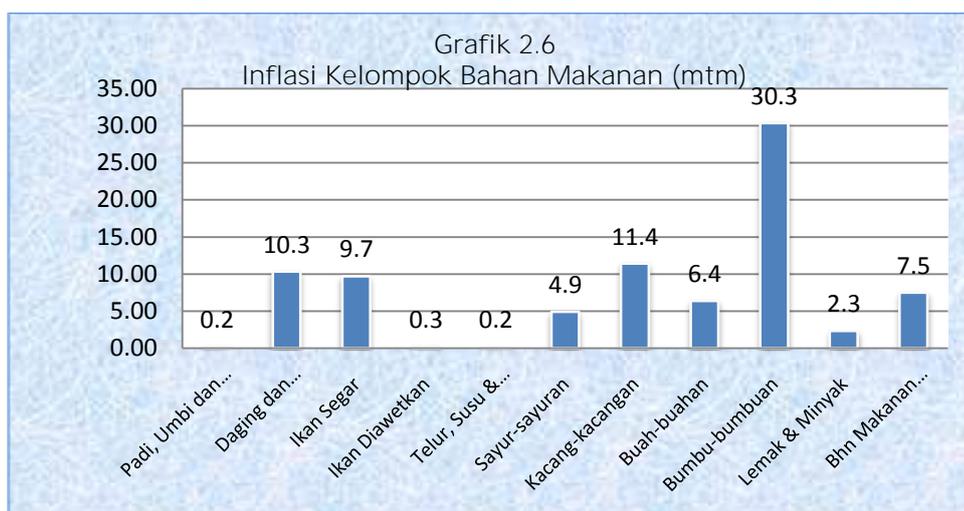
Pada bulan September 2009, Lampung merupakan provinsi dengan tingkat inflasi bulanan tertinggi se-Indonesia, yaitu sebesar 2,66% (mtm). Kenaikan harga bulanan tersebut terutama disumbang oleh kelompok bahan makanan sebesar 7,22% (mtm), kelompok sandang sebesar 2,27% (mtm), serta kelompok makanan jadi sebesar 1,63% (mtm).



Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Hampir sama dengan inflasi triwulanan, inflasi bulanan pada kelompok bahan makanan didominasi oleh bumbu-bumbuan, kacang-kacangan, daging dan hasil-hasilnya, serta ikan segar. Keempat komoditas itu mengalami inflasi bulanan masing-masing sebesar 30,33%, 11,42%, 10,32%, dan 9,69%. Pada bumbu-bumbuan, kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas cabe merah yang melonjak hingga 81,83% menjadi Rp15 ribu, diikuti kemudian oleh bawang putih naik 33,33% menjadi Rp15 ribu, serta cabe rawit naik 54,5%. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh kurangnya pasokan dan tidak sedang dalam masa panen. Pada kacang-kacangan,

kenaikan harga terjadi pada tempe dengan sumbangan inflasi sebesar 0,29% akibat harga kedelai impor yang tinggi. Kenaikan harga ikan segar terjadi akibat kurangnya hasil tangkapan nelayan seiring gangguan cuaca dan gelombang tinggi yang sedang melanda lautan di Lampung. Sebagai contoh, dalam satu minggu, ikan kakap merah harganya naik dari Rp25 ribu menjadi Rp40 ribu, begitu pula dengan rajungan yang melonjak dari Rp25 ribu menjadi Rp35ribu.



Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

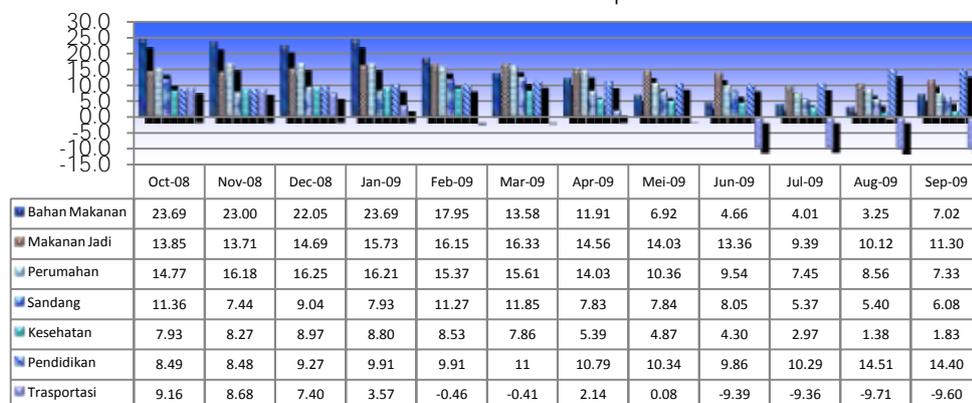
Akibat permintaan sandang yang tinggi menjelang hari raya Idul Fitri, maka harga komoditas pada kelompok sandang mengalami kenaikan. Hal ini terutama terjadi pada sandang pria, dimana inflasi tercatat sebesar 7,11% (mtm). Harga emas yang turun menjelang hari raya lalu, membuat komoditas sandang wanita tidak mengalami peningkatan harga, dan hasil pemantauan pasar menyatakan bahwa tidak terjadi lonjakan pembelian emas oleh konsumen menjelang lebaran, meskipun harga emas sedang rendah. Hal ini diprediksi akibat pengalihan daya beli konsumen kepada komoditas yang lebih utama.

2.3 Inflasi Tahunan (yoy)

Inflasi tahunan Provinsi Lampung pada triwulan III-2009 turun dibanding triwulan sebelumnya. Pada bulan September 2009, inflasi yang terjadi sebesar 5,22% (yoy), menurun dibanding inflasi Juni 2009 yang tercatat sebesar 5,33% (yoy). Dari semua kelompok yang ada, hanya kelompok transpor dan komunikasi yang mengalami deflasi sebesar 9,6% (yoy). Hal ini disebabkan oleh harga BBM yang cenderung lebih rendah pada September 2009 ini dibanding September 2008.

Inflasi tahunan tertinggi terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga yang mencapai 14,4% (yoy), diikuti kemudian oleh kelompok makanan jadi sebesar 11,3% (yoy), serta kelompok perumahan sebesar 7,33% (yoy). Pada kelompok pendidikan, kenaikan harga terjadi pada sub kelompok pendidikan (21,42%) dimana setiap tahun cenderung terjadi kenaikan harga pendidikan pada setiap jenjang sekolah. Begitu pula dengan kelompok perumahan, dimana kenaikan harga tahunan tertinggi terjadi pada sub kelompok biaya tempat tinggal (8,16%), diikuti oleh sub kelompok bahan bakar (7,68%).

Grafik 2.7
Inflasi Tahunan (yoy) Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Kelompok

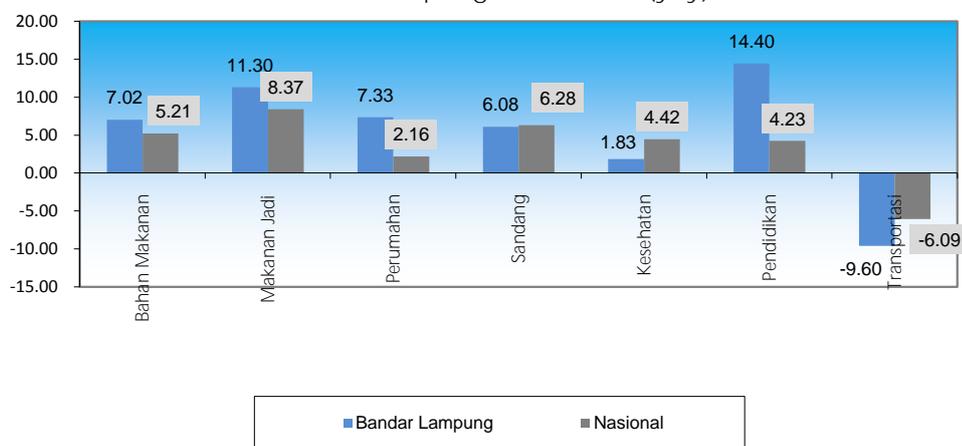


Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Jika melihat perbandingan antara inflasi tahunan Provinsi Lampung dengan nasional, maka Lampung cenderung memiliki tekanan inflasi yang lebih tinggi di berbagai kelompok. Dari semua kelompok yang ada, kelompok sandang dan kelompok transportasi memiliki inflasi lebih rendah di Lampung dibanding nasional. Inflasi kelompok sandang di Lampung sebesar 6,08% (yoy), sedangkan inflasi nasional pada kelompok ini mencapai 6,28% (yoy). Pada kelompok transportasi, deflasi yang terjadi di

Lampung sebesar 9,6% (yoy), sedangkan secara nasional terdapat deflasi senilai 6,09% (yoy).

Grafik 2.8
Perkembangan Inflasi Tahunan
Bandar Lampung vs Nasional (yoy)



Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

BAB III - PERKEMBANGAN PERBANKAN

1. PERKEMBANGAN UMUM PERBANKAN

Pada triwulan III-2009, kinerja perbankan di Provinsi Lampung mengalami peningkatan. Indikator kinerja perbankan seperti aset, penghimpunan dana masyarakat (DPK), penyaluran kredit maupun kualitasnya menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan lalu. Namun, indikator kinerja BPR secara umum masih menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2008. Hal ini diakibatkan oleh pencabutan izin salah satu BPR oleh BI pada Maret 2009 lalu, sehingga mengurangi nilai indikator kinerja BPR secara agregat.

Total aset perbankan di Lampung mencapai Rp23,63 triliun atau meningkat sebesar 6,67% baik secara triwulanan maupun tahunan. Berdasarkan porsinya, aset perbankan di Lampung masih dikuasai oleh aset Bank Umum, yaitu dengan pangsa mencapai 87,78%. Pada periode ini, baik Bank Umum maupun BPR sama-sama mencatat pertumbuhan aset secara triwulanan. Aset Bank Umum tumbuh sebesar 6,54% (qtq), sedangkan aset BPR mengalami pertumbuhan 7,58% (qtq).

Penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan mencapai Rp15,77 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan sebesar 2,79% (q tq) dan 11,91% (yoy). DPK perbankan masih didominasi oleh tabungan dengan nilai mencapai Rp7,13 triliun atau dengan porsi sebesar 45,21%. Tabungan mengalami pertumbuhan sebesar 4,80% (qtq) dan 6,97% (yoy), sedangkan Giro mengalami penurunan sebesar 5,71% (qtq), namun secara tahunan tetap mencatat pertumbuhan sebesar 20,89% (yoy). Penurunan Giro secara triwulanan disinyalir sebagai akibat dari peningkatan realisasi belanja pemerintah pada triwulan laporan. Sementara itu, simpanan berjangka mengalami pertumbuhan 4,99% (q to q) atau 14,20% (yoy).

Sama halnya dengan aset, DPK perbankan di Lampung juga dikuasai oleh penghimpunan dana oleh Bank Umum yang nilainya mencapai Rp13,98 triliun atau dengan porsi sebesar 88,61%. Namun demikian, DPK BPR masih mencatat pertumbuhan sebesar 15,19% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 3.1
Aset Perbankan

No	Uraian	Trw III-2008	Trw II-2009	Trw III- 2009		
				Posisi	Pangsa	qtq %
A	Jenis Bank	22,148.8	22,149.8	23,626.1	100,00%	6.7%
1	Bank Umum	17,953.74	19,465.9	20,738.76	87.8%	6.5%
2	BPR	4,195.1	2,683.9	2,887.4	12.2%	7.6%
B	Jenis Usaha Bank	22,148.8	22,149.8	23,626.1	100,00%	6.7%
1	Konvensional	21,735.9	21,602.4	23,028.3	97.5%	6.6%
2	Syariah	412.9	547.4	597.8	2.5%	9.2%

Sumber: LBU dan LBUS

Jika diamati berdasarkan jenis usaha bank, baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah mengalami pertumbuhan DPK. Bank Konvensional mencatat pertumbuhan DPK sebesar 2,59%(qtq) dan 11,18%(yoy), sedangkan Bank Syariah mencatat pertumbuhan DPK sebesar 10,66%(qtq) dan 48,41%(yoy). Pertumbuhan DPK tersebut menunjukkan bahwa baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah telah mampu memberikan jasa pelayanan yang lebih baik kepada nasabah melalui diversifikasi produknya, sehingga kepercayaan nasabah dalam menempatkan dananya pada perbankan semakin besar.

Tabel 3.2
Perkembangan DPK Perbankan

No	Uraian	Trw III-2008	Trw II-2009	Trw III-2009		
				Posisi	Pangsa	qtq %
A	Jenis Bank	14,095.80	15,346.26	15,774.00	100.00%	2.79%
1	Bank Umum	11,612.25	13,186.26	13,977.07	88.61%	6.00%
2	BPR	2,483.55	1,560.00	1,796.93	11.39%	15.19%
B	Jenis Usaha Bank	14,095.80	15,346.26	15,774.00	100.00%	2.79%
1	Konvensional	13,820.31	14,976.77	15,365.13	97.41%	2.59%
2	Syariah	275.49	369.49	408.86	2.59%	10.66%
C	Jenis Simpanan	14,095.80	15,346.26	15,774.00	100.00%	2.79%
1	Giro	2,371.75	3,040.87	2,867.17	18.18%	-5.71%
2	Tabungan	6,666.25	6,804.34	7,130.88	45.21%	4.80%
3	Deposito	5,057.80	5,501.04	5,775.95	36.62%	5.00%

Sumber: LBU dan LBUS

Seiring dengan peningkatan pada penghimpunan dananya, penyaluran kredit juga mengalami kenaikan. Kredit perbankan mencapai Rp17,97 triliun atau tumbuh sebesar 3,46% (qtq) dan 6,50% (yoy). Kredit oleh Bank Umum masih mendominasi penyaluran kredit perbankan di Lampung, yaitu dengan porsi mencapai 86,83%, sedangkan porsi kredit oleh BPR baru mencapai 13,17%. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit

modal kerja mendominasi penyaluran kredit perbankan pada triwulan III-2009 dengan pangsa mencapai 49,63%. Secara triwulanan, baik kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 1,86% (qtq), 4,86% (qtq), dan 5,18% (qtq).

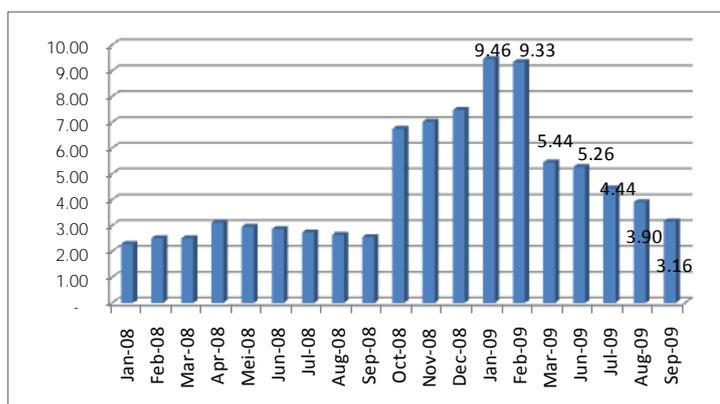
Tabel 3.3
Perkembangan Kredit Perbankan

Uraian	Trw III-2008	Trw II-2009	Trw III-2009		
			Posisi	Pangsa	qtq %
Jenis Bank	16,873.41	17,369.63	17,970.88	100.00%	3.46%
Bank Umum	13,317.79	15,122.96	15,604.33	86.83%	3.18%
BPR	3,555.62	2,246.67	2,366.56	13.17%	5.34%
Jenis Penggunaan	16,873.41	17,369.63	17,970.87	100.00%	3.46%
Modal Kerja	8,957.30	8,756.15	8,919.30	49.63%	1.86%
Investasi	2,243.19	2,554.62	2,678.85	14.91%	4.86%
Konsumsi	5,672.91	6,058.86	6,372.72	35.46%	5.18%

Sumber: LBU dan LBUS

Sementara itu, seiring dengan penyaluran kredit yang mengalami pertumbuhan pada triwulan III-2009, kualitas kredit juga membaik. NPL perbankan tercatat sebesar 3,62% atau mengalami penurunan dibandingkan NPL pada triwulan II-2009 sebesar 5,26%.

Grafik 3.1
NPL Perbankan

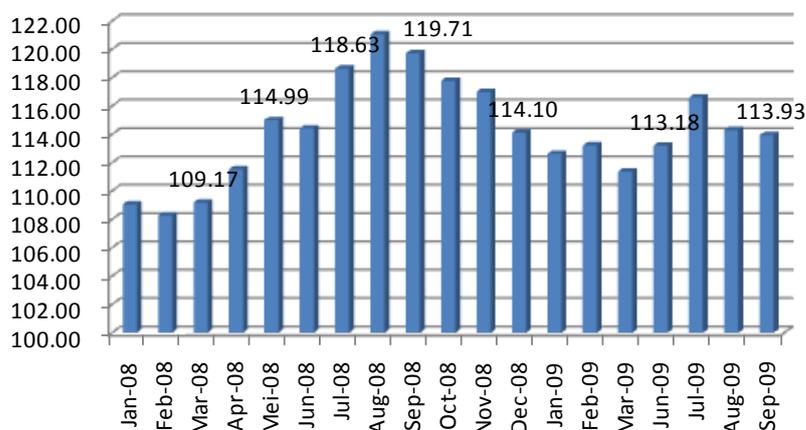


Sumber: LBU dan LBUS

Tingkat intermediasi perbankan yang tercermin dari rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) mengalami sedikit peningkatan pada triwulan laporan. *Loan to deposit ratio* (LDR) perbankan tercatat sebesar 113,93%, meningkat dibandingkan LDR triwulan sebelumnya yang mencapai 113,18%. Namun, LDR pada periode ini masih lebih rendah dibandingkan LDR pada periode yang sama tahun 2008 (119,71%). Nilai LDR yang berada diatas 100%, menandakan bahwa dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk DPK telah disalurkan semuanya dalam bentuk kredit, bahkan kekurangannya dipenuhi dengan penghimpunan dana lain diluar DPK.

Bila melihat berdasarkan jenis bank, terlihat bahwa LDR Bank Umum pada triwulan III-2009 masih berada jauh dibawah LDR BPR. LDR Bank Umum mencapai 111,64%, meningkat dibandingkan triwulan II-2009 yang tercatat sebesar 109,70%, namun menurun apabila dibandingkan triwulan III-2008 yang mencapai 114,69%. Sementara itu, LDR Bank Syariah mencapai 131,70%, menurun dibandingkan triwulan III-2008 (143,17%) maupun triwulan II-2009 (144,02%).

Grafik 3.2
LDR Perbankan di Lampung



Sumber: LBU dan LBUS

2. BANK UMUM

2.1. Kelembagaan Bank Umum

Sampai dengan triwulan III-2009, tercatat sebanyak 30 (tiga puluh) Bank Umum yang beroperasi di wilayah kerja Bank Indonesia Bandar Lampung. Jumlah tersebut terdiri dari 1 (satu) Bank Pembangunan Daerah; 4 (empat) Bank Persero; dan 25 (dua puluh lima) Bank Umum Swasta Nasional dengan 4 (empat) diantaranya beroperasi secara syariah; dan 1 (satu) bank konvensional yang memiliki kantor cabang Syariah. Sementara itu, hingga bulan September 2009, Kantor Cabang Bank Umum di Provinsi Lampung tercatat sebanyak 46 kantor cabang, dimana sebanyak 76,09% atau 35 kantor cabang berlokasi di Kota Bandar Lampung. Dengan 46 kantor cabang yang tersebar di Provinsi Lampung, jumlah jaringan ATM yang tersedia mencapai 274 buah yang sebagian besar (70,07%) tersebar di Kota Bandar Lampung (192 buah).

Tabel 3.4

Jumlah Kantor dan ATM Bank Umum di Provinsi Lampung per September 2009

No.	Lokasi	KP	KC	KCP	KK	KU	PP	KM	ATM
1	Bandar Lampung	1	35	43	34	13	27	4	192
2	Metro	0	2	13	5	4	5	0	18
3	Lampung Tengah	0	2	10	7	16	2	0	20
4	Lampung Selatan	0	1	10	8	11	1	0	13
5	Lampung Utara	0	4	9	7	6	1	0	14
6	Lampung Timur	0	0	4	3	10	1	1	1
7	Lampung Barat	0	0	5	4	4	1	0	2
8	Tanggamus	0	1	11	8	14	1	0	8
9	Tulangbawang	0	0	8	4	5	0	1	5
10	Way Kanan	0	0	1	2	3	0	0	0
11	Pringsewu	0	0	0	0	1	0	0	0
12	Pesawaran	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Mesuji	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Tulangbawang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	46	114	82	87	39	6	274

Sumber: LBU dan LBUS

2.2 Perkembangan Aset Bank Umum

Pada triwulan III-2009, aset Bank Umum mencapai Rp20,74 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 6,54% (qtq) dan 15,51% (yoy). Aset Bank Umum Konvensional masih mendominasi aset Bank Umum di Provinsi Lampung, yaitu dengan porsi sebesar 97,40% atau mencapai Rp20,20 triliun. Sementara itu, aset Bank Umum

Syariah hanya mencapai Rp538,95 miliar atau hanya memiliki porsi sebesar 2,60%. Namun demikian, secara tahunan aset Bank Umum Syariah meningkat hingga sebesar 47,34% (yoy).

Tabel 3.5
Indikator Bank Umum

No	Uraian	Trw III-2008	Trw II-2009	Trw III- 2009		
				Posisi	Pangsa	qtq %
A	Aset	17,953.74	19,465.92	20,738.76		
B	Pendanaan	12,596.05	14,735.13	15,144.33	100.0%	2.78%
1	Dana Pihak Ketiga	11,612.25	13,786.26	13,977.07	93.6%	1.38%
2	Kewajiban kepada bank lain	604.52	576.30	796.33	3.9%	38.18%
3	Pinjaman yang Diterima & Setoran Jaminan	0	0	0	0	
4	Surat Berharga yang Diterbitkan	379.28	372.58	370.93	2.5%	-0.44%
C	Aktiva Produktif	14,343.63	16,168.79	16,610.48	100.0%	2.73%
1	Kredit yang Diberikan	13,317.79	15,122.96	15,604.33	93.5%	3.18%
2	Penempatan pada Bank Indonesia (SBI)	0	40.00	40.00	0.2%	0.01%
3	Surat Berharga dan Tagihan Lainnya	34.35	35.35	59.92	0.2%	69.49%
4	Penempatan pada bank lain	991.49	970.49	906.23	6.0%	-6.62%
D	Alat Likuid	982.66	663.56	1192.78	100.0%	79.75%
1	Kas	969.84	649.08	1172.74	97.8%	80.68%
2	Giro pada bank lain	12.82	14.48	20.04	2.2%	38.36%
3	Tabungan pada bank lain	0	0	0	0.0%	
E	Laba / Rugi	485.47	107.65	617.60	100.0%	473.69%
F	Akt.Produktif/Total Aset (%) = (C)/(A)	79.9%	83.1%	80.1%		
G	Rasio Likuiditas (%) = (D)/(B)	7.8%	4.5%	7.9%		
H	Rasio Rentabilitas (%) = (E)/(A)	2.7%	0.6%	3.0%		
I	LDR (%) = (C1)/(B1)	114.7%	109.7%	111.6%		

Sumber: LBU dan LBUS

Mayoritas aktiva produktif (*earning asset*) Bank Umum adalah dalam bentuk kredit, yaitu dengan pangsa sebesar 93,5% atau mencapai Rp15,60 triliun. Aktiva produktif lainnya adalah dalam bentuk penempatan pada bank lain, yaitu mencapai Rp906,23 miliar atau memiliki porsi sebesar 6,0%. Namun, bila dibandingkan triwulan II-2009, penempatan dana pada bank lain di triwulan III-2009 menurun sebesar 6,62% (qtq). Sementara itu, aktiva produktif dalam bentuk SBI mencapai Rp40 miliar atau tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan II-2009. Sedangkan penanaman dana dalam bentuk surat berharga dan tagihan lainnya mencapai Rp59,92 miliar atau mengalami peningkatan hingga mencapai 69,49% (qtq).

Rasio likuiditas dana Bank Umum pada triwulan III-2009 mencapai 7,9%, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2009 yang hanya mencapai 4,5%. Sementara itu, jumlah laba yang berhasil dibukukan mencapai Rp617,60 miliar, sehingga rasio rentabilitas Bank Umum meningkat dari sebelumnya 0,6% menjadi 3,0%.

2.3. Perkembangan Dana Masyarakat Bank Umum

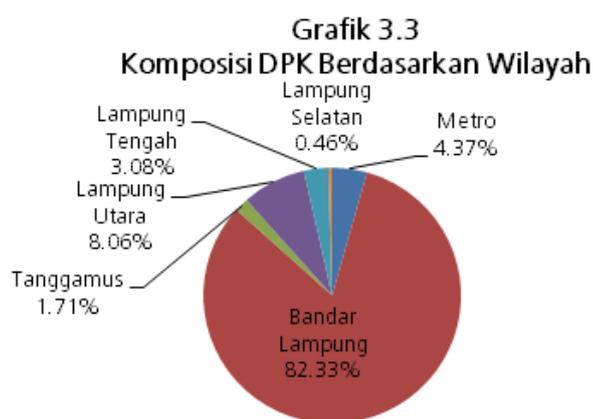
Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Lampung semakin meningkat. Hal ini terlihat dari penghimpunan dana yang berhasil diperoleh Bank Umum di Lampung pada triwulan III-2009 yang mencapai Rp13,98 triliun atau tumbuh sebesar 1,38% (qtq) dan 20,36% (yoy). Sama halnya dengan Aset, DPK pada Bank Umum juga di dominasi oleh DPK pada Bank Umum Konvensional dengan porsi mencapai 97,25%. Berdasarkan jenisnya, DPK Bank Umum masih didominasi oleh Tabungan, yaitu dengan porsi sebesar 48,66% atau mencapai Rp6,80 triliun.

Sementara itu, berdasarkan wilayah penghimpunannya, perolehan DPK terbesar terjadi di Kota Bandar Lampung, yaitu mencapai Rp11,51 triliun atau dengan porsi 82,33%. Selanjutnya, di Kabupaten Lampung Utara, dimana DPK yang berhasil dihimpun mencapai Rp1,13 triliun atau dengan porsi sebesar 8,06%.

Tabel 3.6
DPK Bank Umum

No	Uraian	Trw III 2008	Trw II 2009	Trw III-2009			
				Posisi	Pangsa	qtq %	yoy %
A	Jenis Simpanan	11,612.25	13,786.26	13,977.07	100.0%	1.38%	20.36%
1	Giro	2,371.75	3,040.87	2,867.17	20.51%	-5.71%	20.89%
2	Tabungan	6,067.09	6,497.05	6,801.56	48.66%	4.69%	12.11%
3	Deposito	3,173.41	4,248.34	4,308.34	30.82%	1.41%	35.76%
B	Jenis Usaha Bank	11,612.25	13,786.26	13,977.07	100.0%	1.38%	20.36%
1	Konvensional	11,363.83	13,440.01	13,592.48	97.25%	1.13%	19.61%
2	Syariah	248.42	346.26	384.59	2.75%	11.07%	54.82%

Sumber : LBU dan LBUS



Sumber : LBU dan LBUS

2.4. Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum

Kredit Bank Umum pada triwulan III-2009 mengalami peningkatan baik secara triwulanan maupun tahunan. Kredit yang tersalurkan mencapai Rp15,60 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,18% (qtq) dan 17,17% (yoy). Berdasarkan penggunaannya, penyaluran kredit masih didominasi oleh kredit modal kerja, yaitu dengan nilai mencapai Rp8,07 triliun atau dengan porsi mencapai 51,69%. Kredit modal kerja tumbuh sebesar 2,23% (qtq) dan 9,39% (yoy). Sementara itu, kredit konsumsi yang memiliki porsi sebesar 31,41% dari total kredit yang disalurkan Bank Umum, mengalami pertumbuhan sebesar 3,83% (qtq) dan 19,26% (yoy).

Selaras dengan penghimpunan dananya, penyaluran kredit oleh Bank Umum Konvensional mendominasi penyaluran kredit Bank Umum di Lampung. Kredit oleh Bank Umum Konvensional mencapai Rp15,09 triliun atau dengan porsi mencapai 96,73%. Sementara itu, penyaluran pembiayaan oleh BUS mengalami peningkatan hingga 50,20% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar pembiayaan BUS terus meningkat. Porsi penyaluran pembiayaan oleh BUS pada triwulan III-2009 mencapai 3,27%, lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2009 yang baru mencapai 3,08%.

Bila melihat penyaluran kredit menurut sektor ekonomi, kredit kepada sektor perdagangan masih mendominasi penyaluran kredit Bank Umum di Lampung dengan porsi sebesar 34,89% atau mencapai Rp5,44 triliun. Tingginya penyaluran kredit kepada sektor perdagangan menunjukkan bahwa sektor tersebut masih menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Lampung yang potensial untuk dibiayai perbankan. Sementara itu, kredit yang tersalurkan kepada sektor pertanian mencapai Rp2,35 triliun atau dengan porsi sebesar 15,09%.

Berdasarkan jenis bank yang menyalurkan, ternyata terdapat perbedaan orientasi penyaluran kredit yang terjadi antara Bank Umum Konvensional (BUK) dengan Bank Umum Syariah (BUS). Penyaluran kredit terbesar pada BUK diperuntukkan bagi sektor perdagangan, sedangkan penyaluran pembiayaan terbesar pada BUS diperuntukkan bagi sektor jasa umum, yaitu dengan porsi mencapai 32,09% dari total kredit yang disalurkan BUS.

Tabel 3.7
Kredit Bank Umum

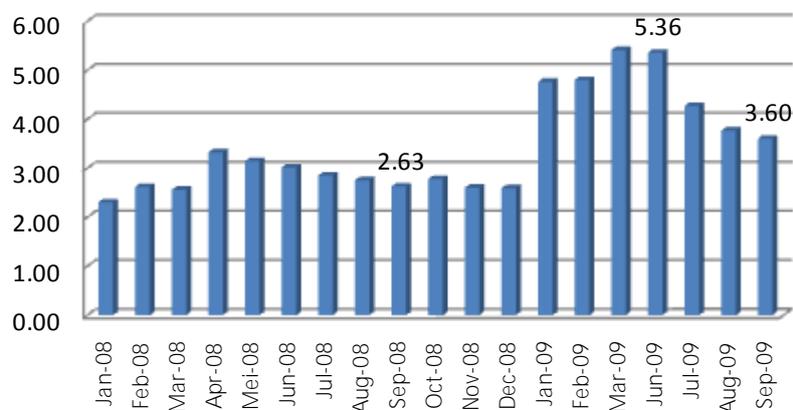
No	Uraian	Trw III 2008	Trw II 2009	Trw III-2009		
				Posisi	Pangsa	qtq %
A	Jenis Usaha Bank	13,317.79	15,122.96	15,604.33	100.0%	3.18%
1	Konvensional	12,978.15	14,657.09	15,094.17	96.7%	2.98%
2	Syariah	339.64	465.87	510.15	3.3%	9.50%
B	Jenis Penggunaan	13,317.79	15,122.96	15,604.33	100.0%	3.18%
1	Modal Kerja	7,373.85	7,890.53	8,066.10	51.7%	2.23%
2	Investasi	1,833.70	2,511.35	2,636.18	16.9%	4.97%
3	Konsumsi	4,110.24	4,721.08	4,902.04	31.4%	3.83%
C	Sektor Ekonomi	13,317.79	15,122.96	15,604.33	100.0%	3.18%
1	Pertanian	1,146.54	2,163.49	2,354.88	15.1%	8.85%
2	Pertambangan	10.11	18.69	28.07	0.2%	50.14%
3	Perindustrian	1,304.73	1,610.33	1,546.35	9.9%	-3.97%
4	Listrik, Gas dan Air	0.09	7.82	15.32	0.1%	96.03%
5	Konstruksi	343.44	359.96	379.24	2.4%	5.36%
6	Perdagangan, Restoran & Hotel	5,567.80	5,318.96	5,443.70	34.9%	2.35%
7	Pengangkutan, Pergudangan	280.05	289.95	314.15	2.0%	8.34%
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	429.16	474.06	466.39	3.0%	-1.62%
9	Jasa-jasa Sosial Masyarakat	103.28	126.45	127.43	0.8%	0.78%
10	Lain-lain	4,132.58	4,753.26	4,928.80	31.6%	3.69%

Sumber: LBU dan LBUS

2.5. Kualitas Kredit

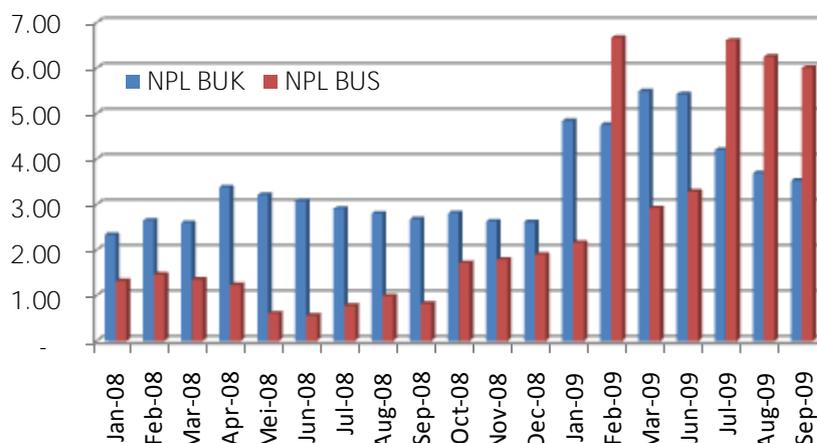
Kualitas kredit Bank Umum yang terindikasi melalui NPL (*Non Performing Loan*) terus mengalami perbaikan. NPL Bank Umum pada triwulan III-2009 mencapai 3,60% atau lebih rendah dibandingkan NPL yang terjadi pada triwulan II-2009 (5,36%). Namun, masih lebih tinggi dibandingkan NPL yang terjadi pada triwulan III-2008 yang mencapai 2,63%.

Grafik 3.4
Perkembangan NPL Bank Umum



Sumber: LBU dan LBUS

Grafik 3.5
Perkembangan NPL Bank Umum Konvensional dan Syariah



Sumber: LBU dan LBUS

Berdasarkan jenis bank, NPL pada Bank Umum Syariah lebih tinggi dibandingkan NPL pada Bank Umum Konvensional. NPL Bank Umum Konvensional pada triwulan III-2009 tercatat sebesar 3,52%, sedangkan NPL pada Bank Umum Syariah mencapai 6,00%. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan pertumbuhan pembiayaan yang dilakukannya, kualitas pembiayaan yang terjadi justru mengalami penurunan. Risiko pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah semakin meningkat. Hal ini terlihat dari cadangan risiko kerugian (PPAP) pada triwulan laporan yang mencapai Rp19,13 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan PPAP yang terjadi pada triwulan II-2009 sebesar Rp2,99 miliar.

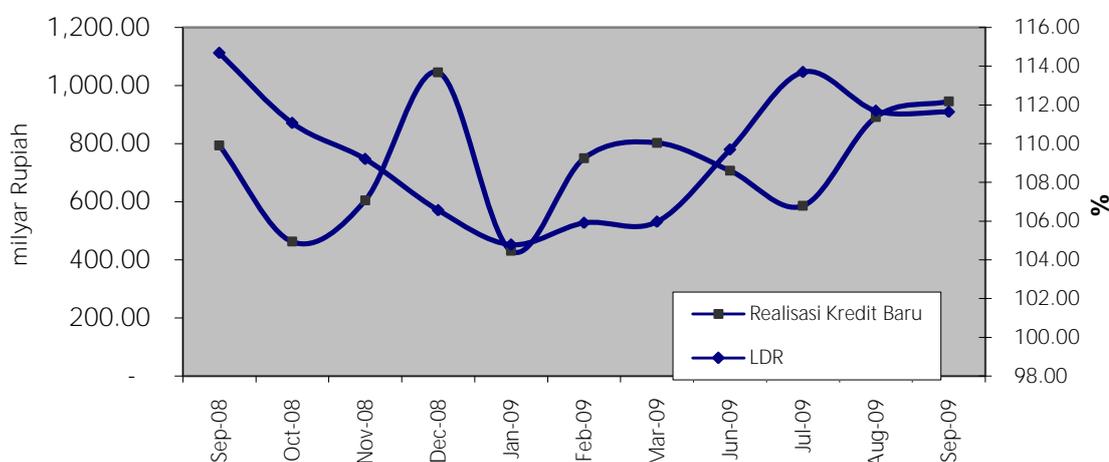
2.6 Intermediasi Perbankan Bank Umum: LDR, Kredit Baru dan Suku Bunga

Kegiatan intermediasi Bank Umum di Provinsi Lampung yang terindikasi melalui LDR (*Loan to Deposit Ratio*) mengalami peningkatan. Secara triwulanan, LDR bank umum meningkat dari 109,70% pada triwulan II-2009 menjadi 111,6% pada triwulan III-2009. Peningkatan LDR ini ditopang oleh kenaikan LDR pada Bank Umum Konvensional. LDR BUK pada triwulan III-2009 mencapai 111,05%, meningkat dibandingkan LDR triwulan II-2009 sebesar 109,1%. Sedangkan FDR pada BUS mengalami penurunan dari sebelumnya 134,55% menjadi 132,65% pada triwulan III-2009.

Sementara itu, penurunan BI Rate sebesar 225 bps sejak awal tahun 2009 mulai direspon oleh penurunan suku bunga perbankan. Ditambah adanya kesepakatan 15 Bank besar nasional yang difasilitasi oleh BI pada Agustus 2009 lalu, diprediksi mampu memicu penurunan suku bunga kredit perbankan secara perlahan. Suku bunga simpanan Bank Umum pada triwulan III-2009 rata-rata sebesar 2,62% atau menurun dibandingkan triwulan II-2009 yang masih bertahan pada kisaran 2,75%. Penurunan *cost of fund* ini direspon secara langsung oleh penurunan suku bunga kredit bank umum yang pada periode ini mencapai 14,54% atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan II-2009 sebesar 14,58%. Namun, imbal hasil pembiayaan oleh Bank Umum Syariah masih bertahan tinggi, yaitu 20,09% atau mengalami kenaikan dibandingkan Triwulan II-2009 sebesar 19,54%.

Seiring dengan meningkatnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Umum, realisasi kredit baru juga mengalami peningkatan. Selain itu, mulai menurunnya suku bunga pinjaman juga diprediksi sebagai pemicu meningkatnya *demand* kredit oleh masyarakat. Realisasi kredit baru yang terjadi pada Bank Umum di triwulan III-2009 mencapai Rp945,76 miliar atau mengalami peningkatan 33,78% (qtq) dan 19,10% (yoy).

Grafik 3.6
Perkembangan LDR dan Realisasi Kredit Baru

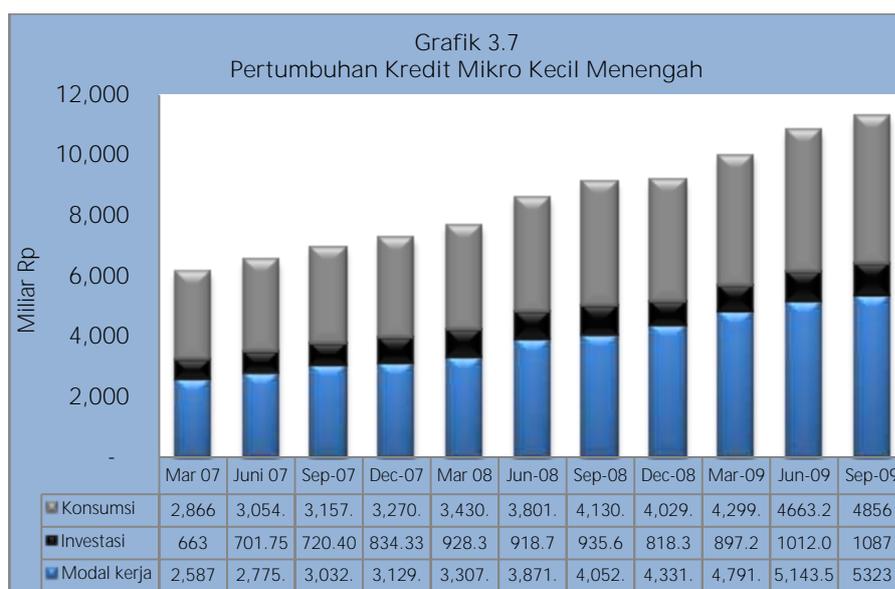


Sumber: LBU dan LBUS

2.7. Kredit Mikro Kecil dan Menengah (MKM)

Penyaluran kredit Bank Umum kepada sektor MKM mencapai Rp11,27 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 3,95% (qtq) dan 23,81% (yoy). Berdasarkan penggunaannya, mayoritas kredit UMKM yang disalurkan Bank Umum merupakan kredit modal kerja, yaitu dengan nilai mencapai Rp5,23 triliun. Sedangkan penyaluran kredit konsumsi hanya mencapai Rp4,86 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit terendah terjadi pada kredit investasi yang hanya mencapai Rp1,08 triliun.

Penyaluran kredit MKM oleh Bank Umum hingga triwulan III-2009 masih didominasi oleh Bank Umum Konvensional, yaitu dengan nilai mencapai Rp10,80 triliun. Walaupun demikian, penyaluran kredit UMKM oleh Bank Umum Syariah terus menunjukkan peningkatan. Pangsa kredit MKM Bank Umum Syariah yang sebelumnya hanya mencapai 3,94% pada triwulan II-2009, kini menjadi 4,17%. Hal ini menunjukkan bahwa peran Bank Umum Syariah dalam membiayai sektor UMKM di Provinsi Lampung semakin meningkat.

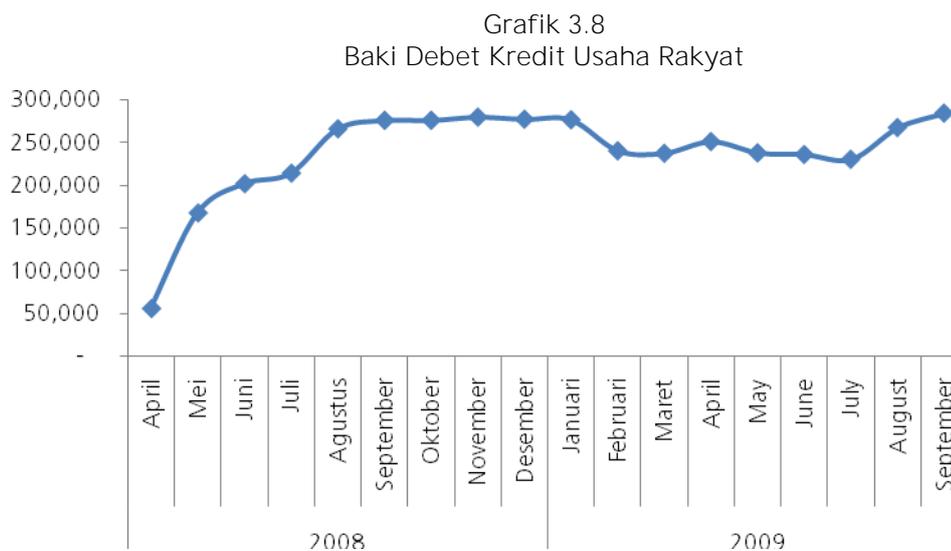


Sumber: LBU dan LBUS

Pada triwulan III-2009, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami peningkatan. Pada triwulan II-2009, baki debit KUR tercatat sejumlah Rp237,05 miliar, sedangkan pada periode ini baki debit mencapai Rp285,57 miliar. Dari dana KUR yang tersalurkan tersebut, sebesar 92,98% merupakan kredit modal kerja. Sementara itu, bila melihat berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR mayoritas ditujukan kepada sektor pertanian, perburuan, dan sarana pertanian dengan baki debit mencapai

Rp181,29 Miliar atau dengan porsi sebesar 63,48%, kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai Rp88,94 miliar atau dengan porsi 31,14%.

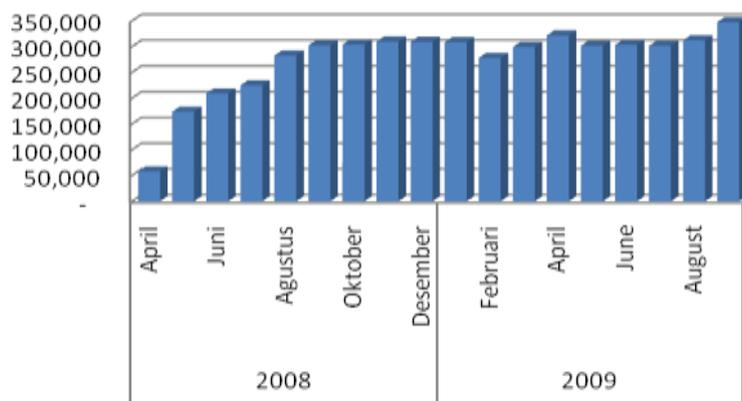
Meningkatnya baki debit KUR pada triwulan III-2009 tidak diiringi oleh peningkatan pada jumlah debitur KUR. Bila dibandingkan debitur KUR pada triwulan II-2009, jumlah debitur pada triwulan III-2009 mengalami penurunan sebanyak 2.740 debitur menjadi 21.942 debitur.



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Plafon KUR mencapai Rp347,41 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 14,61% dibandingkan triwulan II-2009 yang mencapai Rp303,13 miliar. Pertumbuhan plafon tertinggi terjadi pada KUR untuk sektor pertanian. Dari sebelumnya Rp135,78 miliar meningkat menjadi Rp187,89 miliar pada triwulan III-2009. Walaupun demikian, *undisbursement loan* (kelonggaran tarik) KUR mengalami penurunan sebesar Rp4,24 miliar menjadi Rp61,84 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan sektor UMKM terhadap KUR mengalami peningkatan.

Grafik 3.9
Plafond Kredit Usaha Rakyat



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Mengingat peran usaha mikro, kecil dan menengah cukup dominan dalam membantu pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, maka Bank Indonesia terus berusaha untuk mengembangkan kinerja UMKM di Provinsi Lampung. Kegiatan yang telah dilakukan Bank Indonesia Bandar Lampung dalam menggerakkan UMKM di tahun 2009 ini adalah :

- Melakukan pelatihan kepada tenaga pengelola lembaga UPP (Unit Pelayanan Pengembangan) Perikanan Provinsi Lampung, pengurus dan anggota POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Perikanan) Provinsi Lampung serta kepada pembudidaya perikanan Provinsi Lampung, melalui kerjasama Bank Indonesia Bandar Lampung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Materi pelatihan yang dibahas adalah mengenai tata cara mengakses permodalan kepada lembaga keuangan serta sosialisasi kredit program pemerintah untuk UMKM.
- Pelatihan kepada pelaku usaha UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mengenai tata cara mengakses permodalan kepada lembaga keuangan bank.
- Bantuan teknis penyediaan informasi yang meliputi : (1) Kegiatan diskusi Ketentuan Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanah Sebagai Agunan Kredit di Bank, (2) Sosialisasi Pengenalan Akses Perbankan Kepada Petani, dan (3) FGD Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi Pertanian Secara Holistik.

-
-
- d. Pengembangan komoditas unggulan Lampung yaitu ikan teri di Pulau Pasaran dan rumput laut di Kalianda-Lampung Selatan dengan konsep klaster.

3. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Indikator kinerja BPR triwulan III-2009 menunjukkan perbaikan. Aset tumbuh sebesar 7,58% (qtq), kredit tumbuh 5,34% (qtq), DPK tumbuh 15,19% (qtq), sedangkan laba yang berhasil dibukukan mencapai Rp125,23 miliar atau tumbuh hingga mencapai 58,84% (qtq). Namun, apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008, indikator kinerja BPR mengalami penurunan yang cukup tajam. Aset turun sebesar 32,58% (yoy), kredit menurun 33,44% (yoy), DPK menurun sebesar 27,65% (yoy), sedangkan laba tahun berjalan menurun 14,51% (yoy). Hal ini terjadi akibat pencabutan izin usaha salah satu BPR oleh BI pada Maret lalu.

Secara nasional, aset BPR Lampung per Agustus 2009 memiliki porsi sebesar 8,0% terhadap aset seluruh BPR di Indonesia. Secara nominal, aset BPR Lampung mencapai Rp2,78 triliun, menduduki peringkat ke-4 se-Indonesia, berada 1 peringkat dibawah aset BPR di Provinsi Jawa Timur. Namun, aset BPR Provinsi Lampung masih merupakan yang terbesar di Sumatera.

Per September 2009, jumlah BPR yang beroperasi di Lampung mencapai 28 BPR. Sejumlah 28 BPR tersebut berkantor pusat di Bandar Lampung (12 BPR), Lampung Tengah (4 BPR), Metro (3 BPR), Lampung Selatan (3 BPR), Lampung Timur (3 BPR), Lampung Utara (2 BPR), dan Tanggamus (2 BPR). Diantara 28 BPR tersebut, sebanyak 23 BPR beroperasi dengan prinsip konvensional, dan 5 BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Pada triwulan III-2009, aset BPR di Lampung mencapai Rp2,89 triliun. Secara tahunan, aset mengalami penurunan sebesar 32,58% (yoy), namun secara triwulanan masih mencatat pertumbuhan sebesar 7,58% (qtq). Sama halnya dengan Bank Umum, aset BPR konvensional lebih mendominasi dibandingkan aset BPR Syariah. Aset BPR konvensional pada triwulan III-2009 mencapai Rp2,83 triliun, sedangkan aset BPR Syariah mencapai Rp58,84 miliar. Walaupun demikian, aset BPR Syariah terus mengalami peningkatan. Dibandingkan periode yang sama tahun 2008, aset BPR Syariah tumbuh sebesar 24,83% (yoy). Sedangkan bila dibandingkan triwulan II-2009, aset BPR Syariah mengalami pertumbuhan 12,93% (qtq).

Setelah pencabutan izin usaha salah satu BPR oleh Bank Indonesia pada Maret 2009 lalu, beberapa indikator kinerja BPR termasuk DPK merosot tajam. Walaupun

demikian, secara perlahan DPK BPR mulai menunjukkan peningkatan. Bila dibandingkan triwulan II-2009, DPK BPR mampu mencatat pertumbuhan sebesar 15,19% (qtq). Produk unggulan dalam penghimpunan dana masyarakat oleh BPR masih mengandalkan simpanan berjangka yang jumlahnya mencapai Rp1,47 triliun atau sebesar 81,67% dari total dana yang berhasil dihimpun. Hal ini diakibatkan oleh tingkat pengembalian dana simpanan berjangka pada BPR yang lebih tinggi, sehingga minat masyarakat untuk menempatkan dananya pada BPR juga semakin besar. Selain itu, keikutsertaan BPR pada LPS semakin memberikan kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dananya.

Bila memperhatikan berdasarkan jenis usaha bank, DPK pada BPR konvensional mendominasi DPK BPR, yaitu dengan porsi sebesar 98,65%. DPK BPR Konvensional mencapai Rp1,77 triliun, mengalami peningkatan sebesar 15,35% dibandingkan triwulan lalu, namun masih lebih rendah dibandingkan DPK pada periode yang sama tahun 2008.

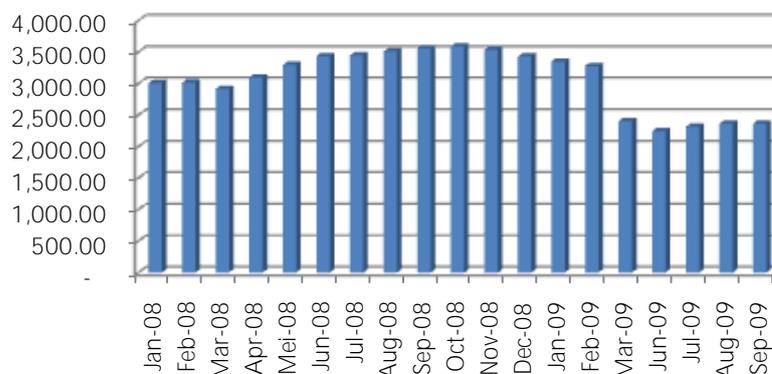
Tabel 3.8
Asset & DPK BPR

No	Uraian	Trw III 2008	Trw II 2009	Posisi	Trw III-2009	
					qtq %	yoy %
A	Asset	4,195.09	2,683.91	2,887.37	7.58%	-31.17%
B	DPK	2,483.55	1,560.00	1,796.93	15.19%	-27.65%
1	Konvensional	2,456.48	1,536.77	1,772.66	15.35%	-27.84%
2	Syariah	27.07	23.23	24.27	4.47%	-10.35%
B	Jenis DPK	2,483.55	1,560.00	1,796.93	15.19%	-27.65%
1	Tabungan	599.15	307.29	329.32	7.17%	-45.04%
2	Simpanan Berjangka	1,884.40	1,252.71	1,467.60	17.15%	-22.12%

Sumber: LBU dan LBUS

Penyaluran kredit pada BPR di Lampung pada triwulan III-2009 mencapai Rp2,37 triliun atau mengalami penurunan sebesar 33,44% (yoy). Walaupun penyaluran kredit secara tahunan mengalami penurunan yang cukup besar, namun bila dibandingkan triwulan II-2009, kredit yang tersalurkan oleh BPR pada triwulan III-2009 tumbuh sebesar 5,34%(qtq).

Grafik 3.10
Perkembangan Kredit BPR
(dalam miliar Rp)



Sumber: LBU dan LBUS

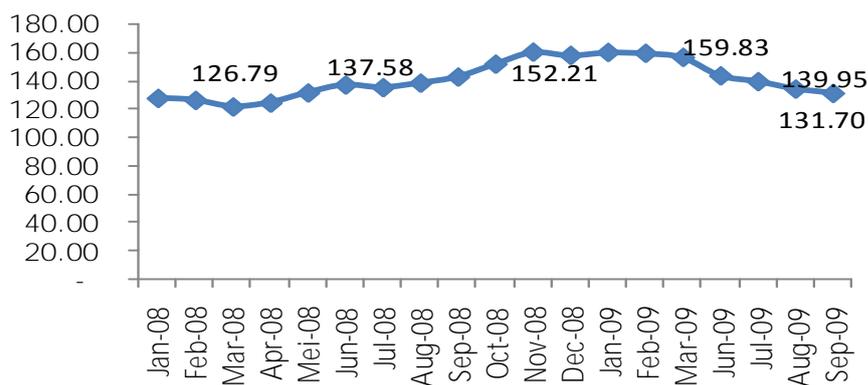
Penyaluran kredit BPR masih didominasi oleh jenis kredit konsumsi, yaitu dengan nilai mencapai Rp1,47 triliun atau dengan porsi sebesar 62,14% dari total kredit yang tersalurkan BPR. Secara triwulanan, kredit konsumsi pada triwulan III-2009 mengalami pertumbuhan sebesar 9,93% (qtq), namun secara tahunan, penyaluran kredit mengalami penurunan mencapai 5,89% (yoy). Sementara itu, kredit modal kerja dan kredit investasi yang tersalurkan masing-masing mencapai Rp853,20 miliar dan Rp42,67 miliar. Penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,43% (qtq) dan 1,37% (qtq).

Seiring dengan pertumbuhan penyaluran kreditnya, kualitas kredit BPR juga menunjukkan perbaikan. Hal ini terindikasi melalui nilai NPL BPR pada triwulan III-2009 yang mencapai 3,71%, menurun dibandingkan NPL triwulan II-2009 (4,62%). Bila memperhatikan berdasarkan jenis usaha bank, NPL pada BPR Syariah jauh lebih tinggi dibandingkan BPR Konvensional. NPL BPR Syariah pada triwulan III-2009 mencapai 12,58% atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,53%.

Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR di Provinsi Lampung tercatat sebesar 131,70%, mengalami penurunan dibandingkan triwulan II-2009 yang mencapai 144,02%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan DPK. Sementara itu, pada periode ini BPR di Lampung mampu membukukan laba sebesar Rp125,23 miliar. Perolehan laba yang diterima pada periode ini lebih tinggi atau tumbuh sebesar 58,84%(qtq). Laba yang berhasil diperoleh BPR ditopang oleh laba

tahun berjalan yang berhasil diperoleh BPR konvensional yang mencapai Rp126,26 miliar. Perolehan laba ini, diantaranya diakibatkan oleh kemampuan BPR konvensional dalam menurunkan rasio BO/PO nya dari 72,80% pada triwulan II-2009 menjadi 71,42% pada triwulan III-2009. Sementara itu, BPR Syariah membukukan kerugian sebesar Rp1,03 miliar.

Grafik 3.11
Perkembangan LDR BPR



Sumber: LBU dan LBUS

Dalam rangka mencegah tindak pidana perbankan yang dapat mengancam kegiatan intermediasi perbankan lainnya, maka Kantor Bank Indonesia Bandar Lampung berinisiatif untuk melakukan pelatihan kepada BPR se-Provinsi Lampung dengan tema "*Fraud Mitigation in Banking Institution*" (lihat boks).

Boks - Pencegahan *Fraud* Perbankan dengan Pendekatan *Moral Suasion* dan *Persuasif*

Akhir-akhir ini banyak pemberitaan di media massa terkait kasus *fraud* perbankan yang belum tuntas proses penyelesaiannya. Pemberitaan miring dibidang perbankan secara terus-menerus dapat mempengaruhi citra perbankan secara makro dalam menjalankan fungsi intermediasi. Terkait dengan hal tersebut, maka kredibilitas dan kinerja perbankan perlu untuk terus dijaga sehingga diperlukan tindakan yang bersifat *preventif* untuk mencegah kemungkinan terjadinya *moral hazard* yang merupakan pemicu terjadinya *fraud* di sektor perbankan.

Fraud dapat didefinisikan sebagai segala macam bentuk cara licik yang dapat direncanakan manusia, dan salah satunya dipilih untuk diterapkan secara individual, guna memperoleh keuntungan dari orang lain dengan cara memberi saran atau pemberangusan/pengintimidasian kebenaran yang meliputi kejutatan, tipu muslihat, kelicikan, atau penyembunyian, dan cara-cara lain yang tidak fair yang merugikan orang lain (Cambell Black, 1999)¹. Praktik *fraud* sangat beragam dan melibatkan berbagai pihak antara lain pemilik perusahaan, komisaris/direksi, dan pejabat/ karyawan bank.

Kasus *fraud* perbankan pernah terjadi di Lampung melalui kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pemilik salah satu BPR di Lampung sehingga mengancam kegiatan intermediasi perbankan yang lain. Untuk menindaklanjuti momentum pasca peristiwa kejahatan perbankan tersebut dan dalam rangka melakukan pencegahan, Kantor Bank Indonesia Bandar Lampung terus berupaya untuk memperkuat sistem pengawasan serta memperoleh komitmen integritas dari para pemilik dan direksi BPR se-Provinsi Lampung.

Mengingat pentingnya pengetahuan tentang *fraud* dalam rangka menjaga *good governance* perbankan, Kantor Bank Indonesia Bandar Lampung berinisiatif dan telah melaksanakan pelatihan dengan tema “Memahami Dan Mengatasi *Fraud* Di Bidang Perbankan (Fraud Mitigation In Banking Instituton)”. Pelatihan ini disampaikan dengan pendekatan moral suasion dan bersifat persuasif kepada peserta pelatihan yang terdiri dari Pemilik dan Direksi BPR-se-Lampung. Tujuan dari pendekatan tersebut adalah untuk menggugah kesadaran dari dalam diri individu terhadap pentingnya *fraud*

¹ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary* (U.S : West Publishing, Co, 1999)

mitigation dan mewujudkan komitmen bersama untuk melakukan mitigasi dan menghindari terjadinya *fraud*.

Pendekatan moral suasion yang diberikan secara preventif dinilai efektif untuk mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*, hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) faktor utama penyebab terjadinya *fraud* yang eksistensinya sangat tergantung pada kemauan individu yang dikenal dengan istilah *fraud triangle* yang meliputi *pressure, rationalization, and opportunity* (Montgomery et al, 2002)¹.

Materi yang diberikan pada pelatihan ini terdiri dari aspek teoritis dan praktis. Materi yang bersifat teoritis bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan *hardskill* dalam rangka menghindari *fraud* yang disampaikan oleh pembicara dari pakar kriminolog yang berasal dari kalangan akademisi, dan pakar Hukum Perbankan dari Direktorat Hukum Bank Indonesia. Selain itu materi yang bersifat praktis juga diberikan pada pelatihan ini sehingga dapat meningkatkan kompetensi *softskill* peserta dalam rangka menciptakan *good corporate governance* perbankan yang disampaikan oleh pembicara dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komite Nasional *Good Governance* Perbankan.

Metode penyampaian materi dilakukan melalui pemaparan secara keseluruhan materi yang diikuti dengan tanya jawab sehingga terwujud komunikasi dua arah. Kegiatan pelatihan juga dilengkapi dengan diskusi panel yang bertujuan agar peserta dapat lebih aktif dalam mengemukakan pendapat. Dalam rangka mewujudkan tekad bersama dalam memahami dan mengatasi *fraud* di bidang perbankan maka pada akhir kegiatan ditutup dengan penandatanganan "Pakta Integritas" yang merupakan simbol dari kesepakatan bersama antar perbankan Lampung untuk mewujudkan komitmen bersama dalam menjaga integritas pelaksanaan *good corporate governance* perbankan di wilayah kerja KBI Bandar Lampung yang disaksikan oleh Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung dan Ketua Komite Nasional *Good Governance* Perbankan.

²Jerry L. Turner et al, An Analysis Of The Fraud Triangle (Journal Of Research Rountable, 2003), pg.i

4. Perkembangan Bank Syariah

Seiring dengan peningkatan Aset, Pembiayaan, dan DPK, kualitas pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Lampung justru mengalami penurunan. Hal ini terindikasi melalui nilai NPF (*Non Performing Financing*) yang mengalami peningkatan dari sebelumnya 3,94% (triwulan II-2009) menjadi 6,51% pada triwulan III-2009.

Aset Bank Syariah mencapai Rp597,79 miliar atau tumbuh sebesar 44,8% (yoy) dan 9,20% (qtq). Secara tahunan, aset Bank Umum Syariah mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan BPR Syariah. Bank Umum Syariah tumbuh 47,3% (yoy), sedangkan aset BPR Syariah mengalami pertumbuhan 12,93% (yoy).

DPK Bank Syariah mencapai Rp408,86 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 48,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2008. DPK Bank Umum Syariah masih mencatat pertumbuhan sebesar 54,8% (yoy), sedangkan DPK BPR Syariah mengalami penurunan sebesar 10,3% (yoy). Sementara itu, pembiayaan pada Bank Syariah mencatat pertumbuhan sebesar 48,8% (yoy). Pertumbuhan pembiayaan ini ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan yang terjadi, baik pada Bank Umum Syariah maupun BPR Syariah yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 50,2% (yoy) dan 34,5% (yoy).

Aset, Pembiayaan, dan DPK perbankan syariah didominasi oleh Bank Umum Syariah, sedangkan porsi BPR Syariah sangat kecil. Hal ini wajar mengingat jumlah Bank Umum Syariah lebih banyak dibandingkan jumlah BPR Syariah yang hanya berjumlah 5 BPR. Walaupun demikian, *Non Performing Financing* (NPF) pada BPR Syariah jauh lebih tinggi dibandingkan Bank Umum Syariah. Pada triwulan III-2009, NPF BPR Syariah mencapai 12,58% atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II-2009 (11,53%). Sementara itu, NPF Bank Umum Syariah pada triwulan III-2009 mencapai 6,00% atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II-2009 (3,28%).

Seiring dengan peningkatan risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah, terlihat bahwa penyisihan cadangan aktiva produktif (PPAP) mengalami kenaikan. PPAP pada Bank Umum Syariah mencapai Rp19,13 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2009 yang hanya mencapai Rp2,99 miliar. Sementara itu, PPAP BPR Syariah mencapai Rp0,77 miliar, meningkat dibandingkan triwulan II-2009 (Rp0,67 miliar).

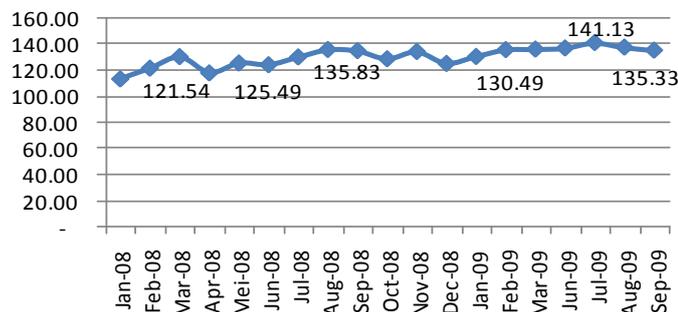
Tabel 3.9
Indikator Perbankan Syariah

No	Uraian	Trw III 2008	Trw II 2009	Trw III 2009			
				Posisi	Pangsa	yoy%	qtq %
A	Asset - Jenis Bank	412.91	547.44	597.79	100.0%	44.8%	9.20%
1	BUS	365.78	495.34	538.95	90.2%	47.3%	8.80%
2	BPRS	47.13	52.10	58.84	9.8%	24.8%	12.93%
B	DPK - Jenis Bank	275.49	369.49	408.86	100.0%	48.4%	10.66%
1	BUS	248.42	346.26	384.59	94.1%	54.8%	11.07%
2	BPRS	27.07	23.23	24.27	5.9%	-10.3%	4.47%
C	Pembiayaan - Jenis Bank	371.73	506.16	553.32	100.0%	48.8%	9.32%
1	BUS	339.64	465.87	510.15	92.2%	50.2%	9.50%
2	BPRS	32.09	40.28	43.17	7.8%	34.5%	7.16%
D	Pembiayaan - Jenis Penggunaan	371.73	506.16	553.32	100.0%	48.8%	9.32%
1	Modal Kerja	215.40	308.06	346.82	62.7%	61.0%	12.58%
2	Investasi	36.99	65.34	65.73	11.9%	77.7%	0.61%
2	Konsumsi	119.34	132.75	140.76	25.4%	17.9%	6.03%
E	NPF	2.88%	3.94%	6.51%			
F	FDR	134.94%	136.99%	135.33%			

Sumber: LBU dan LBUS

Financing to Deposit Ratio (FDR) yang merupakan indikator fungsi intermediasi Perbankan Syariah menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan triwulan lalu. FDR Bank Syariah mencapai 135,33%, mengalami penurunan dibandingkan triwulan II-2009 sebesar 136,99%, namun masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2008 (134,94%). Penurunan FDR ini diakibatkan oleh pertumbuhan kredit yang masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penghimpunan dana yang diperoleh. Dibandingkan triwulan II-2009, FDR BUS pada triwulan ini mengalami penurunan, sedangkan FDR BPR Syariah mengalami peningkatan. FDR Bank Umum Syariah mencapai 132,65%, sedangkan pada triwulan lalu mencapai 134,55%. Sementara itu, FDR BPR Syariah mencapai 177,86% atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan lalu (173,40%).

Grafik 3.12
Perkembangan FDR Bank Syariah



Sumber: LBU dan LBUS

5. Asesmen Stabilitas Sistem Keuangan Daerah

Assesmen secara umum terhadap stabilitas sistem keuangan daerah dilakukan guna melihat potensi sumber-sumber risiko keuangan daerah yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan di daerah. Asesmen yang dilakukan menyimpulkan bahwa pada triwulan III-2009, risiko pada sektor ekonomi mengalami kecenderungan menurun. Walaupun demikian, prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi intermediasinya harus tetap diutamakan oleh perbankan, terutama oleh perbankan syariah yang mengalami penurunan kualitas pembiayaan sejak Juli 2009 lalu.

Asesmen Keuangan Bisnis dan Rumah Tangga

Kondisi keuangan bisnis dan rumah tangga di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang baik di triwulan ini. Hal ini terlihat dari alokasi kredit pada triwulan III-2009 yang mencapai Rp17,97 triliun. Kredit modal kerja mengalami pertumbuhan sebesar 1,86% (qtq), kredit investasi tumbuh 4,86% (qtq), sedangkan kredit konsumsi tumbuh 5,18% (qtq). Membaiknya kondisi keuangan bisnis di Provinsi Lampung juga terindikasi dari pertumbuhan PMTB sebesar 1,85% (qtq) dan 5,66% (yoy).

Keuangan sektor rumah tangga pada triwulan IV-2009 diperkirakan akan lebih membaik seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat akibat inflasi yang diprediksi mengalami *trend* penurunan. Indikator lainnya adalah pertumbuhan output konsumsi swasta yang terjadi pada triwulan III-2009 yang mencapai 5,9% (qtq) dan 5,4% (yoy).

Assesmen Risiko Aktiva Produktif Bank Umum

Sampai dengan triwulan III-2009, penyaluran kredit masih menguasai 93,5% pangsa portofolio aktiva produktif Bank Umum di Provinsi Lampung. Portofolio lainnya berupa penempatan pada bank lain, SBI, dan surat berharga maupun tagihan lainnya masing-masing dengan pangsa 6%, 0,2%, dan 0,2%. Dari sisi kolektibilitas kredit, rasio NPLs *gross* bank umum tercatat sebesar 3,60% pada triwulan laporan atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan II-2009 yang tercatat sebesar 5,36%. Menurunnya risiko gagal bayar nasabah juga terindikasi melalui cadangan aktiva produktif yang mengalami penurunan sebesar 36,42% (qtq). Walaupun demikian, Bank Umum Syariah perlu sangat waspada mengingat NPF *gross* yang dialaminya masih berada di atas ambang batas normal yang dianjurkan sebesar 5%.

Assesmen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas Bank Umum di Provinsi Lampung pada Triwulan III-2009 mengalami penurunan. Hal ini terindikasi melalui rasio likuiditas Bank Umum yang mencapai 7,9%, berada lebih tinggi dibandingkan rasio likuiditas triwulan sebelumnya maupun triwulan III-2008. Hal ini menandakan bahwa kemampuan Bank Umum dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin meningkat. Kas Bank Umum pada triwulan III-2009 mencapai Rp1,17 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 80,68% (qtq), sedangkan alat likuid Bank Umum dalam bentuk tabungan pada bank lain mencapai Rp20,02 miliar atau tumbuh sebesar 38,36% (qtq).

Assesmen Risiko Rentabilitas

Risiko rentabilitas perbankan di Lampung semakin menurun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan perbankan di Lampung dalam memperoleh keuntungan dari pengelolaan asetnya semakin meningkat. Hal ini terlihat dari rasio rentabilitas perbankan di Lampung pada triwulan III-2009 yang mencapai 3,14% atau lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2009 yang hanya mencapai 0,84%. Pada triwulan III-2009, perbankan di Lampung mampu membukukan laba bersih sebesar Rp742,82 miliar atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II-2009 yang hanya membukukan laba sebesar Rp186,49 miliar. Namun, kemampuan BPR Syariah dalam pengelolaan asetnya untuk memperoleh laba harus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini mengingat sejak Juni 2009, BPR Syariah selalu membukukan kerugian. Pada akhir triwulan III-2009, kerugian BPR Syariah mencapai Rp1,03 Miliar.

BAB IV – PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Pada triwulan III-2009, sumbangan belanja Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah meningkat. Siklus realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2009 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana realisasi belanja proyek pada triwulan III-2009 mulai terakselerasi lebih cepat setelah diselesaikannya proses Perubahan APBD (APBD-P).

APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada mulanya menargetkan pendapatan sebesar Rp1,7 triliun. Namun, melihat perubahan yang dinamis, antara lain pemulihan dari dampak krisis ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian makro baik nasional maupun regional, sehingga APBD meningkat dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,89 triliun atau bertambah sebesar Rp190,032 miliar. Dengan demikian, defisit anggaran yang sebelumnya ter-cover oleh SILPA sebesar Rp50 miliar, kini diprediksi dapat ter-cover oleh SILPA yang mencapai Rp192,34 miliar. APBD-P tahun anggaran 2009 ini telah disahkan melalui penerbitan Perda No. 9/2009 tanggal 5 Oktober 2009.

1. RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pada awal tahun APBD Provinsi Lampung tahun 2009 merencanakan pendapatan sebesar Rp1,650 triliun, namun setelah pertengahan tahun berjalan terjadi penerimaan pada pos PAD yang melampaui target, sehingga rencana pendapatan tahun anggaran 2009 berubah menjadi Rp1,697 triliun. Pendapatan pada APBD-P meningkat Rp47,69 miliar dibandingkan prediksi awal tahun 2009. Sedangkan bila dibandingkan dengan pendapatan tahun anggaran 2008, mengalami peningkatan Rp192,58 miliar atau tumbuh 12,79%.

Perubahan pendapatan sebesar Rp47,69 miliar diakibatkan oleh proyeksi peningkatan pendapatan pada pos PAD dan Lain-lain pendapatan yang sah. PAD diprediksi meningkat sebesar Rp13,22 miliar menjadi Rp812,09 miliar dari sebelumnya Rp798,87 miliar. Peningkatan PAD dalam APBD 2009 tersebut terjadi pada pos retribusi, laba perusahaan milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah, sedangkan pos pajak daerah

diprediksi mengalami penurunan 2,01% menjadi sebesar Rp683,97 miliar dari sebelumnya Rp697,97 miliar.

Sementara itu, pada pos lain-lain pendapatan yang sah pada awal tahun 2009 diprediksi tidak terdapat realisasi pemasukan, namun ternyata mendapatkan alokasi dana desentralisasi fiskal sebesar Rp50,93 miliar, pendapatan dari Pemda lainnya sebesar Rp750 juta, dan pendapatan dari penyelenggaraan diklat sebesar Rp793,92 juta. Sehingga, pada pos lain-lain pendapatan yang sah yang sebelumnya tidak dianggarkan, kini dalam APBD-P teralokasi sejumlah Rp52,48 miliar.

Ketergantungan Provinsi Lampung terhadap pendanaan yang bersumber dari Pusat masih sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari komposisi sumber pendapatan Provinsi Lampung (APBD-P) tahun anggaran 2009. Pendapatan Provinsi Lampung tahun 2009 (APBD-P) masih ditopang oleh Dana Perimbangan, yaitu dengan *share* sebesar 49,08%, sedangkan dukungan PAD terhadap pendapatan daerah hanya sebesar 47,83%. Ditambah dengan adanya dana desentralisasi fiskal yang dialokasikan pada tahun ini sebesar Rp50,93 miliar, maka komposisi sumber pendapatan dari Pusat semakin besar.

Grafik 4.1
Komposisi Pendapatan Provinsi Lampung TA 2009 (APBD-P)



Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung (diolah)

Tabel 4.1 Pendapatan Provinsi Lampung setelah APBD-P
Tahun Anggaran 2009

Uraian	Jumlah (Milyar Rp)			Perubahan APBD terhadap proyeksi awal		APBDP'09 vs APBD'08	
	Tahun Anggaran 2008	APBD 2009	APBD P 2009	Rp	%	Rp	%
	1	2	3	4 = (3 -2)	5	6 = (3-1)	7
PENDAPATAN	1,505.20	1,650.09	1,697.78	47.69	2.89	192.58	12.79
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	708.00	798.87	812.09	13.22	1.65	104.09	14.70
Pajak Daerah	590.00	697.97	683.97	(14.00)	-2.01	93.97	15.93
Retribusi Daerah	70.40	70.79	76.39	5.60	7.92	5.99	8.51
Laba Perusahaan Milik Daerah	13.20	10.35	11.96	1.61	15.54	(1.24)	-9.39
Lain-lain PAD yang Sah	34.40	19.77	39.76	19.99	101.13	5.36	15.58
B. DANA PERIMBANGAN	790.90	851.22	833.21	(18.01)	-2.12	42.31	5.35
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	197.70	182.70	164.69	(18.01)	-9.86	(33.01)	-16.70
Dana Alokasi Umum (DAU)	570.50	628.51	628.51	0.00	0.00	58.01	10.17
Dana Alokasi Khusus (DAK)	22.70	40.02	40.02	0.00	0.00	17.32	76.28
C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.30	0.00	52.48	52.48		46.18	733.02
Pendapatan Hibah	6.30	0.00	52.48	52.48		46.18	733.02
Dana Desentralisasi Fiskal		0.00	50.93	50.93		50.93	
Bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya		0.00	0.75	0.75		0.75	
Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan latihan		0.00	0.79	0.79		0.79	
Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

Sumber : Biro Keuangan Prov. Lampung (diolah)

Dalam APBD-P tahun 2009, pos pajak daerah yang termasuk dalam komponen PAD diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp14 miliar, begitu juga dengan pos bagi hasil pajak/bukan pajak yang termasuk ke dalam komponen Dana Perimbangan juga mengalami penurunan sebesar Rp18,01 miliar atau menjadi Rp164,69 miliar dari sebelumnya Rp182,70 miliar. Hal ini diprediksi akibat adanya penurunan DBH Migas sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 50 / PMK.07/ 2009 tentang penetapan alokasi DBH SDA Tambang Migas Tahun Anggaran 2009.

Meskipun pos pajak daerah diprediksi menurun dibandingkan proyeksi sebelumnya, namun dalam rangka terus menggali sumber penerimaan daerah, berbagai terobosan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung No. 36 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 mengenai penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) bagi kendaraan yang belum membayar hingga tahun tagihan 2008. Bahkan, untuk terus meningkatkan penerimaan pajak dari sektor tersebut, mulai tahun 2010 Dispenda akan mengoperasikan tiga mobil pajak keliling, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran.

Selain itu, dengan bertambahnya jumlah investastor ke Lampung pada tahun 2009 (sebanyak 18 perusahaan) dengan nilai investasi mencapai Rp4,92 triliun diprediksi dapat menjadi sumber penerimaan potensial dari sisi pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pemungutannya harus tetap memperhatikan prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai UU 33/04 pasal 66 ayat 1.

Sampai dengan triwulan III-2009, realisasi pendapatan telah mencapai Rp1,32 triliun atau 77,91% dari target pendapatan setelah APBD-P sebesar Rp1,69 triliun. Dari 3 pos yang termasuk ke dalam komponen pendapatan, realisasi terbesar terjadi pada pos Dana Perimbangan yang telah mencapai Rp673,13 miliar atau 80,79% dari target APBD-P. Pos Dana Alokasi Umum mencapai realisasi tertinggi, yaitu 89,41% dari target APBD-P 2009. Sedangkan dalam pos PAD, komponen lain-lain pendapatan yang sah telah melampaui target APBD-P 2009 (114,06%).

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung s.d Triwulan III-2009

Uraian	Jumlah (Milyar Rp)	Realisasi s.d Triwulan II-2009 terhadap APBD-P		Realisasi s.d Triwulan III-2009 terhadap APBD-P	
		APBD P 2009	Nominal (Milyar Rp)	%	Nominal (Milyar Rp)
PENDAPATAN	1,697.78	825.16	48.60	1,322.81	77.91
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	812.09	400.88	49.36	648.88	79.90
Pajak Daerah	683.97	318.53	46.57	531.06	77.64
Retribusi Daerah	76.39	42.87	56.12	60.59	79.32
Laba Perusahaan Milik Daerah	11.96	11.88	99.33	11.88	99.33
Lain-lain PAD yang Sah	39.76	27.60	69.42	45.35	114.06
B. DANA PERIMBANGAN	833.21	423.54	50.83	673.17	80.79
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	164.69	29.62	17.99	81.20	49.30
Dana Alokasi Umum (DAU)	628.51	381.91	60.76	561.96	89.41
Dana Alokasi Khusus (DAK)	40.02	12.00	29.99	30.01	75.00
C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.48	0.75	1.43	39.83	75.90
Pendapatan Hibah	52.48			39.83	75.90
Dana Desentralisasi Fiskal	50.93			38.20	75.00
Bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya	0.75	0.75	100	0.75	100.00
Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan latihan	0.79			0.87	110.13
Dana Darurat	0.00				
DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	0.00				

Sumber: Biro Keuangan Prov. Lampung (diolah)

Realisasi pendapatan meningkat sangat signifikan. Pada triwulan II-2009 nilainya baru mencapai Rp825,12 miliar kemudian mengalami peningkatan hingga Rp497,65 miliar, sehingga realisasinya menjadi Rp1,322 triliun pada akhir triwulan III-2009. Pencapaian ini tidak hanya ditopang oleh peningkatan pendapatan pada pos PAD dan

Dana Perimbangan, namun juga sangat signifikan dipengaruhi oleh realisasi pendapatan hibah berupa dana desentralisasi fiskal triwulan III-2009 yang mencapai Rp38,20 miliar.

2. RENCANA DAN REALISASI BELANJA DAERAH

Belanja Provinsi Lampung tahun anggaran 2009 yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp1,70 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp190,03 miliar menjadi Rp1,89 triliun. Alokasi tambahan belanja langsung sebesar Rp140,629 miliar diprioritaskan untuk program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat serta penambahan program dan kegiatan pendidikan, dimana tambahan anggaran pendidikan pada KUA dan PPAS Tahun 2009 mencapai Rp40,1 miliar atau 21,1 persen dari total tambahan belanja daerah. Hal ini seiring dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong pencapaian delapan prioritas pembangunan Daerah Lampung yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009.

Tabel 4.3 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009

Uraian	BELANJA DAERAH
APBD 2009 (Milyar Rp)	1,700.09
APBD P 2009 (Milyar Rp)	1,890.12
Realisasi s.d Triwulan II-2009 terhadap APBD-P	
Nominal (Milyar Rp)	612.56
%	32.41
Realisasi s.d Triwulan III-2009 terhadap APBD-P*)	
Nominal (Milyar Rp)	1,145.66
%	60.61

Ket : data sementara, yi realisasi s/d Juni berdasarkan SPJ + realisasi s.d September berdasarkan SP2D

Sumber: Biro Keuangan Prov. Lampung (diolah)

Delapan isu utama (prioritas) pembangunan Daerah Lampung Tahun 2009 adalah:

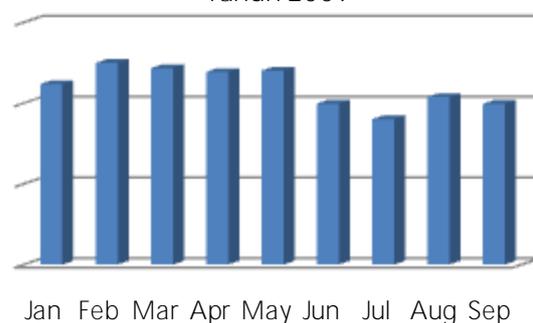
1. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor.
3. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan pedesaan.
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi.
6. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
7. Pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
8. Pengelolaan SDA dan lingkungan, penanganan bencana, pengurangan risiko bencana dan Peningkatan pemberantasan penyakit menular.

Berdasarkan data sementara (SP2D) Biro Keuangan Provinsi Lampung menunjukkan bahwa realisasi belanja Provinsi Lampung pada triwulan III-2009 (per tanggal 30 September 2009) diperkirakan mencapai Rp533,1 miliar. Sedangkan realisasi belanja sampai dengan semester I-2009 (Juni 2009) berdasarkan SPJ telah mencapai Rp612,56 miliar atau baru mencapai 32,41% dari target belanja APBD-P tahun 2009. Jadi akumulasi belanja Provinsi Lampung sampai dengan triwulan III-2009 diperkirakan mencapai Rp1,15 triliun. Dengan prediksi belanja sebesar Rp1,15 triliun, maka realisasi belanja Provinsi Lampung diperkirakan telah mencapai 60,61% dari target belanja pada APBD-P tahun 2009 (sebesar Rp1,89 triliun).

Berdasarkan pola/*trend* alokasi belanja daerah tahun sebelumnya, belanja pada triwulan III-2009 sudah dapat diprediksi mengalami kenaikan dibandingkan triwulan I maupun triwulan II. Hal ini juga terkonfirmasi oleh hasil *Quick Survey* (lihat box), dimana realisasi belanja pemerintah memiliki pola yang sama (tetap) pada setiap tahun. Pada triwulan I, belanja yang teralokasikan sebesar $\pm 20\%$, pada triwulan II dan III mencapai 50 % hingga 80%, dan pada triwulan IV diupayakan terealisasi 100%. Rendahnya realisasi belanja pada triwulan I diakibatkan oleh masih minimnya penerimaan pada periode tersebut.

Tingginya realisasi belanja pemerintah daerah pada triwulan III-2009 juga terkonfirmasi melalui penempatan dana Pemda pada perbankan yang mengalami pengurangan pada bulan September 2009.

Grafik 4.2 Perkembangan Penempatan Dana Pemda pada Perbankan di Lampung Tahun 2009



Sumber : LBU dan LBUS

3. PENYERAPAN DANA APBN

Berdasarkan data KPPN, dana APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung (DIPA Revisi) tahun 2009 tercatat sejumlah Rp5,51 triliun. Dana tersebut dikelompokkan kedalam komponen belanja negara dan transfer ke daerah. Alokasi untuk komponen belanja negara mencapai Rp5,45 triliun, yang didominasi oleh belanja bantuan sosial (Rp1,97 triliun), belanja pegawai (Rp1,24 triliun), dan belanja modal (Rp1,01 triliun) sedangkan sisanya untuk pos belanja negara lainnya. Sedangkan dalam kelompok transfer ke daerah, pos dana yang tersedia hanya Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp65 miliar.

Tabel 4.4
Realisasi Penyerapan Dana APBN Provinsi Lampung
Per 30 September 2009 (dalam Triliun Rupiah)

URAIAN	DIPA	DIPA REVISI	JUMLAH NETTO	REALISASI DIBAWAH/DIATAS ANGGARAN	% REALISASI
BELANJA NEGARA					
I. BELANJA NEGARA	5.40	5.45	3.11	-2.33	57%
1 BELANJA PEGAWAI	1.23	1.24	0.94	-0.30	76%
2 BELANJA BARANG	0.88	0.89	0.45	-0.45	50%
3 BELANJA MODAL	0.98	1.01	0.48	-0.54	47%
4 BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0.00	0.001	0.00	0%
5 BELANJA SUBSIDI	0	0.00	0.00	0.00	0%
6 BELANJA HIBAH	0	0.00	0.00	0.00	0%
7 BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.97	1.97	0.98	-0.99	50%
8 BELANJA LAIN-LAIN	0.33	0.34	0.27	-0.66	80%
II. TRANSFER KE DAERAH	0.065	0.065	0.15	0.09	239%
1 TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0.065	0.065	0.15	0.09	239%
TRANSFER DANA BAGI HASIL	0.065	0.065	0.15	0.09	239%
TRANSFER DANA ALOKASI UMUM	0	0.00	0.00	0.00	0%
TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS	0	0.00	0.00	0.00	0%
2 TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS	0	0.00	0.00	0.00	0%
JUMLAH BELANJA NEGARA	5.464	5.510	3.26	-2.24	59%

Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi Lampung (diolah)

Secara umum, hingga akhir triwulan III-2009 (bulan September), dana APBN yang telah di serap oleh Provinsi Lampung telah mencapai Rp3,26 triliun atau 59% dari target serapan APBN Provinsi Lampung tahun 2009. Pada akhir triwulan II-2009 (bulan Juni) lalu, serapan dana APBN Provinsi Lampung masih mencapai Rp1,77 triliun atau 33% dari target serapan APBN 2009. Hal ini menunjukkan bahwa pada 3 bulan terakhir telah terjadi akselerasi belanja daerah yang berasal dari APBN sebesar Rp1,49 triliun.

Sampai dengan triwulan III 2009, realisasi dana APBN terbesar terjadi pada pos belanja pegawai, yaitu mencapai 76% (Rp936 miliar) dari target realisasi 2009 (Rp1,24 triliun). Selanjutnya diikuti oleh pos belanja barang dan belanja bantuan sosial yang masing-masing telah mencapai 50% dari target realisasi 2009. Sedangkan realisasi terendah serapan dana APBN terjadi pada pos belanja modal yaitu mencapai 47% (Rp475 miliar) dari target realisasi 2009 (Rp1,01 triliun).

Sementara itu, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN (DEKON/TP) per triwulan II 2009 yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi Lampung pada tanggal 20 Agustus 2009 menunjukkan bahwa pembiayaan APBN dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Lampung Tahun 2009 mencapai Rp1,682 triliun. Alokasi dana dekonsentrasi mencapai Rp1,266 triliun, sedangkan dana tugas pembantuan mencapai Rp415,5 miliar. Sampai dengan akhir triwulan II-2009, realisasi dana Dekonsentrasi dalam bentuk fisik baru mencapai 15,99%, sedangkan realisasi keuangannya mencapai 15,86%. Realisasi yang terjadi pada dana Tugas Pembantuan bahkan jauh lebih rendah. Realisasi fisik dan keuangannya masing-masing baru mencapai 5,65% dan 5,68%.

Rendahnya realisasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersebut diakibatkan oleh karena mayoritas SKPD belum menyampaikan laporan keuangan penggunaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara benar sesuai dengan aplikasi PP 39 Tahun 2006. Hingga triwulan II-2009, baru 80% SKPD (21 SKPD) yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan dekonsentrasi, sedangkan laporan yang sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 baru mencapai 69% (18 SKPD).

Dalam rangka meredam dampak krisis keuangan global, pemerintah pusat mengambil langkah penyesuaian darurat di bidang fiskal atau yang dikenal dengan "Program Stimulus Fiskal 2009". Langkah darurat difokuskan pada stimulus belanja negara untuk pembangunan infrastruktur padat karya dengan anggaran sebesar Rp12,2 triliun yang diantaranya tersebar pada Departemen PU (Rp6,6 triliun), Departemen Perhubungan (Rp2,2 triliun), Departemen Pertanian (Rp650 miliar), Departemen ESDM

(Rp500 miliar), dan Kemenpera (Rp400 miliar). Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui stimulus fiskal yang telah direalisasikan di Provinsi Lampung, maka dilakukan *Quick Survey* mengenai Belanja Pemerintah Daerah (lihat boks). Hasil survei diantaranya menunjukkan bahwa hingga semester I-2009 realisasi stimulus fiskal pada SKPD penerima telah mencapai 30% hingga 40%.

Boks - Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Realisasi Belanja Pemerintah Daerah dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Pemerintah Daerah pada Perbankan Daerah¹

APBD merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, sehingga anggaran daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah berperan dalam mengalokasikan sumber daya (yang terefleksikan dalam komponen belanja daerah) secara efektif dan efisien. Menurut Keynes, belanja daerah merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi, sehingga tolak ukur meningkatnya pembangunan di suatu daerah dapat terlihat dari realisasi pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Tingkat realisasi belanja Pemerintah Daerah (APBD) di Provinsi Lampung sampai dengan semester I-2009 pada umumnya relatif rendah, yaitu sekitar 30% dari alokasi anggaran belanja. Apabila belanja Pemda lebih dioptimalkan, maka dapat menjadi stimulus bagi perekonomian daerah. Mengingat besarnya potensi dan pentingnya peranan belanja Pemda dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah, maka perlu dilakukan survei mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat realisasi belanja Pemda.

a. Profil Responden

Responden terdiri dari SKPD Pengelola APBD-Pemprov, SKPD Pelaksana APBD-Pemprov, Bank Umum milik Pemprov, SKPD Pengelola APBD-Kota, dan SKPD Pelaksana APBD-Kota.

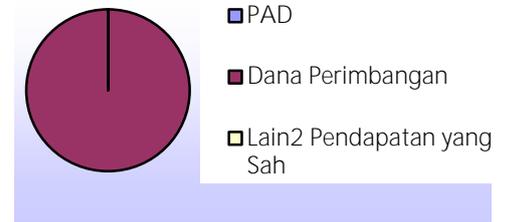
Dasar pemilihan responden SKPD Pelaksana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut adalah SKPD yang memiliki alokasi rencana belanja terbesar pada tahun 2009 berdasarkan hasil laporan SKPD Pengelola APBD, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

¹ Hasil *Quick Survey* yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Bandar Lampung pada bulan Agustus 2009 dengan metode *in-depth interview*.

b. Hasil Survei

Komponen Penerimaan Daerah Terbesar

Sesuai pendapat 100% responden survei bahwa berdasarkan pengamatan 2 tahun terakhir ('08-'09), penerimaan terbesar pada anggaran Kota Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung secara keseluruhan berasal dari Dana Perimbangan. Pada anggaran Provinsi Lampung, komposisi DAU mencapai lebih dari 70% total dana perimbangan. Bila dibandingkan tahun anggaran 2008, nominal DAU pada tahun anggaran 2009 meningkat Rp58,01 Milyar atau tumbuh sebesar 10,17%.

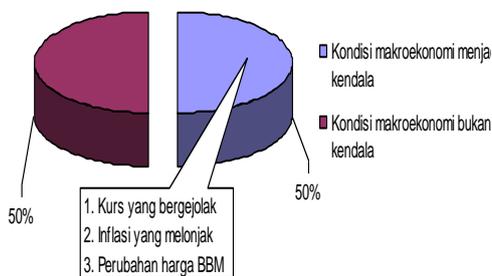


Realisasi Belanja

Realisasi belanja pada anggaran Pemerintah Provinsi dan Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sudah maksimal (rata-rata realisasi belanja >90%). Hal ini didukung oleh jawaban responden yang menyatakan bahwa tidak ada kendala baik dalam aspek legal, aspek politik, maupun aspek administrasi dalam merealisasikan anggaran belanjanya.



Pengaruh Kondisi Makroekonomi terhadap Realisasi Belanja Daerah



Dalam hal pengaruh kondisi makroekonomi terhadap realisasi belanja daerah, pengelola keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjawab bahwa gejala makroekonomi, seperti kurs yang bergejolak, inflasi yang melonjak, dan perubahan harga BBM menjadi kendala dalam melakukan realisasi belanjanya.

Sedangkan menurut pengelola keuangan Provinsi Lampung, gejala variabel makro ekonomi tidak menjadi kendala bagi realisasi belanja daerah.

Stimulus Fiskal

Mengenai stimulus fiskal APBN 2009 yang diberikan oleh pemerintah pusat, realisasi belanja stimulus fiskal Provinsi Lampung pada semester I-2009 telah mencapai 30% hingga 40% dan tidak terdapat kendala dalam mengimplementasikan stimulus fiskal yang diberikan. Stimulus fiskal tersebut juga dirasakan cukup efektif dalam mengatasi dampak krisis (menciptakan kesempatan kerja dan PHK).

Realisasi Belanja Pemda

Sampai dengan semester I-2009, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mencapai lebih dari 30%, dimana komponen belanja pegawai dan belanja bantuan mencapai realisasi tertinggi. Bahkan, komponen belanja bantuan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mencapai 93,19%. Hal ini menunjukkan bahwa pendorong besarnya realisasi belanja pemerintah daerah terletak pada kedua komponen belanja tersebut, sementara komponen belanja lainnya, terutama belanja modal masih rendah. Berdasarkan hasil survei, rendahnya realisasi untuk belanja modal disebabkan oleh kendala dalam proses lelang (tender) proyek akibat minimnya jumlah sumber daya yang memenuhi kualifikasi untuk kegiatan lelang, selain itu proses administrasi yang masih *manual* juga mempengaruhi lambatnya realisasi belanja modal.

Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung
Semester I-2009

Uraian	Jumlah (Milyar Rp)		% realisasi Semester I-2009
	Rencana Tahun 2009	Realisasi Semester Pertama Tahun 2009	
TOTAL PENERIMAAN DAERAH	1650.09	825.16	50.01
TOTAL BELANJA DAERAH	1.700.09	612.56	36.03
BELANJA OPERASI	1.089.27	413.86	37.99
Belanja Pegawai	479.17	222.59	46.45
Belanja Barang	454.11	126.54	27.87
Belanja Hibah	29.42	5.94	20.18
Belanja Bantuan	126.57	58.80	46.45
BELANJA MODAL	172.29	41.44	24.05
Belanja Peralatan dan Mesin	29.19	13.10	44.89
Belanja Bangunan dan Gedung	39.34	4.12	10.47
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	102.08	23.83	23.34
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.68	0.39	23.09
BELANJA TAK TERDUGA	22.00	15.64	71.07
TRANSFER BAGI HASIL PAJAK KE KAB/KOTA/DESA	416.53	141.62	34.00

Realisasi Belanja APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung
Semester I-2009

Uraian	Jumlah (Milyar Rp)		% realisasi Semester I-2009
	Rencana Tahun 2009	Realisasi Semester Pertama Tahun 2009	
Belanja Langsung	307.45	70.77	23.02
Belanja Tidak Langsung	565.09	263.79	46.68
Total Belanja	872.54	334.56	38.34
Komponen Belanja			
Belanja Pegawai	563.50	251.25	44.59
Belanja Barang	189.70	49.89	26.30
Belanja Hibah	24.66	14.58	59.12
Belanja Bantuan	38.35	35.74	93.19
Belanja Modal	83.46	12.43	14.89
Belanja Tak Terduga	1,534.15	247.03	16.10
Transfer Bagi Hasil	1,115.40	352.35	31.59

Penempatan Kelebihan Dana Pemda

Kelebihan dana pemerintah kota seluruhnya ditempatkan pada BPD, sedangkan penempatan kelebihan dana pemprov lebih beragam, yaitu 60% pada BPD dan 40% pada Bank Umum selain BPD. Kelebihan dana pemerintah hanya ditempatkan pada perbankan dan tidak ada dalam bentuk portofolio surat berharga. Dalam memilih lembaga untuk menempatkan dananya, pemerintah kota hanya mempertimbangkan kriteria bahwa bank tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah, sedangkan pemerintah provinsi mempertimbangkan faktor lainnya, yaitu keuntungan tertinggi dan reputasi.

PENEMPATAN KELEBIHAN DANA PEMKOT



PENEMPATAN KELEBIHAN DANA PEMPROV



Perbankan Daerah

Responden menyatakan bahwa sebanyak 15 institusi pemerintah daerah (Pemprov/Pemkab/Pemkot) yang berada disekitarnya menjadi nasabah (deposan) pada bank yang bersangkutan, dimana pangsa dana pemerintah daerah terhadap DPK konsolidasi mencapai 55%. Dana pemerintah tersebut, tersimpan dalam bentuk Giro (sebanyak 80%) dan Deposito Berjangka dengan mayoritas tenor 1 bulan (sebanyak 20%). Dana pemerintah daerah pada dirasakan sangat berperan, baik bagi aspek likuiditas maupun aspek profitabilitas. Beberapa hal yang menyebabkan dana pemerintah berperan besar bagi aspek profitabilitas, yaitu :

- 1) Sebesar 41-60% dari dana pemerintah yang tersimpan disalurkan kembali dalam bentuk kredit, dimana kredit kepada PNS/TNI/Polri mencapai 84%.
- 2) Dana yang tidak tersalurkan dalam bentuk kredit digunakan untuk memberikan pinjaman kepada bank lain (PUAB) dan ditempatkan pada SBI.

Sementara itu, keuntungan dari aspek likuiditas terlihat dari tidak pernahnya responden mengalami kesulitan dalam jangka pendek (*mismatch*).

Kesimpulan :

1. Ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap bantuan pusat sangat besar. Hal ini terlihat dari komposisi Dana Perimbangan yang masih mendominasi sumber pendapatan daerah (mencapai > 50% dari total pendapatan).
2. Sampai dengan semester I-2009, realisasi belanja pemerintah daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) telah mencapai lebih dari 30%, dimana realisasi tertinggi terdapat pada komponen belanja pegawai dan belanja bantuan.
3. Hasil survey menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja pada awal triwulan adalah penerimaan daerah yang belum maksimal, sehingga belum terdapat anggaran yang memadai untuk melakukan belanja daerah (terutama belanja modal dan belanja barang).
4. Pengelola keuangan daerah memperkirakan realisasi belanja pemerintah daerah (baik di akhir tahun maupun tiap triwulan) tidak akan jauh berbeda (sama) dengan realisasi belanja tahun sebelumnya, dimana realisasi belanja pada triwulan I dan triwulan IV merupakan yang terendah.
5. Kelebihan dana pemerintah daerah mayoritas ditempatkan pada BPD. Hal ini diakibatkan oleh karena bank tersebut dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Namun, bagi pengelola keuangan Provinsi Lampung selain pertimbangan tersebut, faktor reputasi dan keuntungan tertinggi menjadi faktor lain dalam penempatan kelebihan dananya. Oleh karena itu, terdapat kelebihan dana pemerintah provinsi yang ditempatkan pada Bank Umum.
6. Bagi BPD, kelebihan dana Pemda yang ditempatkan pada lembaganya memiliki keuntungan tersendiri, baik dari aspek profitabilitas (melalui penyaluran kembali dana tersebut untuk kredit, penempatan pada SBI, dan PUAB), maupun aspek likuiditas bank (untuk mengatasi kekurangan dana jangka pendek karena *mismatch*).

Rekomendasi Kebijakan

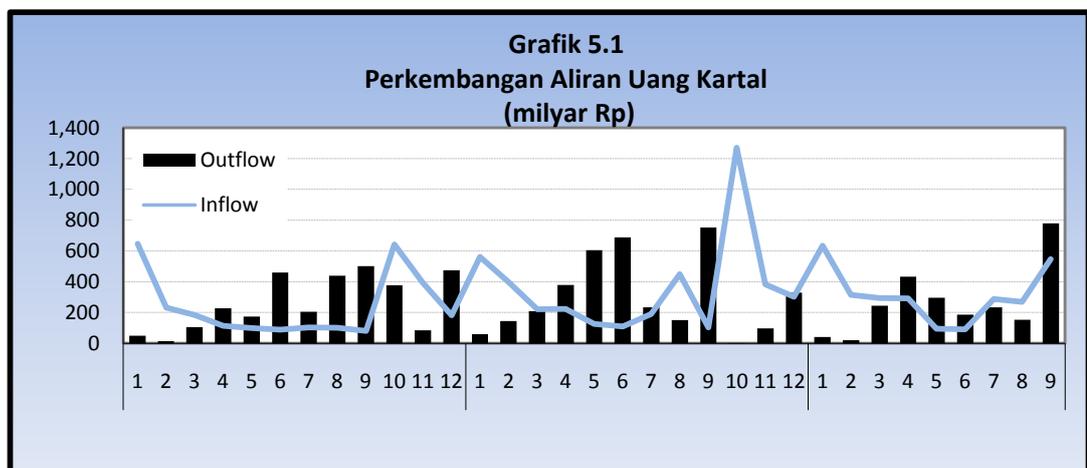
1. Peningkatan kemampuan sumber daya (terutama pegawai) dalam melaksanakan kegiatan pelelangan.
2. Optimalisasi pendapatan daerah melalui pengkajian kembali sumber-sumber pajak dan retribusi yang potensial.
3. Meningkatkan kegiatan investasi daerah untuk menunjang PAD.
4. Peningkatan pengawasan terhadap efisiensi dan efektifitas belanja daerah.
5. Fokus dan prioritas terhadap belanja yang berpotensi menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, seperti belanja modal dan pembangunan.

BAB V – PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Membaiknya perekonomian regional Provinsi Lampung pada triwulan III-2009 diikuti dengan peningkatan transaksi keuangan, baik secara tunai maupun non tunai melalui sistem kliring dan RTGS.

1. PERKEMBANGAN ALIRAN UANG KARTAL

Pada triwulan III-2009, aliran uang kartal di Kantor Bank Indonesia Bandar Lampung secara rata-rata bulanan tercatat mengalami *net-outflow*. Dari rata-rata bulanan *inflow* yang tercatat sebesar Rp366,811 miliar dan rata-rata bulanan *outflow* sebesar Rp388,223 miliar, maka *net outflow* yang terjadi tercatat sebesar Rp21,412 miliar. Lebih banyaknya uang kartal yang keluar dari Kantor Bank Indonesia Lampung terjadi seiring dengan besarnya kebutuhan likuiditas masyarakat menghadapi perayaan hari besar keagamaan.



Sumber : Bank Indonesia

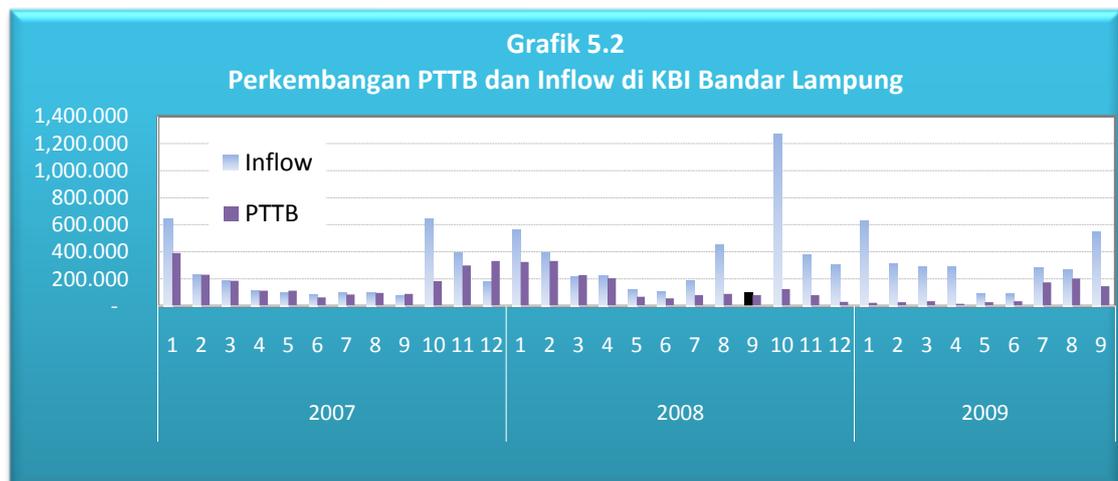
Jika diamati, pada triwulan II-2009 aliran uang kartal juga menunjukkan kondisi *net outflow*, dengan besaran yang lebih tinggi dibanding triwulan III-2009 (rata-rata bulanan *net outflow* pada triwulan II-2009 sebesar Rp146,266 miliar). *Net Outflow* pada triwulan III-2009 hanya terjadi pada bulan September 2009, dengan besaran Rp233,295. Secara umum, jumlah aliran uang (baik itu masuk maupun keluar KBI Bandar Lampung) selama triwulan III-2009 mengalami peningkatan yang

signifikan dibanding triwulan sebelumnya, dimana total inflow dan total outflow masing-masing meningkat 132,05% (qtq) dan 27,56% (qtq).

2. PEMBERIAN TANDA TIDAK BERHARGA (PTTB)

Kebijakan Bank Indonesia terkait dengan pengedaran uang adalah selalu senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan uang kartal untuk masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup dengan jenis pecahan dalam kondisi layak edar (*fit to circulation*). Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia antara lain melakukan pemilahan untuk memisahkan uang layak edar dan tidak layak edar, serta melakukan pemusnahan uang yang tidak layak edar tersebut dengan cara diracik (Pemberian Tanda Tidak Berharga/PTTB).

Pada triwulan III-2009, uang yang tidak layak edar (PTTB) mengalami peningkatan. Rata-rata bulanan uang yang diracik pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp173,69 miliar, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding triwulan sebelumnya yang bernilai Rp26,99 miliar. Peningkatan ini terjadi akibat banyaknya setoran uang tidak layak edar dari perbankan dan masyarakat untuk ditukarkan dengan uang dalam kondisi layak edar.

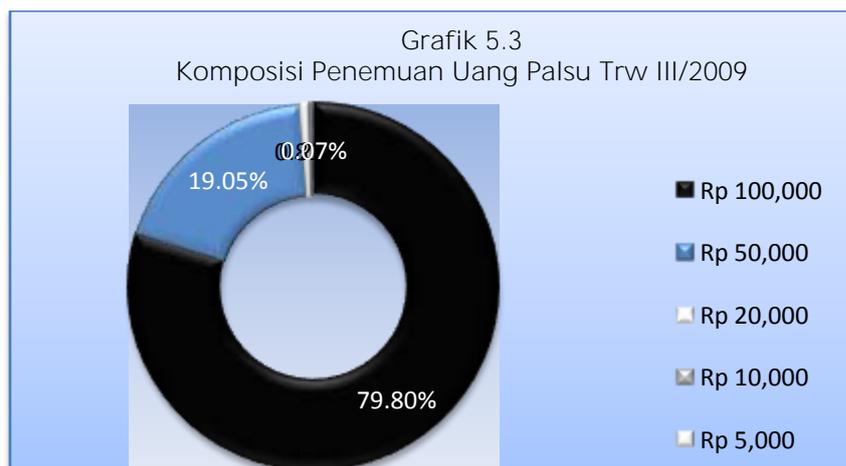


Sumber : Bank Indonesia

3. PENEMUAN UANG PALSU

Rasio uang palsu terhadap aliran uang masuk pada triwulan III-2009 mengalami penurunan dibandingkan triwulan II-2009. Jumlah uang palsu (UPAL) yang ditemukan dan dilaporkan ke Bank Indonesia Bandar Lampung selama triwulan laporan tercatat sebesar 0,0020% dari rata-rata aliran uang masuk (*inflow*). Hal ini mengindikasikan bahwa temuan dan pelaporan uang palsu yang terjadi menjelang Idul Fitri masih lebih rendah dibanding ketika Pemilu pada triwulan II-2009 sebesar 0,0042%.

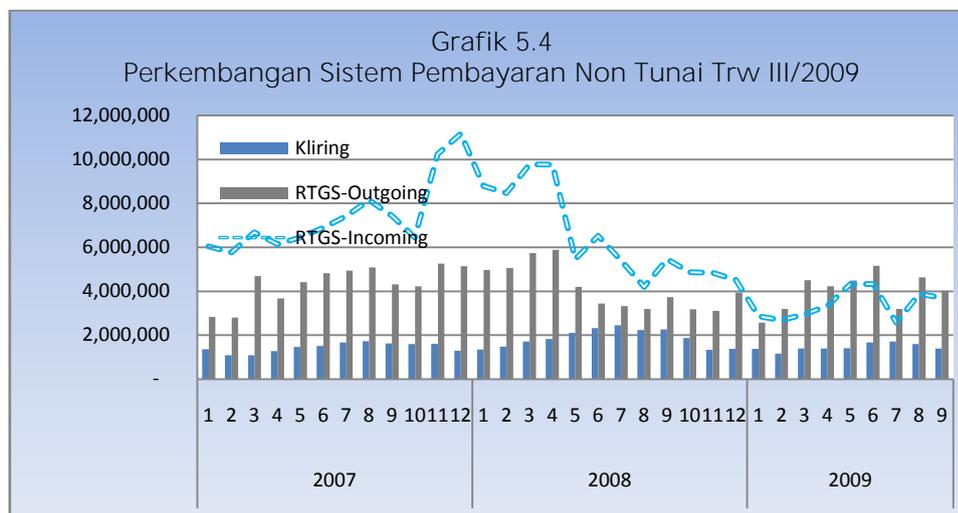
Uang palsu dengan pecahan nominal Rp 100.000 dan Rp 50.000 paling banyak ditemukan pada triwulan laporan. Sebanyak 79.8% dari total bilyet uang palsu merupakan pecahan Rp 100.000, diikuti oleh pecahan Rp 50.000 sebanyak 19,05%, pecahan Rp 20.000 dengan persentase sebesar 0,81%, pecahan Rp 10.000 sebanyak 0,27%, dan pecahan Rp 5.000 sebanyak 0,07%. Dalam mencegah peredaran uang palsu, Bank Indonesia turut aktif melakukan kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat luas baik dalam bentuk penyebaran *leaflet*, sosialisasi melalui seminar, dan pemasangan *pamflet*. Selama triwulan III-2009, Bank Indonesia telah 8 kali melakukan sosialisasi keaslian uang rupiah melalui forum pertemuan yang diikuti oleh aparat berbagai instansi, masyarakat umum, maupun pelajar dan mahasiswa di Lampung. Dari target sosialisasi sebanyak 20 kali selama tahun 2009, sudah terlaksana 18 kali sosialisasi hingga triwulan III-2009 ini.



Sumber : Bank Indonesia

4. PERKEMBANGAN RTGS DAN KLIRING LOKAL

Pada triwulan III-2009, terjadi *net-outgoing* pada transaksi non tunai melalui sistem BI-RTGS. Hal ini akibat rata-rata bulanan transaksi keluar Provinsi Lampung lebih tinggi dibanding transaksi masuk Provinsi Lampung. Selama triwulan III-2009, rata-rata bulanan *outgoing transaction* tercatat sebesar Rp3,96 triliun, sedangkan rata-rata bulanan *incoming transaction* sebesar Rp3,38 triliun. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terjadi penurunan rata-rata bulanan pada *outgoing* maupun *incoming transaction*. Pada triwulan II-2009, rata-rata bulanan transaksi keluar Lampung berjumlah Rp4,62 triliun, sedangkan rata-rata bulanan transaksi keluar Lampung bernilai Rp3,73 triliun.



Sumber : Bank Indonesia

Transaksi keuangan non tunai melalui sistem kliring mengalami peningkatan nominal transaksi. Pada triwulan lalu, rata-rata bulanan transaksi keuangan dengan nominal Rp100 juta ke bawah melalui sistem kliring senilai Rp1,49 triliun dengan rata-rata volume 48.736 lembar warkat. Nilai transaksi ini meningkat menjadi Rp1,57 triliun dengan rata-rata volume sebanyak 48.613 lembar warkat selama triwulan III-2009. Pada kliring pengembalian, terjadi peningkatan nilai dan volume pada triwulan laporan. Pada triwulan sebelumnya, kliring pengembalian (baik karena alasan cek dan BG kosong maupun karena alasan lain) bernilai Rp17,7 triliun dengan jumlah warkat sebanyak 732 lembar. Pada triwulan laporan, nilai kliring

pengembalian meningkat menjadi Rp22,16 triliun dengan jumlah warkat sebanyak 846 lembar.

Tabel 5.1
Perkembangan Rata-rata Triwulan Transaksi Kliring di Provinsi Lampung

Kliring	2007		2008				2009		
	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III
Penyerahan									
Nominal (milyar Rp)	1,673.08	1,501.26	1,517.22	2,089.14	2,317.5	1,531.0	1,310.0	1,492.0	1,566.8
Lembar	45,156	41,402	40,370	46,708	48,371	43,403	44,701	48,736	48,613
Pengembalian									
Nominal (milyar Rp)	11.02	16.09	12.49	12.55	20.37	40.67	17.79	17.70	22.16
Lembar	483	610	533	479	655	775	707	732	846

Sumber : Bank Indonesia

5. PENUKARAN UANG PECAHAN KECIL

Dalam rangka menjamin ketersediaan uang kartal dalam jumlah nominal yang cukup dan jenis pecahan yang sesuai, maka Bank Indonesia Bandar Lampung menyediakan loket penukaran uang di kantor Bank Indonesia maupun melalui kegiatan kas keliling. Melalui kedua loket tersebut, masyarakat dapat menukarkan uangnya menjadi uang pecahan kecil tanpa dipungut biaya.

Nilai uang pecahan kecil yang ditukarkan melalui kas keliling maupun loket di Bank Indonesia pada triwulan III-2009 mencapai Rp66,38 miliar. Jumlah ini meningkat sangat signifikan dibandingkan pada triwulan II-2009 yang tercatat sebesar Rp31,39 miliar. Adapun pecahan uang kertas terbanyak yang ditukar terdiri atas pecahan Rp5.000,- senilai Rp17,58 miliar atau 26,48% dari jumlah keseluruhan. Terbanyak kedua adalah pecahan Rp10.000,- senilai Rp17,36 miliar atau 26,16% dari keseluruhan, serta pecahan Rp2.000,- senilai Rp16,91 miliar atau 25,47% dari total penukaran uang pecahan kecil. Sedangkan uang logam yang banyak ditukar adalah pecahan Rp500,- senilai 0,773 miliar atau 1,16% dari keseluruhan penukaran uang kecil. Seiring dengan telah beredarnya uang kertas pecahan Rp2.000 di Lampung, maka antusiasme penukaran uang pecahan tersebut meningkat.

Tabel 5.2
Perkembangan Penukaran Uang Pecahan Kecil Triwulan III-2009

Periode	Nominal (Rp Juta)									Total
	Uang Kertas					Uang Logam				
	20,000	10,000	5,000	2,000	1,000	1,000	500	200	100	
Juli	3,272.16	4,883.60	4,388.75		30.538	0	403.175	76	33.399	13,087.62
Agustus	4,336.66	5,978.17	5,772.81	5,844.20	15.655	0	301.112	63.225	38.6	22,350.43
September	4,639.62	6,503.13	7,418.08	11,064.30	1200.575	0	69.001	19	32.2	30,945.91
Triwulan III-2009	12,248.44	17,364.90	17,579.64	16,908.50	1,246.77	0.00	773.29	158.23	104.20	66,383.96
(%)	18.45	26.16	26.48	25.47	1.88	0.00	1.16	0.24	0.16	100

Sumber : Bank Indonesia

BAB VI – PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH

Indikator kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung semakin menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran hingga Februari 2009 mencapai 6,18% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 7,20%. Sedangkan daya beli petani yang diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan III 2009 mencapai 108,81 atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 107,84 maupun periode yang sama tahun 2008 sebesar 108,05. Sementara itu, dalam rangka peningkatan IPM, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan upaya melalui beberapa program, baik yang dicanangkan secara nasional maupun atas inisiatif daerah.

1. KETENAGAKERJAAN DAN UPAH

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung tahun 2009 semakin membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung pada Februari 2009 bertambah sebanyak 193,8 ribu orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,85% dari posisi Agustus 2008. Sedangkan bila dibandingkan dengan Februari 2008 jumlah tersebut bertambah sebanyak 78.600 orang.

Tabel 6.1 Indikator Ketenagakerjaan
di Provinsi Lampung (ribuan)

Uraian	Februari 2008	Agustus 2008	Februari 2009	Persentase Perubahan	
				Feb'09 - Feb'08	Feb'09 - Agt'08
Penduduk Usia 15 tahun keatas	5,190.2	5,248.3	5,315.2	2.41%	1.27%
Angkatan Kerja	3,659.2	3,568.8	3,738.3	2.16%	4.75%
Bekerja	3,428.8	3,313.6	3,507.4	2.29%	5.85%
Pengangguran Terbuka	230.4	255.2	230.9	0.22%	-9.52%
Bukan Angkatan Kerja	1,531.0	1,679.6	1,576.9	3.00%	-6.11%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.5	68.0	70.3	-0.24%	3.43%

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Peningkatan jumlah tenaga kerja selama Agustus 2008 - Februari 2009, ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebesar 11,62% atau meningkat 213,8 ribu orang. Hal ini terkait dengan musim panen beberapa komoditas pertanian dan perkebunan, seperti tanaman kopi, kakao, tebu, padi dan palawija. Seperti diketahui bahwa masa panen komoditas pertanian membutuhkan tenaga buruh harian yang cukup banyak.

Selain sektor pertanian, peningkatan jumlah tenaga kerja juga terjadi pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan sebesar 7,09% (22 ribu orang), serta sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 3,68% (20 ribu orang). Peningkatan jumlah tenaga kerja pada sektor ini sejalan dengan pertumbuhan *output* yang terjadi. Data BPS menunjukkan bahwa jika dibandingkan triwulan III-2008, sektor jasa swasta dan sektor PHR pada triwulan I-2009 mengalami peningkatan *output* masing-masing sebesar 2,68% dan 1,13%.

Sementara itu, sektor konstruksi mengalami penurunan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 39,82%. Sektor konstruksi bersifat musiman dan sangat tergantung pada keberadaan paket proyek pembangunan infrastruktur baik dari pusat maupun daerah. Pada awal tahun 2009, belum banyak proyek-proyek pemerintah yang terealisasi. Hal ini terkonfirmasi dari hasil *Quick Survey* yang dilakukan oleh KBI Bandar Lampung, bahwa realisasi belanja modal pemerintah daerah hingga semester I-2009 baru mencapai 24,05% (terendah dibandingkan komponen belanja lainnya). Sedangkan serapan dana APBN untuk belanja modal hingga akhir triwulan III-2009 baru mencapai 47%.

Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi juga mengalami penurunan jumlah tenaga kerja pada tahun 2009, meski jumlah penurunannya tidak setajam pada sektor konstruksi. Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini berkurang menjadi 157,9 ribu orang, atau turun sebesar 2,65% dari 162,2 ribu orang pada Agustus 2008.

Sektor lain yang juga mengalami penurunan jumlah tenaga kerja adalah sektor industri. Jumlah tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 2,32%, yaitu dari 271,9 ribu orang pada Agustus 2008 menjadi 265,6 ribu orang pada Februari 2009. Penurunan ini diakibatkan oleh turunnya jumlah permintaan luar negeri dan meningkatnya biaya bahan baku impor, seperti industri pengolahan makanan dan minuman yang mengalami kerugian akibat peningkatan harga raw *sugar*.

Tabel 6.2 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama

Uraian	Februari 2008	Agustus 2008	Februari 2009	Persentase Perubahan	
				Feb'09 - Feb'08	Feb'09 - Agt'08
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	2,044.5	1,839.5	2,053.3	0.43%	11.62%
Industri	237.4	271.9	265.6	11.88%	-2.32%
Konstruksi	108.3	153.7	92.5	-14.59%	-39.82%
Perdagangan, Rumah Makan, Jasa Akomodasi	534.2	543.1	563.1	5.41%	3.68%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	161.3	162.2	157.9	-2.11%	-2.65%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	316.2	310.2	332.2	5.06%	7.09%
Lainnya	26.9	33.0	42.8	59.11%	29.70%
Total	3,428.8	3,313.6	3,507.4	2.29%	5.85%

Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan status pekerjaan, terdapat dua kelompok utama kegiatan ekonomi yaitu formal dan informal, dimana pekerjaan formal adalah mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan kategori status sebagai buruh/karyawan, sementara informal adalah yang berstatus diluar kriteria tersebut. Dalam waktu enam bulan terakhir, nampak kenaikan jumlah pekerja didominasi kegiatan ekonomi informal, jumlahnya mencapai 78,81%. Pekerja dengan status pekerja bebas di sektor pertanian menunjukkan kenaikan yang paling tinggi, yaitu sebesar 22,32% yang diikuti oleh pekerja dengan status pekerja tak dibayar/pekerja keluarga sebesar 12,60%. Hal ini mengindikasikan, meski terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja, namun pada umumnya masih dalam pekerjaan informal yang rentan untuk berpindah pekerjaan ke sektor lain pada periode berikutnya.

Tabel 6.3 Jumlah Penduduk yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan

Uraian	Februari 2008	Agustus 2008	Februari 2009	Persentase Perubahan	
				Feb'09 - Feb'08	Feb'09 - Agt'08
Berusaha sendiri	500.0	529.7	538.3	7.66%	1.62%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	840.5	891.9	910.1	8.28%	2.04%
Berusaha dibantu buruh tetap	85.1	87.2	89.4	5.05%	2.52%
Buruh/karyawan	626.1	593.5	654.0	4.46%	10.19%
Pekerja bebas di Pertanian	304.0	211.0	258.1	-15.10%	22.32%
Pekerja bebas non pertanian	168.0	206.5	163.9	-2.44%	-20.63%
Pekerja tak dibayar	904.8	793.7	893.7	-1.23%	12.60%
Total	3,428.5	3,313.5	3,507.5	2.30%	5.85%

Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Selain bekerja pada sektor formal dan informal di dalam provinsi maupun luar provinsi, sejumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung juga bekerja pada sektor formal maupun informal di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Data Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung memperlihatkan bahwa pada periode Januari – Oktober Tahun 2008, jumlah TKI asal Lampung tercatat sebanyak 1.183 orang, dimana hampir seluruhnya merupakan pekerja perempuan dan bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga. Sedangkan sepanjang tahun 2007, jumlah TKI asal Lampung tercatat sebanyak 2.994 orang yang tersebar di 9 negara, yaitu Malaysia (1.172 orang), Arab Saudi (1.120 orang), Taiwan (294 orang), Singapura (242 orang), Hong Kong (137 orang), Brunei Darussalam (12 orang), Kuwait (12 orang), UEA (4 orang), dan Qatar (1 orang).

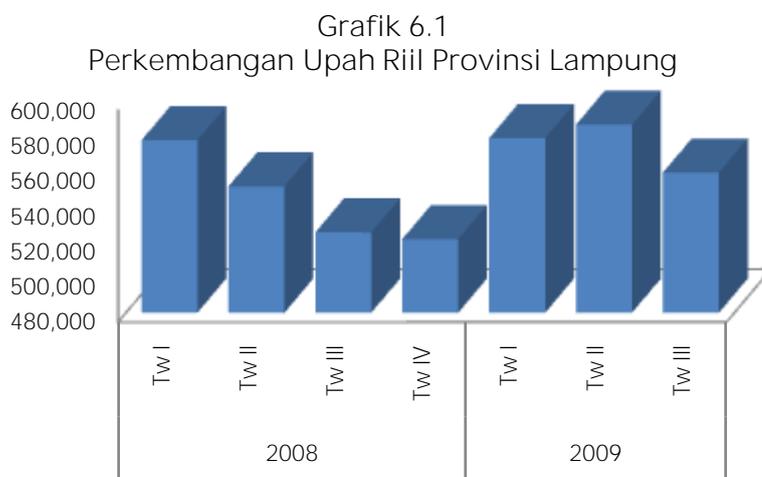
Salah satu upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran adalah melalui peningkatan investasi di daerah. Menurut BPMD (Badan Penanaman Modal Daerah) Provinsi Lampung, investasi hingga bulan Oktober 2009 mencapai 18 proyek yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung. Dengan investasi senilai Rp4,9 Triliun tersebut, diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga 76.086 orang. Tentunya hal ini sangat positif bagi perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.

Keputusan Gubernur Lampung No. G/652/B.VII/HK/2008 tertanggal 17 Desember 2008 menetapkan bahwa sejak 1 Januari 2009 Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung adalah sebesar Rp691.000,- atau lebih tinggi dibandingkan tahun

sebelumnya yang hanya sebesar Rp617.000,-. Sejak berlakunya aturan tersebut hingga triwulan III-2009, beberapa kalangan pengusaha telah melakukan penyesuaian. Salah satunya adalah kenaikan upah buruh bongkar muat di Pelabuhan Panjang yang mengalami kenaikan sebesar 9,8%.

Kenaikan UMP pada Tahun 2009 belum dapat dipastikan mengakselerasi daya beli atau kesejahteraan pekerja. Hal ini dapat dilihat melalui perkembangan nilai upah riil, yaitu dengan membandingkan nilai upah nominal dengan IHK umum. Nilai upah riil di Provinsi Lampung pada triwulan III-2009 (menggunakan IHK bulan September 2009) terhitung sebesar Rp559.287 atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp586.388. Dengan asumsi tidak adanya penerimaan lain saat menjelang Idul Fitri (THR), maka dapat disimpulkan bahwa daya beli pekerja menjadi tergerus akibat tingginya kebutuhan pokok pada saat hari raya (September 2009).

Walaupun demikian, bila dibandingkan tahun 2008, terlihat bahwa upah riil pekerja di Lampung mengalami peningkatan. Hal ini berarti, kebijakan pemerintah untuk menaikkan UMP Lampung tahun 2009 cukup efektif untuk menjadi penyangga merosotnya daya beli masyarakat.



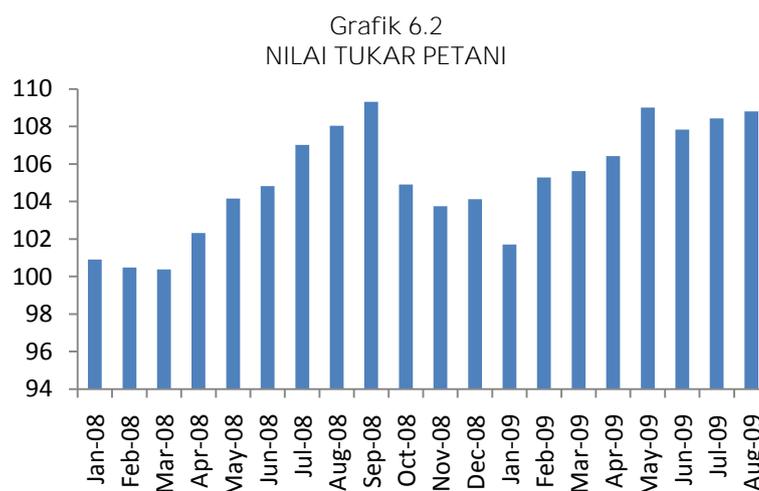
Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

2. KESEJAHTERAAN

2.1. Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani di Lampung pada triwulan III 2009 mengalami peningkatan. Hal ini terindikasi melalui Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan III 2009 (Agustus 2009) yang nilainya mencapai 108,81 atau tumbuh sebesar 0,90% (qtq) dan 0,70% (yoy).

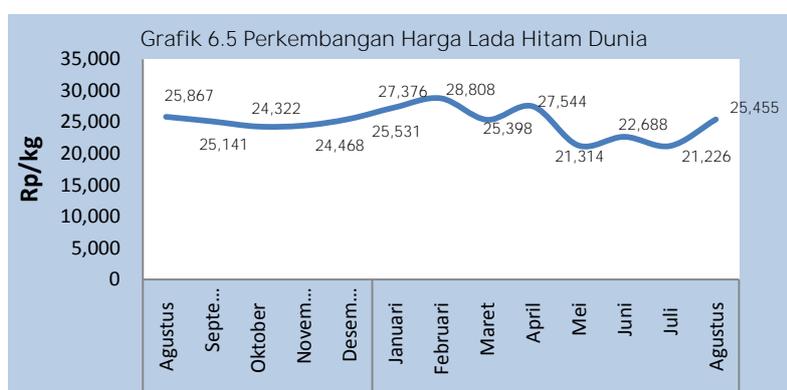
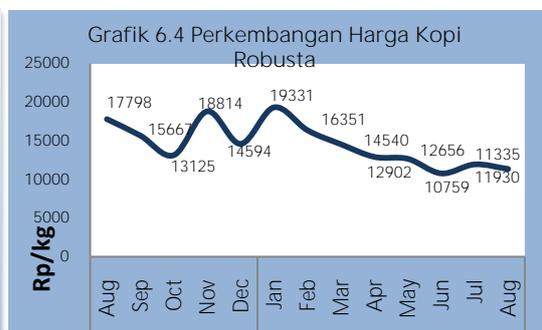
Peningkatan NTP secara triwulanan sebesar 0,90% (qtq) disebabkan oleh kenaikan indeks yang diterima petani (1,93%) lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks yang dibayar oleh petani (1,02%). Komoditas yang memicu kenaikan indeks yang diterima oleh petani pada bulan triwulan III 2009 adalah kenaikan harga pada komoditas *gabah kering giling, kacang kedelai, kopi biji kering, karet, lada, cengkeh, ikan tongkol, ikan layang, dan ikan kembung.*



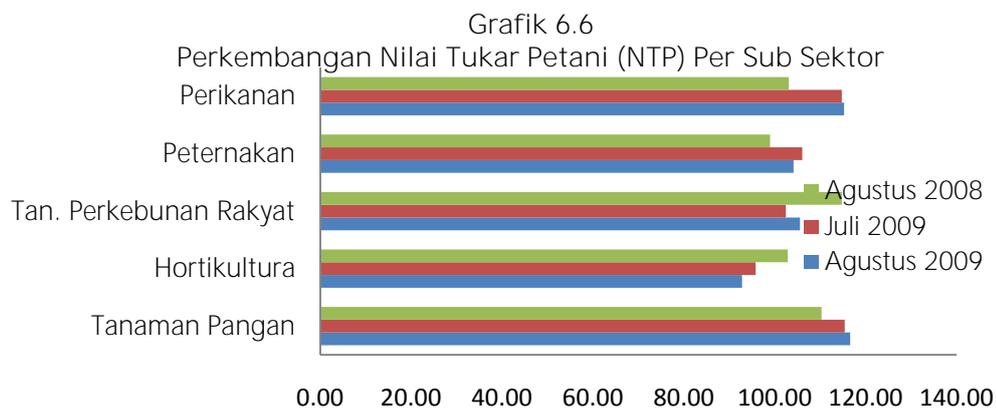
Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Secara triwulanan, kenaikan NTP terbesar terjadi pada sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR), yaitu 2,55%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani TPR dari hasil penjualan komoditasnya merupakan yang tertinggi dibandingkan pendapatan petani dari sub sektor lainnya. Komoditas yang memicu kenaikan indeks yang diterima petani pada tanaman perkebunan adalah karet, lada, dan kopi. Hal ini dapat terindikasi dari kenaikan harga komoditas tersebut di pasar dunia yang meningkat dibandingkan triwulan II 2009. Namun demikian, apabila

dibandingkan Agustus 2008, NTP TPR Agustus 2009 mengalami penurunan sebesar 8,01% (yoy).



Sumber : Bappebti (diolah)



Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Sementara itu, NTP pada sub sektor tanaman pangan triwulan III 2009 mencapai 116,54 atau tumbuh 2,52% (qtq) dan 5,65% (yoy). Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani tanaman pangan semakin meningkat. Salah satu komoditas yang mendorong terjadinya peningkatan indeks yang diterima petani adalah gabah kering giling dan kacang kedelai. Diantara 5 subsektor, terdapat 3 subsektor yang mengalami penurunan nilai NTP secara triwulanan, yaitu subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan indeks yang diterima (It) jauh lebih rendah dibandingkan indeks yang harus dibayar (Ib) petani.

Tabel 6.4 Nilai Tukar Petani Provinsi dan Persentase Perubahannya Agustus 2009 (2007=100)

Propinsi	IT		IB		NTP	
	Indeks	%Perb	Indeks	%Perb	Rasio	%Perb
Nangroe Aceh Darussalam	119.13	1.79	118.54	0.91	100.50	0.87
Sumatera Utara	122.18	-0.22	120.77	0.52	101.16	-0.74
Sumatera Barat	124.81	2.96	119.92	0.72	104.08	2.22
Riau	115.48	0.96	115.77	0.20	99.75	0.75
Jambi	110.33	-1.13	116.51	0.13	94.69	-1.25
Sumatera Selatan	117.90	2.07	116.35	0.33	101.34	1.73
Bengkulu	129.06	0.88	124.99	0.72	103.25	0.16
Lampung	128.31	1.12	117.92	0.77	108.81	0.34
Bangka Belitung	103.61	1.37	109.64	0.82	94.50	0.54
Kep. Riau	116.07	0.35	115.25	0.24	100.71	0.10
Jawa Barat	120.39	1.45	123.11	0.54	97.79	0.90
Jawa Tengah	116.30	1.21	117.84	0.57	98.70	0.64
DI Yogyakarta	127.73	1.03	116.72	0.64	109.43	0.40
Jawa Timur	119.77	0.74	121.69	0.77	98.43	-0.03
Banten	120.31	0.17	122.45	0.17	98.26	0.00
Bali	122.19	0.30	118.70	0.22	102.93	0.08
Nusa Tenggara Barat	117.49	0.40	122.08	0.54	96.24	-0.14
Nusa Tenggara Timur	123.41	0.70	121.97	0.74	101.18	-0.04
Kalimantan Barat	117.99	0.19	117.49	0.26	100.43	-0.07
Kalimantan Tengah	118.92	1.47	118.94	0.40	99.98	1.06
Kalimantan Selatan	119.50	1.48	117.91	0.13	101.35	1.35
Kalimantan Timur	119.62	1.07	118.83	0.65	100.67	0.41
Sulawesi Utara	120.30	-0.31	119.93	0.01	100.31	-0.33
Sulawesi Tengah	123.73	1.19	124.40	0.64	99.46	0.55
Sulawesi Selatan	125.28	1.59	122.67	0.40	102.13	1.18
Sulawesi Tenggara	131.71	2.22	120.88	0.71	108.96	1.50
Gorontalo	117.78	-0.55	119.23	0.19	98.79	-0.74
Sulawesi Barat	128.95	1.19	121.47	0.45	106.16	0.74
Maluku	127.70	1.08	119.29	0.55	107.05	0.53
Maluku Utara	121.75	2.98	120.60	0.93	100.96	2.04
Papua Barat	125.15	-0.55	119.62	1.37	104.62	-1.90
Papua	120.77	-0.14	120.40	0.79	100.31	-0.93
Nasional	120.51	0.99	120.22	0.57	100.24	0.42

Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

3.2. Indeks Pembangunan Manusia

Dengan adanya beberapa program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung tahun 2009 mengalami peningkatan. IPM Provinsi Lampung tahun 2007 tercatat sebesar 69,9. Nilai tersebut tidak menunjukkan perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang bernilai 69,4 atau hanya meningkat 0,5 poin. Peningkatan IPM tertinggi terjadi pada indeks kelangsungan hidup, yang mengalami peningkatan sebesar 1 poin yaitu dari 72,5 menjadi 73,5. Diikuti angka harapan hidup dari 68,5 tahun menjadi 69,1 tahun atau meningkat 0.6 poin.

Dalam rangka terus meningkatkan indeks kelangsungan hidup, pemerintah mengeluarkan beberapa program unggulan di bidang kesehatan, seperti pencaangan penanggulangan kesehatan pada daerah terpencil dan pulau-pulau; pemberantasan penyakit menular dengan pendekatan lingkungan dan hidup sehat serta Lampung Sehat 2010. Sementara untuk meningkatkan Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah, program yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung adalah :

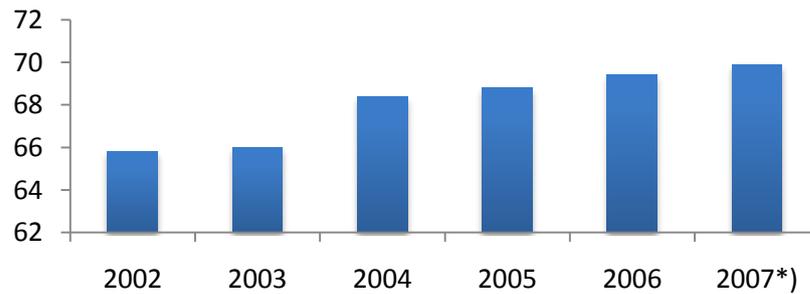
1. Beasiswa bagi anak kurang mampu (miskin) dalam rangka mendukung program bebas biaya pendidikan dan mendorong percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu
2. Rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pelaksanaan pembelajaran yang bermutu dan kondusif di sekolah.
3. Pemberantasan buta aksara (keaksaraan fungsional) dalam rangka mempercepat pengurangan angka kemiskinan masyarakat.
4. Peningkatan kesejahteraan guru dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pendidikan yang merata khususnya di desa tertinggal, terpencil/ terisolir.
5. Pembangunan sekolah terpadu bertaraf internasional di Sulusuban, Lampung Tengah dalam rangka mendorong terwujudnya pendidikan yang bermutu dan berdaya saing pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Tabel 6.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung

No.	Keterangan	2005	2006	2007*)
Komponen IPM				
1	Angka harapan hidup (tahun)	68,0	68,5	69,1
2	Angka melek huruf (%)	93,5	93,5	93,7
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,2	7,3	7,4
4	Paritas daya beli (Rp ribu)	605,1	607,0	607,4
Indeks Komponen				
1	Indeks kelangsungan hidup	71,7	72,5	73,5
2	Indeks pengetahuan	78,3	78,6	78,9
3	Indeks daya beli	56,4	57,1	57,2
IPM		68,8	69,4	69,9

Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Grafik 6.7 IPM Provinsi Lampung 2002-2007

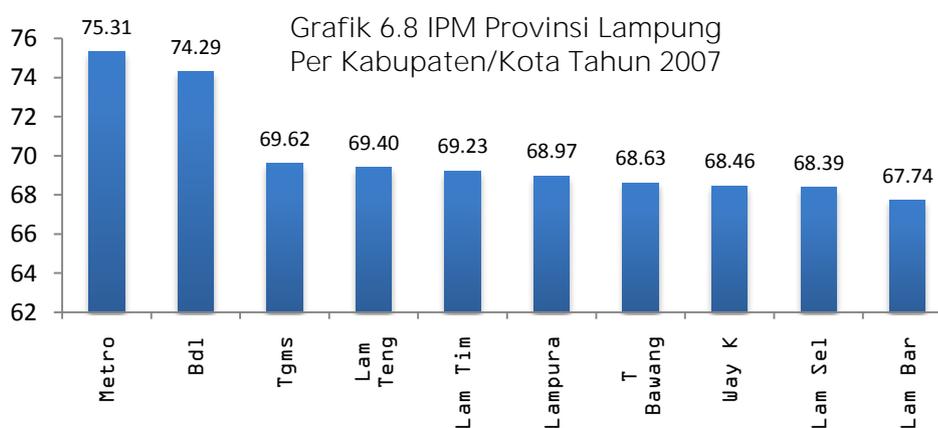


Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan data BPS tahun 2007, kabupaten yang nilai IPM-nya rendah adalah kabupaten dengan tipologi wilayah gunung/bukit, pantai dan kombinasi keduanya. Selain Lampung Barat, kabupaten yang memiliki nilai IPM terendah adalah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Way Kanan, dan Tulang Bawang. Sedangkan daerah dengan nilai IPM tertinggi adalah Kota Metro, kemudian Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat disebabkan karena kedua kota tersebut merupakan sentra pengembangan pendidikan di Provinsi Lampung.

Dalam rangka meningkatkan kualitas IPM, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan serta kualitas pelayanan kesehatan sebagai prioritas pembangunan tahun 2009, yaitu melalui program unggulan BDPP (Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan) menuju Rintisan

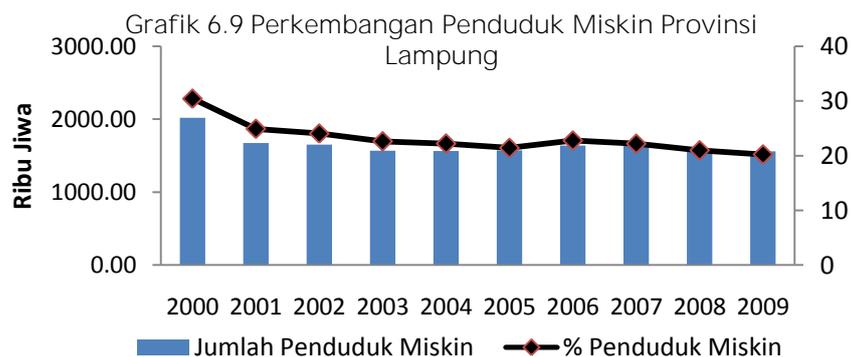
Sekolah Gratis dan PKMB (Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi) untuk masyarakat non peserta Jamkesmas, Jamkesda, Askes, maupun asuransi kesehatan lainnya. Program ini dilaksanakan di RSUD Liwa dan Puskesmas di 17 Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Pendanaan bagi program PKMB mencapai Rp41 miliar atau mencapai 7,6% dari total APBD Lampung Barat tahun 2009, sedangkan alokasi bagi program pendidikan mencapai Rp188 miliar atau setara dengan 35% dari total APBD Lampung Barat tahun 2009 (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan sebesar 20%).



Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

3.3. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada Maret 2009 mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2009 tercatat 1,55 juta atau turun 2,09% dibandingkan periode yang sama tahun 2008. Demikian pula bila dibandingkan dengan total jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 juga mengalami penurunan dibandingkan posisi Maret 2008, yaitu dari 20,98% menjadi 20,22%.



Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin Lampung pada Maret 2008 - Maret 2009 diantaranya dipengaruhi oleh:

1. Peningkatan produksi padi. Berdasarkan hasil angka ramalan II 2009 BPS, produksi padi Lampung pada *subround I* (Januari – April) 2009 meningkat menjadi 206 ribu ton GKG atau naik 8,82% dibandingkan produksi padi pada *subround I* 2008.
2. Adanya kenaikan Nilai Tukar Petani pada Maret 2009 dibandingkan Maret 2008 sebesar 5,23% (yoy). Hal ini diakibatkan oleh peningkatan indeks yang diterima oleh petani (14,77%) lebih besar dibandingkan indeks yang dibayar petani (9,07%).
3. Peningkatan daya beli petani dan nelayan pada periode Maret 2008 – Maret 2009. Hal ini terlihat dari meningkatnya NTP pada subsektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan, dimana pada umumnya penduduk miskin bekerja pada ketiga sektor tersebut. NTP sub sektor tanaman pangan pada Maret 2009 mencapai 108,96 atau meningkat 13,81% (yoy), sedangkan NTP sub sektor peternakan mencapai 103,85 atau tumbuh 4,95% (yoy). Sementara itu, NTP sub sektor perikanan mencapai 115,38 atau meningkat 14,68% (yoy).
4. Pendistribusian dana bantuan langsung tunai (BLT) tahap ketiga
5. Realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
6. Program pemerintah yang mendukung pengentasan kemiskinan lain, seperti KUR dan Raskin

Meski terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, namun garis kemiskinan mengalami kenaikan. Garis kemiskinan pada Maret 2008 tercatat sebesar Rp172.332,- per kapita per bulan, meningkat sebesar 9,56% menjadi Rp188.812,- per kapita per bulan pada Maret 2009.

Komposisi penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan, bahkan penduduk miskin yang berada di pedesaan semakin meningkat. Pada tahun 2008, dari 1.591 ribu jiwa penduduk miskin di Provinsi Lampung, yang berada di pedesaan mencapai 77,03%, sedangkan pada tahun 2009 meningkat menjadi 77,58%.

Tabel 6.6
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2007-Maret 2009

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Persentase Penduduk Miskin	
	2008	2009	2008	2009
Perkotaan	203,685	224,168	365.6 (17,85%)	349.3 (16,78%)
Perdesaan	160,734	175,734	1,226.0 (22,14%)	1,209.0 (21,49%)
Kota + Desa	172,332	188,812	1,591.6 (20,98%)	1,558.3 (20,22%)

Terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah secara nasional mencanangkan program BLT (Bantuan Langsung Tunai), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan Raskin. Di Lampung, BLT diberikan untuk Total 785.041 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Dengan rincian, Kabupaten Lampung Selatan 172.155 RTS, Lampung Tengah 113.634 RTS, Lampung Timur sebanyak 99.633 RTS, Kabupaten Tanggamus sebanyak 84.731 RTS, Tulangbawang 81.154 RTS, Lampung Utara 69.734 RTS, Lampung Barat 49.506 RTS, Kabupaten Way kanan 47.910 RTS, Bandar Lampung 58.862 RTS, dan Metro 7.419 RTS. Dana BLT Tahap I yang didistribusikan adalah sebesar Rp300 ribu/RTS dengan realisasi penyaluran sebesar 98,19%, Tahap II sebesar Rp400 ribu/RTS, dan Tahap III sebesar Rp200 ribu/RTS yang telah selesai di distribusikan pada awal Mei 2009.

Pemerintah juga menyerahkan bantuan pemerintah berupa PNPM Mandiri untuk Provinsi Lampung Tahun 2009 sebesar Rp366,76 miliar untuk 137 kecamatan di 11 kabupaten/kota yang terdiri dari PNPM Perkotaan sebesar Rp24 miliar, PNPM Perdesaan Rp220 miliar, PNPM Desa Tertinggal dan khusus Rp15 miliar, dan PNPM Infrastruktur Pedesaan sebesar Rp105 miliar. Pada tahun 2009, PNPM Mandiri di Lampung terutama diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Mengenai program penyaluran Raskin (Beras Miskin), pagu Raskin Provinsi Lampung untuk tahun 2009 mencapai 11.366 ton/bulan atau 136.393 ton/tahun. Raskin tersebut didistribusikan kepada 757.741 RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang tersebar kedalam 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dimana masing-masing RTS mendapatkan 15 kg beras/bulan dengan harga tebus Rp1.600/kg.

Data BULOG Divre Lampung menunjukkan bahwa sejak Januari 2009 hingga Oktober 2009 (per 9 Oktober 2009), Raskin yang telah disalurkan mencapai 105.087 ton atau telah mencapai 92,46% dari target 113.616 ton (Januari 2009 hingga Oktober 2009). Alokasi Raskin bulan Oktober 2009 dilakukan pada bulan September 2009 mengingat lebaran terjadi di penghujung September 2009, sehingga dipastikan banyak masyarakat yang membutuhkan beras murah ditengah kenaikan harga sembako menjelang Idul Fitri. Sedangkan alokasi Raskin bulan November 2009 akan dilakukan pada bulan Oktober 2009 dan alokasi bulan Desember 2009 akan dilakukan pada bulan November 2009. Realisasi Raskin terendah terjadi pada daerah otonomi baru, yaitu Pringsewu, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat, sehingga perlu dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat di 3 wilayah tersebut.

Sementara itu, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan pembiayaan kepada dunia usaha (dalam hal ini UMK), maka pemerintah menyalurkan KUR. Hingga September 2009, baki debet KUR perbankan di Provinsi Lampung mencapai Rp285,6 miliar. Ditengah ketidakpastian iklim keuangan global, bantuan dalam memberdayakan UMK melalui pembiayaan harus terus dilakukan. Hal ini sangat penting terutama sebagai *buffer* dalam memperkecil risiko banyaknya perusahaan yang *downsizing*, bahkan menjadi usaha berskala kecil.

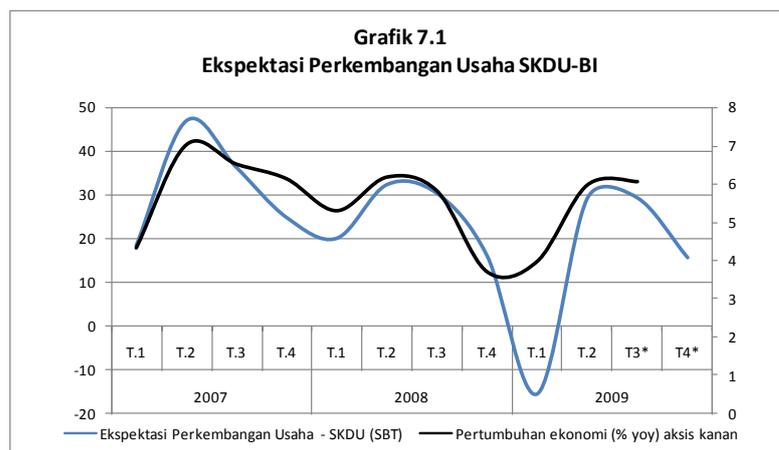
BAB VII – PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

1. PROSPEK EKONOMI DAERAH

Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan IV-2009 diperkirakan tumbuh positif meskipun lebih lambat dibandingkan triwulan III-2009. Perekonomian Lampung Triwulan IV-2009 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,6%-5,2% (yoy). Dengan demikian, target pemerintah daerah untuk pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2009 pada kisaran 4,3-4,8% diperkirakan akan terlampaui.

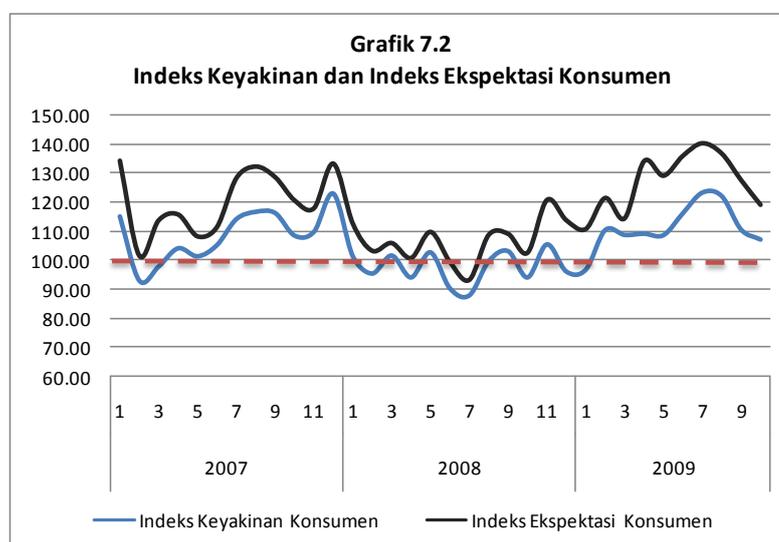
Dari keseluruhan kegiatan perekonomian, konsumsi swasta tetap sebagai mesin utama penggerak. Konsumsi Pemerintah juga akan memberi sumbangan yang cukup besar seiring dengan puncak realisasi belanja Pemerintah Daerah pada triwulan III-2009. Sementara itu, investasi mulai mengambil peranan yang lebih besar. Meningkatnya permintaan domestik dan kondisi perekonomian yang membaik memberikan potensi pada peningkatan investasi di akhir tahun 2009. Dari sisi eksternal, ekspor akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi seiring meningkatnya permintaan luar negeri dengan terdiversifikasinya negara tujuan ekspor dan pangsa produk ekspor non migas.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2009 adalah perkembangan ekspektasi kegiatan dunia usaha, dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha di Lampung. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) oleh Bank Indonesia Bandar Lampung mengindikasikan bahwa persepsi pengusaha terhadap perkembangan usaha pada triwulan IV-2009 menurun dibandingkan dengan triwulan III-2009, meskipun masih dalam level positif (lihat Grafik). Hasil Survei Konsumen KBI Bandar Lampung juga mengindikasikan masih adanya optimisme dari konsumen pada triwulan mendatang, meskipun terjadi penurunan indeks.



*angka sementara

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha KBI Bandar Lampung



Sumber : Survei Ekspektasi Konsumen KBI Bandar Lampung

Dari sisi permintaan, laju pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi masyarakat meskipun sumbangannya tidak sebesar triwulan III-2009. Banyaknya hajatan masyarakat, serta perayaan hari besar keagamaan diakhir triwulan laporan akan kembali mendorong permintaan sehingga konsumsi masyarakat akan terus terdongkrak. Sementara, pertumbuhan konsumsi pemerintah diperkirakan juga terjadi peningkatan seiring dengan masa puncak realisasi belanja APBD untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur pada triwulan IV-2009 setelah realisasi belanja Pemerintah Daerah pada triwulan laporan belum optimal. Faktor positif yang diperkirakan turut mendorong realisasi belanja Pemerintah Daerah adalah persetujuan

APBD Perubahan pada awal triwulan IV-2009. Selain itu pembangunan berkelanjutan terhadap infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan dan irigasi diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2009.

Investasi pada triwulan IV-2009 kedepan, diperkirakan akan menunjukkan pergerakan yang positif. Stabilitasnya kondisi perekonomian makro pasca krisis keuangan global serta membaiknya permintaan agregat akan mendorong percepatan realisasi investasi swasta. Sementara itu, investasi yang berasal dari pemerintah (APBD dan APBN) diperkirakan cukup tinggi, terlihat dari realisasi belanja modal pada APBD/APBN diperkirakan mencapai puncaknya. Realisasi proyek-proyek pembangunan pemerintah diharapkan dapat menstimulus perekonomian lebih lanjut. Namun demikian beberapa hal yang perlu dicermati antara lain pola pengeluaran pemerintah daerah dalam realisasi APBD serta perbaikan proses perizinan yang terus digalakkan oleh pemda, sehingga dapat memberikan stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi yang efektif.

Kegiatan ekspor diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan positif, seiring dengan meningkatnya permintaan luar negeri dan stabilitasnya harga komoditas di pasaran internasional. Peningkatan produktifitas komoditas ekspor seperti hasil-hasil perkebunan, menjadi pendorong meningkatnya ekspor pada triwulan IV tahun 2009.

Di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan IV-2009 diperkirakan akan didukung oleh sektor perdagangan, dan sektor industri pengolahan. Sementara sektor pertanian yang merupakan sektor utama dalam struktur perekonomian Lampung, diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang terbatas, terkait mulai berakhirnya masa panen beberapa produk perkebunan dan tanaman bahan makanan.

Sektor industri pengolahan diperkirakan akan tumbuh lebih cepat karena naiknya produksi seiring melimpahnya bahan baku yang tersedia serta meningkatnya permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri yang tercermin dari hasil survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun demikian, kendala infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan aksesibilitas jalan yang lebih luas ke sentra-sentra produksi, serta ketersediaan sarana produksi masih menjadi faktor risiko yang dapat membatasi perkembangan ekonomi Lampung triwulan mendatang

Sektor perdagangan hotel dan restoran diperkirakan akan terjadi peningkatan, seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Banyaknya hajatan masyarakat,

perayaan hari besar keagamaan serta liburan akhir tahun akan menjadi pendorong peningkatan kinerja sektor ini.

2. PROSPEK INFLASI DAERAH

Pada triwulan IV-2009, tekanan harga umum di Provinsi Lampung diperkirakan akan mulai melemah. Tekanan harga dari ekspektasi dan interaksi permintaan-penawaran tidak setinggi triwulan lalu. Kemampuan sisi penawaran dalam merespon peningkatan permintaan pada triwulan laporan menyebabkan tekanan inflasi dari sisi permintaan kurang signifikan. Dari sisi nonfundamental, tekanan inflasi *administered prices* dan *volatile foods* diperkirakan akan memberi tekanan minimal terhadap inflasi pada triwulan IV-2009.

Ekspektasi inflasi masyarakat pada akhir tahun 2009 diperkirakan sedikit meningkat, walaupun masih terkendali. Relatif membaiknya ekspektasi inflasi antara lain didorong oleh kebijakan pemerintah dalam distribusi LPG yang sempat mengalami peningkatan harga. Selain itu, kecenderungan inflasi yang berada dalam tren menurun setelah masa perayaan hari Idul Fitri turut membentuk ekspektasi bahwa inflasi di masa yang akan datang akan lebih rendah dari saat sekarang.

Meskipun demikian perlu diwaspadai tekanan harga yang berasal dari bahan makanan karena berkurangnya stok beras pada musim tanam. Berdasarkan analisis dan asesmen dari data yang tersedia, diperkirakan Inflasi triwulanan Lampung pada triwulan IV-2009 akan mencapai kisaran 1,0%-1,5%(qtq), atau inflasi tahun 2009 diperkirakan mencapai kisaran 5,6%-6,1%(yoy).

Faktor-faktor yang perlu terus dicermati lebih jauh untuk dapat meminimalisasi kenaikan harga diantaranya adalah menjaga kelancaran distribusi bahan makanan, termasuk percepatan pelayanan di pelabuhan Merak-Bakauheni, ketersediaan infrastruktur dalam keadaan yang baik serta peningkatan koordinasi satuan kerja terutama dalam kecukupan bahan makanan maupun bahan bakar.

3. PROSPEK PERBANKAN

Pada triwulan IV-2009 kedepan, pertumbuhan intermediasi perbankan di Provinsi Lampung diperkirakan akan lebih cepat dibandingkan triwulan laporan. Kecenderungan penurunan suku bunga serta meningkatnya permintaan akan direspon lebih cepat oleh perbankan dengan merealisasikan *business plan* tahun 2009. Meskipun

demikian, perbankan masih tetap hati-hati dalam melaksanakan ekspansi kredit yang disalurkan seiring dengan masih tingginya risiko likuiditas dan risiko kredit yang dihadapi perbankan. Perbankan di Lampung diperkirakan masih akan fokus pada peningkatan penghimpunan dana dari masyarakat dan lebih berhati-hati dalam pemberian kredit.

Lampiran

Tabel Porsi PDRB Sektoral Lampung

Lapangan Usaha	2007			2008				2009		
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Pertanian	38.2	37.6	34.9	40.4	41.0	38.7	34.6	40.7	41.7	39.8
Pertambangan & Penggalian	3.7	3.4	3.5	3.3	3.1	3.0	3.1	2.1	1.8	2.0
Industri Pengolahan	13.6	14.2	13.7	13.6	12.7	12.4	13.6	13.4	12.9	13.7
Listrik, Gas & Air Bersih	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5
Bangunan	5.2	5.0	5.2	4.2	4.3	4.4	4.7	4.3	4.2	4.2
Perdagangan, Hotel & Restoran	14.4	13.6	13.8	13.7	13.1	13.7	14.1	13.5	13.1	13.7
Pengangkutan & Komunikasi	8.5	8.5	8.4	9.1	8.7	8.9	9.1	9.7	9.4	9.5
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6.0	5.9	6.2	6.3	6.1	6.6	6.6	6.5	6.2	6.3
Jasa-jasa	9.8	11.1	13.7	8.8	10.4	11.8	13.7	9.3	10.2	10.3
PDRB	100.0									

Tabel PDRB Sektoral Lampung Menurut Harga Berlaku

Lapangan Usaha	2007	2008				2009		
	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Pertanian	5,569	7,034	7,681	7,498	6,562	8,265	9,195	9,049
Pertambangan & Penggalian	554	570	579	577	581	422	406	452
Industri Pengolahan	2,189	2,360	2,376	2,412	2,579	2,733	2,847	3,109
Listrik, Gas & Air Bersih	103	104	109	113	116	81	87	121
Bangunan	826	735	806	846	891	881	915	964
Perdagangan, Hotel & Restoran	2,213	2,385	2,451	2,653	2,669	2,743	2,886	3,111
Pengangkutan & Komunikasi	1,340	1,583	1,635	1,725	1,718	1,976	2,065	2,168
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	997	1,100	1,152	1,271	1,250	1,328	1,370	1,423
Jasa-jasa	2,187	1,523	1,959	2,292	2,598	1,893	2,254	2,353
PDRB Dengan Migas	15,977	17,394	18,747	19,387	18,962	20,323	22,027	22,750
PDRB Tanpa Migas	15,617	17,034	18,381	19,021	18,596	20,118	21,838	22,518

Tabel Perkembangan inflasi bulanan Kota Bandar Lampung

	2007	2008						2009								
	12	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inflasi (mtm,%)																
Umum	0.70	2.20	1.04	1.64	0.65	0.06	0.03	0.98	-0.31	0.25	-1.26	-0.37	0.34	0.79	1.33	2.66
1 Bahan Makanan	1.81	3.02	1.14	3.44	-0.26	-1.41	0.69	3.21	-0.98	-0.68	-3.12	-1.06	0.80	2.38	0.40	7.22
2 Makanan Jadi	0.61	3.69	0.39	0.55	1.57	0.38	1.22	1.85	1.55	0.85	0.42	0.23	-0.05	0.06	1.05	1.63
3 Perumahan	0.29	2.17	2.06	2.20	0.32	1.12	0.20	1.18	0.28	0.70	-0.91	-0.42	0.36	0.23	3.11	1.04
4 Sandang	1.38	2.91	-0.05	1.61	0.21	-0.13	1.91	0.34	3.31	1.72	-4.17	-0.01	0.33	0.36	-0.03	2.27
5 Kesehatan	-0.49	1.78	2.11	-0.45	0.45	0.31	-0.70	-0.04	0.55	-0.13	0.42	0.20	-0.20	0.48	0.53	0.00
6 Pendidikan	0.12	0.10	0.59	0.10	6.53	0.84	0.48	0.63	0.00	0.20	0.00	-0.41	0.56	0.48	4.44	0.00
7 Transportasi	0.04	0.03	0.39	-0.05	-0.02	-0.44	-2.30	-3.47	-3.88	0.08	0.02	-0.02	0.00	0.07	0.00	0.07
Sumbangan																
Umum	0.70	2.20	1.04	1.64	0.65	0.07	0.03	0.98	-0.31	0.25	-1.26	-0.37	0.11	0.79	1.33	2.66
1 Bahan Makanan	0.42	0.82	0.31	0.94	-0.07	-0.39	0.19	0.88	-0.27	-0.19	-0.86	-0.29	-0.04	0.64	0.11	1.96
2 Makanan Jadi	0.10	0.62	0.07	0.09	0.26	0.07	0.21	0.32	0.27	0.15	0.08	0.04	0.06	0.01	0.19	0.29
3 Perumahan	0.07	0.52	0.49	0.53	0.08	0.27	0.05	0.28	0.07	0.17	-0.23	0.10	0.01	0.06	0.76	0.26
4 Sandang	0.12	0.17	0.00	0.09	0.01	-0.01	0.11	0.02	0.19	0.11	-0.26	0.00	0.02	0.02	0.00	0.14
5 Kesehatan	-0.02	0.06	0.08	-0.02	0.02	0.01	-0.02	0.00	0.02	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00
6 Pendidikan	0.01	0.00	0.03	0.00	0.35	0.05	0.03	0.04	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.01	0.03	0.26	0.00
7 Transportasi	0.01	0.00	0.07	-0.01	0.00	0.07	-0.53	-0.55	-0.59	0.01	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.01

Tabel Perkembangan Perbankan Syariah

INDIKATOR PERBANKAN	2007			2008				2009		
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
BANK SYARIAH	Milyar Rp									
Asset	245.8	261.1	288.3	313.8	395.1	412.9	464.0	481.8	547.4	597.8
DPK	192.9	197.2	222.2	218.7	277.4	275.5	319.9	329.7	369.5	408.9
Giro	6.5	11.0	16.3	12.1	18.5	18.9	25.3	28.5	25.9	29.3
Tabungan	131.7	133.2	140.4	140.9	168.7	178.0	185.9	199.6	218.9	229.3
Deposito	54.7	53.0	65.5	65.7	90.2	78.7	108.6	101.6	124.7	150.2
Pembiayaan	178.2	221.4	257.7	285.2	344.5	371.7	400.3	449.0	506.2	553.3
Modal	113.9	149.5	161.5	173.2	198.1	215.4	230.7	263.5	308.1	346.8
Investasi	19.7	19.6	29.5	33.3	41.9	37.0	46.5	57.3	65.3	65.7
Konsumsi	44.6	52.3	66.7	78.7	104.4	119.3	123.1	128.2	132.8	140.8
LDR (%)	92.4	112.2	116.0	130.4	124.2	134.9	125.2	136.2	137.0	135.3
NPL Nominal	2.9	5.0	6.9	13.2	6.4	10.7	17.2	24.0	19.9	36.0
NPL Gross (%)	1.6	2.3	2.7	4.6	1.8	2.9	4.3	5.3	3.9	6.5

Daftar Istilah

<i>Administered Price</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah
Andil Inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot Inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i> . Merupakan ratio yang menunjukkan ukuran perbandingan antara modal yang dimiliki suatu bank dengan tingkat risiko yang terjadi.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
DPK	Dana Pihak Ketiga. Yaitu dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
IEK	Indeks Ekspektasi Konsumen. Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
IHK	Indeks Harga Konsumen. Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
IKE	Indeks Kondisi Ekonomi. Salah satu pembentukan IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
IKK	Indeks Keyakinan Konsumen. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
IPM	Indeks Pembangunan Manusia. Ukuran Kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli.
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i> . Merupakan ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.

Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
NPL	<i>Non Performing Loan</i> . Merupakan klasifikasi yang menunjukkan tingkat kesehatan terhadap pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PAD	Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan yang di peroleh dari aktifitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya
Sektor Ekonomi Dominan	Sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
<i>Share Effect</i>	Kontribusi pangsa sektor atau subsektor terhadap total PDRB
<i>Share of Growth</i>	Kontribusi pertumbuhan suatu sektor ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB.
<i>Volatile Food</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor musiman.
Yoy	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.